



Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif



— KOTA SURAKARTA —

20
24



TIM PENYUSUN



Penanggung jawab
Eny Ellya Nora, S.Pi., M.Si.



Pengarah
Kinkin Sultanul Hakim, S.H., M.M.



Penyunting
Rizki Tegar P. R. S., S.E.



Penyusun
Effendi Maruli S., S.E., S.H., M.H.



Wiwin Endrawati, S.H., M.H.

Agus Sudarmono, S.E.

Ari Angga, S.H.

Danang Mardi Prabowo, S.Kom.

Yuliana, SE, MM.

Peserta Magang Sekretariat DPRD
periode Februari dan Juli 2025

Diterbitkan Oleh : Sekretariat DPRD Kota Surakarta

Nomer Rekomendasi : K-25.3372.005

Media & Kreatif

Arifin Rochman, S.I.Kom.

Setyo Rini M, A.Md.

Penulis & Layout

Febri Ramanda, SE .

FOTO PEGAWAI SEKRETARIAT DPRD KOTA SURAKARTA



KATA PENGANTAR

Di jantung Jawa Tengah, di mana tradisi terpadu harmonis dengan kemajuan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta berdiri tegak sebagai pilar demokrasi dan pengabdian kepada masyarakat Kota Surakarta. Sebagai Sekretaris lembaga yang terhormat ini, saya merasa bangga dan terhormat mempersembahkan buku ini, Buku Profil Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Surakarta tahun 2025. Buku ini dirancang untuk memberikan gambaran utuh tentang kinerja organisasi, mengungkap dedikasi sumber daya manusia, strategi dan arah kebijakan, serta capaian-capaian kolektif yang menjadi fondasi pengabdian kami kepada masyarakat Surakarta.

Buku ini pada hakikatnya adalah wujud semangat kolaborasi dan sinergi antara anggota dewan terpilih dan seluruh stakeholders yang menjadi tulang punggung dan semangat dalam pelayanan administratif yang kami hadirkan. Melalui pembahasan mendalam tentang alokasi staf, kami memaparkan perencanaan detail yang menjamin setiap bagian beroperasi secara efisien dan akuntabel. Dengan memetakan peran dan tanggung jawab, kami menegaskan bagaimana keahlian yang beragam bersatu untuk menjawab kebutuhan dinamis masyarakat Surakarta.

Bagian tentang usia dan demografi mencerminkan komitmen kami terhadap inklusivitas dan dinamika antargenerasi. Rentang umur yang variatif memerlukan kebijakan strategi dan ide inovatifnya untuk mendorong terobosan. Keragaman ini bukan sekadar angka namun adalah kekuatan kami, memupuk kreativitas dan ketangguhan dalam menghadapi tantangan pemerintahan modern dan tuntutan reformasi birokrasi.

Terakhir bagian prestasi mencatat perjalanan dampak nyata yang telah kami wujudkan. Dari dukungan tinggi DPRD hingga program substantif sekretariat DPRD, setiap pencapaian mempertegas tekad kami untuk mengubah visi menjadi aksi. Semua ini adalah bukti kepercayaan yang diberikan warga Surakarta serta dedikasi tak kenal lelah dari seluruh anggota tim.



Hormat Kami,



Kuntir Sohanul Hakim, S.H., M.M.
Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Kota Surakarta

DAFTAR ISI

Tim Penyusun	i
Foto Pegawai Sekretariat DPRD	ii
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	iv
Daftar Tabel	v
Daftar Gambar	viii

1	Pendahuluan		1
2	Gambaran Umum dan Profil		5
3	Capaian Kinerja		18
4	Umum dan Keuangan		43
5	Persidangan dan Perundang-undangan		78
6	Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan		175

DAFTAR TABEL

Nomor Tabel	Judul Tabel	Halaman
Tabel 2.1	Pegawai Sekretariat DPRD Kota Surakarta Berdasarkan Pendidikan Terakhir Ditamatkan Tahun 2024	13
Tabel 2.2	Jumlah Pegawai Menurut Jabatannya Tahun 2021 – 2024	16
Tabel 3.1	Indikator Kinerja Utama Utama Perangkat Tahun 2021-2026	20-21
Tabel 3.2	Indikator dan Target Kinerja Sasaran Perangkat Daerah Tahun 2024 Sesuai Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026	22-41
Tabel 4.1	Rincian Belanja dan Realisasi Anggaran Sekretariat DPRD Kota Surakarta Tahun Anggaran 2024	47
Tabel 4.2	Realisasi Anggaran Sekretariat DPRD Kota Surakarta Tahun 2024	48-66
Tabel 4.3	Laporan Pengawasan Anggaran Definitif Per Sub Kegiatan 2024	67-69
Tabel 4.4	Jumlah Sarana dan Prasarana Berdasarkan Kondisi di Perangkat Daerah Tahun 2024	72
Tabel 4.5	Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah Sekretariat DPRD Kota Surakarta	73
Tabel 4.6	Rekap Nilai Kematangan Organisasi Sekretariat DPRD Kota Surakarta	74
Tabel 4.7	Rekap Nilai SKM Sekretariat DPRD Kota Surakarta	75
Tabel 4.8	Rekap Prodi Kampus Peserta Magang Tahun 2023 di Sekretariat DPRD Surakarta	76-77
Tabel 4.9	Rekap Prodi Kampus Peserta Magang Tahun 2024 di Sekretariat DPRD Surakarta	78-81
Tabel 5.1	Rekap Propemperda Tahun 2019-2024	83
Tabel 5.2	Propemperda Tahun 2019	83-85
Tabel 5.3	Kumulatif Terbuka Tahun 2019	86
Tabel 5.4	Propemperda Tahun 2020	86-89
Tabel 5.5	Kumulatif Terbuka Tahun 2020	89
Tabel 5.6	Propemperda Tahun 2021	90-92
Tabel 5.7	Kumulatif Terbuka Tahun 2021	93
Tabel 5.8	Propemperda Tahun 2022	94-96
Tabel 5.9	Kumulatif Terbuka Tahun 2022	97
Tabel 5.10	Propemperda Tahun 2023	97-101

DAFTAR TABEL

Nomor Tabel	Judul Tabel	Halaman
Tabel 5.11	Kumulatif Terbuka Tahun 2023	102
Tabel 5.12	Propemperda Tahun 2024	102-105
Tabel 5.13	Kumulatif Terbuka Tahun 2024	105
Tabel 5.14	Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	107-110
Tabel 5.15	Fraksi Partai Keadilan Sejahtera	110
Tabel 5.16	Fraksi Partai Solidaritas Indonesia	110
Tabel 5.17	Fraksi Partai PAN-Gerindra	112
Tabel 5.18	Fraksi Partai Gerindra	112
Tabel 5.19	Fraksi Partai Karya Amanat Bangsa	113
Tabel 5.20	Susunan Badan Musyawarah DPRD Kota Surakarta Periode 2019-2024	115-116
Tabel 5.21	Susunan Badan Musyawarah DPRD Kota Surakarta Periode Periode 2024-2029	117-118
Tabel 5.22	Susunan Komisi I DPRD Kota Surakarta Periode 2019-2024	119
Tabel 5.23	Susunan Komisi I DPRD Kota Surakarta Periode 2024-2029	120
Tabel 5.24	Susunan Komisi II DPRD Kota Surakarta Periode 2019-2024	121
Tabel 5.25	Susunan Komisi II DPRD Kota Surakarta Periode 2024-2029	122
Tabel 5.26	Susunan Komisi III DPRD Kota Surakarta Periode 2019-2024	123
Tabel 5.27	Susunan Komisi III DPRD Kota Suakarta Periode 2024-2029	124
Tabel 5.28	Susunan Komisi IV DPRD Kota Surakarta Periode 2019-2024	125
Tabel 5.29	Susunan Komisi IV DPRD Kota Surakarta Periode 2024-2029	126
Tabel 5.30	Susunan Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kota Surakarta Periode 2019-2024	127-128
Tabel 5.31	Susunan Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kota Surakarta Periode 2024-2029	128-129
Tabel 5.32	Susunan Badan Anggaran Periode DPRD Kota Surakarta 2019-2024	129-131
Tabel 5.33	Susunan Badan Anggaran DPRD Kota Surakarta Periode 2024-2029	132-133
Tabel 5.34	Susunan Badan Kehormatan DPRD Kota Surakarta Periode 2019-2024	134
Tabel 5.35	Susunan Badan Kehormatan DPRD Kota Surakarta Periode 2024-2029	134
Tabel 5.36	Data keterwakilan gender DPRD Kota Surakarta	135

DAFTAR TABEL

Nomor Tabel	Judul Tabel	Halaman
Tabel 5.37	Jadwal Penayangan Baliho DPRD Kota Surakarta Tahun 2024	1342-143
Tabel 5.38	Jadwal Iklan Greeting Media Cetak DPRD Kota Surakarta Tahun 2024	145-148
Tabel 5.39	Jadwal Iklan Greeting Media Elektronik DPRD Kota Surakarta Tahun 2024	149-150
Tabel 5.40	Jadwal Tayang Talkshow Metro TV Jateng, Dialog bersama DPRD Kota Surakarta Tahun 2024	151-152
Tabel 5.41	Jadwal Tayang Talkshow "Rembug Kutho Sala" DPRD Kota Surakarta Tahun 2024	154-156
Tabel 5.42	Jadwal Siaran Radio Bincang Spesial bersama DPRD Kota Surakarta Tahun 2024	157-162
Tabel 5.43	Jadwal Penayangan Siaran Special Event TA TV Tahun 2024	164
Tabel 5.44	Jadwal Penayangan Iklan Advetorial/Artikel Kegiatan DPRD Kota Surakarta Tahun 2024	166-171
Tabel 5.45	Jadwal Pelaksanaan Bimtek DPRD Kota Surakarta Tahun 2024	173
Tabel 5.46	Pelaksanaan Sidak DPRD Kota Surakarta Tahun 2024	175-176
Tabel 6.1	Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta 2021	187
Tabel 6.2	Laporan Reaisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta 2022	188
Tabel 6.3	Laporan Reaisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta 2023	189
Tabel 6.4	Laporan Reaisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta 2022	190
Tabel 6.5	Kegiatan Anggaran 2023-2024	193
Tabel 6.6	Rapat Komisi Tahun 2024	194-195
Tabel 6.7	Kategorisasi Bidang Hasil Reses Bulan Desember 2024 Sesuai Kamus Bappeda (RPJM 2021-2026)	196-197

DAFTAR GAMBAR

Nomor Gambar	Judul Gambar	Halaman
Gambar 2.1	Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Kota Surakarta	9
Gambar 2.2	Jumlah Pegawai Sekretariat DPRD menurut Status Kepegawaian 2021 - 2024	10
Gambar 2.3	Jumlah Pegawai menurut Jenis Kelamin tahun 2021 - 2024	11
Gambar 2.4	Jumlah Pegawai Sekretariat DPRD Kota Surakarta berdasarkan Unit Penempatan	12
Gambar 2.5	Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan 2021 - 2024	14
Gambar 2.6	Sumber Daya Manusia Sekretariat DPRD Kota Surakarta berdasarkan Golongan dan Jenis Kelamin Tahun 2024	15
Gambar 2.7	Pegawai Sekretariat DPRD Kota Surakarta menurut Jabatan dan Jenis Kelamin tahun 2024	17
Gambar 3.1	Daftar Penghargaan Sekretariat DPRD Kota Surakarta Tahun 2023 - 2024	41 - 42
Gambar 4.1	Realisasi Anggaran Sekretariat DPRD Kota Surakarta Tahun 2020 - 2023	64
Gambar 4.2	Diagram Data Neraca Barang Milik Daerah tahun 2021	68
Gambar 4.3	Diagram Data Neraca Barang Milik Daerah tahun 2022	68
Gambar 4.4	Diagram Data Neraca Barang Milik Daerah Tahun 2023	69
Gambar 4.5	Diagram Data Neraca Barang Milik Daerah Tahun 2024	69
Gambar 4.6	Nilai Kematangan Organisasi Sekretariat DPRD Kota Surakarta Tahun 2023 - 2024	72
Gambar 4.7	Nilai PEKPPP Sekretariat DPRD Kota Surakarta Tahun 2023 - 2024	73
Gambar 4.8	Nilai SKM Sekretariat DPRD Kota Surakarta Tahun 2023 - 2024	74
Gambar 5.1	Distribusi Perda Berdasarkan Kategori 2019 - 2024	103
Gambar 5.2	Jumlah Perda Berdasarkan Pengusul 2019 - 2024	103
Gambar 5.3	Susunan Alat Kelengkapan DPRD	111
Gambar 5.4	Diagram Jumlah Tamu per Tahun 2022 - 2024	135
Gambar 5.5	Jumlah Audiensi per Tahun 2022 - 2024	135
Gambar 5.6	Cover Majalah Semar Batikan Edisi 2025	138
Gambar 5.7	Foto Penayangan Titik Baliho DPRD Kota Surakarta (Hakordia Tahun 2024)	140
Gambar 5.8	Foto Bersama Gathering Media Tahun 2024 di Salatiga	141
Gambar 5.9	Tampilan Iklan HPN 2024 di Media Koran Jateng Pos	145
Gambar 5.10	Tampilan Screenshot Greeting Idul Fitri 1445H di Media Sosial Radios Solopos FM	147

DAFTAR GAMBAR

Nomor Gambar	Judul Gambar	Halaman
Gambar 5.11	Foto-foto Kegiatan Dialog Metro TV Jateng dengan DPRD Kota Surakarta (Rabu, 24 Juli 2024)	149
Gambar 5.12	Foto-foto Kegiatan LIVE Talkshow Rembug Kutho Solo bersama TATV (Kamis, 14 November 2024)	153
Gambar 5.13	Foto - foto kegiatan bincang spesial bersama DPRD Kota Surakarta di Radio Solopos FM (Rabu 20 November 2024)	159
Gambar 5.14	Foto-foto kegiatan spesial event rapat paripurna RAPBD TA, 2025 (Rabu 18 Desember 2024)	162
Gambar 5.15	Tampilan iklan advetorial/artikel di Koran Tribun Jateng dan Jateng Pos Tahun 2024	168
Gambar 5.16	Foto - foto kegiatan Bimtek DPRD Kota Surakarta tahun 2024 (Hotel Grand Mercure - Yogyakarta)	171
Gambar 5.17	Foto - foto Sidak komisi III DPRD Kota Surakarta ke joglo Tahun 2024	174
Gambar 6.1	rapat pembahasan perubahan KUA PPAS	178
Gambar 6.2	Rapat pembahasan APBD	181
Gambar 6.3	Rapat Pembahasan Perubahan APBD	187
Gambar 6.4	Rapat pembahasan Banggar P2APBD	188
Gambar 6.5	Persentase Rapat komisi Tahun 2024	191
Gambar 6.6	Statistik Aspirasi (Reses) Bulan Desember 2024	193

BAB I

PENDAHULUAN



A. Gambaran Umum

Sekretariat DPRD merupakan salah satu Perangkat Daerah yang dibentuk dengan dasar dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surakarta. Sekretariat DPRD merupakan organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memberikan pelayanan administrasi dan dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD.

Secara teknis operasional, Sekretaris DPRD berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD, serta secara administratif bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Sekretariat DPRD mempunyai tugas membantu Wali Kota melaksanakan fungsi pendukung dan layanan administrasi terhadap tugas dan fungsi DPRD. Tugas pokok Sekretariat DPRD meliputi :

- a. Menyelenggarakan administrasi kesekretariatan DPRD
- b. Menyelenggarakan administrasi keuangan DPRD
- c. Mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD
- d. Menyediakan serta mengoordinasikan tenaga ahli sesuai kemampuan keuangan daerah

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat DPRD menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Pengoordinasian pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD;
- b. Pengoordinasian tugas dan fungsi unsur organisasi Sekretariat DPRD.

Selain tugas dan fungsi, Sekretariat DPRD juga menyelenggarakan Layanan Publik, antara lain :

- a. Pelayanan Audiensi;
- b. Pelayanan Tamu Kunjungan Kerja; dan
- c. Pelayanan Sidak.

B. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Walikota Surakarta Nomor 14 Tahun 2023, Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian tugas dan fungsi DPRD yang dipimpin oleh Sekretaris DPRD. Sekretariat DPRD secara teknis operasional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

Buku profil Sekretariat DPRD merupakan sarana publikasi data statistik yang menampilkan kinerja dan sebagai salah satu bukti pertanggungjawaban publik dari Sekretariat DPRD Kota Surakarta.

Berdasarkan fungsi dan tugasnya dalam mendukung trifungsi DPRD dalam pembangunan yaitu fungsi penganggaran, pembentukan perda dan pengawasan, peran sekretariat DPRD sangat penting dan strategis dalam pembangunan. Dalam fungsi penganggaran DPRD berperang dalam proses pembahasan dan penetapan APBD yang disusun bersama dengan jajaran Pemerintah Kota Surakarta. Penganggaran yang tertuang dalam Perda APBD Pemerintah Kota Surakarta ditetapkan setelah ada persetujuan bersama antara eksekutif dan legislatif.

Dalam fungsinya pembentukan raperda, DPRD mempunyai peran dalam menyusun kebijakan bersama dengan pemerintah Kota Surakarta, kebijakan-kebijakan yang berupa Peraturan Daerah tersebut merupakan peraturan yang menjadi pijakan yang menjadi dasar dalam langkah-langkah strategis pembangunan Kota Surakarta

Sedangkan dalam fungsi pengawasan, DPRD mempunyai peran penting dalam melakukan pengawasan baik itu pengawasan dalam bidang pemerintahan, pembangunan infrastruktur, ekonomi, pendidikan, kesehatan maupun pengelolaan keuangan pemerintah. Peran fungsi pengawasan ini bertujuan agar proses pembangunan di segala bidang dapat berjalan secara akuntabel.

Selama ini masyarakat luas belum mengetahui peran-peran dan fungsi Sekretariat DPRD tersebut, karena sulit menemukan akses data maupun profil yang menggambarkan trifungsi DPRD dalam pembangunan selama ini, yang tentunya sangat penting diketahui masyarakat bahwa proses pembangunan selama ini berjalan dan disepakati antara eksekutif dan legislatif serta diawasi oleh legislatif agar pembangunan berjalan dengan baik dan akuntabel.

C. Tujuan

Tujuan disusunnya buku profil Sekretariat DPRD Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- Memberikan gambaran data, tugas dan fungsi Sekretariat DPRD.
- Menyusun data statistik dalam lingkup Sekretariat DPRD untuk digunakan sebagai bahan masukan dalam menentukan kebijakan.
- Sebagai sarana dokumentasi data dan informasi yang dimiliki oleh Sekretariat DPRD.

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penyusunan Buku Profil Sekretariat DPRD dibatasi pada data dari 3 bagian di Sekretariat DPRD Kota Surakarta meliputi:

- a. Bagian Umum dan Keuangan,
- b. Bagian Persidangan dan Perundangan,
- c. Bagian Fasilitasi Pengawasan dan Penganggaran

E. Sumber Data

Salah satu pertimbangan dalam memilih masalah penulisan buku ini adalah ketersediaan sumber data, yang dimaksud sumber data adalah subyek dari mana data dapat diperoleh. Adapun sumber data diperoleh dengan metode:

- **Kualitatif**

Adalah jenis data yang digunakan dalam penelitian untuk mengumpulkan informasi yang tidak dapat diukur secara numerik.

- **Kuantitatif**

Jenis Data yang dapat diukur secara numerik dan digunakan untuk menganalisa fenomena dengan menggunakan metode statistik.

- **Data Lintas Sektoral**

Data dari lintas sektoral merupakan kumpulan data-data lain yang bersumber dari organisasi Perangkat Daerah (OPD) lain.

BAB II

GAMBARAN UMUM DAN PROFIL



Pada tahun 2024, Sekretariat DPRD Surakarta telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Tahun 2023 dan Rencana Strategis Sekretariat DPRD Surakarta, Sasaran Strategis yang harus diwujudkan pada tahun ini, yaitu :

1. Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan Sekretariat DPRD
2. Meningkatnya kualitas dan efektivitas perencanaan dan pencapaian kinerja OPD agar efektif dan efisien
3. Meningkatnya kualitas dan efektivitas perencanaan dan pencapaian kinerja OPD agar efektif dan efisien

Sumber: Sasaran jangka menengah pelayanan Sekretariat DPRD Kota Surakarta

A. Visi Misi Kota Surakarta

Visi dan misi Sekretariat DPRD Kota Surakarta dirumuskan dari visi dan misi Walikota terpilih periode 2021-2026.

- Visi Walikota tersebut adalah:
"Mewujudkan Surakarta Sebagai Kota Budaya Yang Modern, Tangguh, Gesit, Kreatif, dan Sejahtera.
- Adapun Misi Kota Surakarta periode 2021 – 2026:
 1. Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat yang berkelanjutan.
 2. Memperkuat pertumbuhan ekonomi yang adaptif dan berkelanjutan.
 3. Mewujudkan tata ruang dan infrastruktur kota yang mendukung pariwisata dan pemajuan kebudayaan berkelanjutan.
 4. Meningkatkan kualitas dan daya saing pemuda dan masyarakat umum di bidang pendidikan, ekonomi, seni budaya, dan olahraga
 5. Mengembangkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang gesit dan kolaboratif berlandaskan semangat gotong royong dan kebinekaan.

6. Mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bersama warga kota yang berkeadilan dan inklusif
7. Mewujudkan daerah yang kondusif dan kerukunan antar umat beragama dalam tata kehidupan bermasyarakat yang saling menghormati.

B. Misi Sekretariat DPRD Kota Surakarta:

Guna mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Kota Surakarta, terdapat misi yang harus dilaksanakan, yaitu:

- a. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) dalam menjalankan tugas dan wewenang DPRD
- b. Meningkatkan ketersediaan sarana, prasarana, dan manajemen keuangan dalam mendukung kinerja Sekretariat Dewan.
- c. Mengembangkan aksesibilitas masyarakat dalam menyampaikan aspirasi.
- d. Memperkuat peran Sekretariat Dewan dalam menjalankan fungsi – fungsi DPRD.

C. TUJUAN

Guna mewujudkan Misi tersebut, terdapat tujuan yang akan dicapai oleh Sekretariat DPRD, yaitu :

- a. Meningkatkan kualitas SDM dalam melaksanakan tugas dan wewenang DPRD.
- b. Terwujudnya reformasi birokrasi dan pelayanan publik berbasis e-government.
- c. Meningkatkan pencapaian target penetapan perda dengan propemperda.
- d. Meningkatkan kualitas pengelolaan pendokumentasian kegiatan DPRD dan materi rapat DPRD serta produk hukum yang dihasilkan.
- e. Meningkatnya nilai kepuasan Anggota DPRD.
- f. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam menyampaikan aspirasi.

D. STRATEGI

Strategi yang digunakan dalam rangka pencapaian sasaran Sekretariat DPRD Kota Surakarta, adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur melalui bimbingan teknis, studi lanjut, pelatihan dan workshop khusus sesuai dengan kebutuhan pelayanan DPRD.
- b. Meningkatkan kualitas Tenaga Ahli melalui perbaikan proses seleksi Tenaga Ahli, penetapan standar Tenaga Ahli, pelaksanaan MOU dengan lembaga pengirim dan memperluas Tenaga Ahli dari non Perguruan Tinggi.
- c. Meningkatkan ketersediaan penunjang kinerja melalui pemenuhan kualitas sarana dan prasarana, reformasi pengelolaan keuangan, dan penyediaan administrasi perkantoran yang lengkap. Mengembangkan aksesibilitas masyarakat melalui pengembangan Informasi Teknologi, peningkatan kualitas reses, kerjasama media massa dan pengembangan publik hearing serta sosialisasi dengan tokoh masyarakat.
- d. Meningkatkan pengelolaan dokumentasi, kearsipan dan perpustakaan melalui penyediaan sarana dan prasarana kearsipan, penyusunan sistem pengelolaan dokumentasi dan kearsipan, digitalisasi arsip dan dokumentasi dan sistem otomatisasi

E. STRUKTUR ORGANISASI

Dalam Peraturan Wali Kota Surakarta Nomor 14 Tahun 2023, Susunan Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta terdiri dari:

- a. Sekretaris DPRD;
- b. Bagian Persidangan dan Perundang-undangan;
- c. Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan;
- d. Bagian Umum dan Keuangan; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Berikut adalah Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Kota Surakarta menurut Perwali Kota Surakarta Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah:

STRUKTUR ORGANISASI

SETWAN
— KOTA SURAKARTA —

Gambar 2.1 **Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Kota Surakarta**

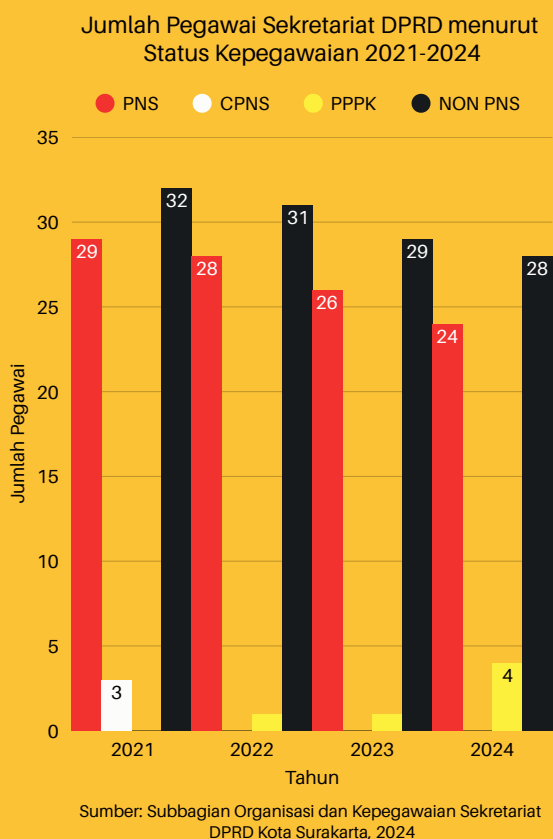


sumber: Perwali 14, 2021

F. Data Jumlah Sumber Daya Manusia

Statistik sumber daya manusia menggambarkan jumlah, komposisi, dan distribusi pegawai di Sekretariat DPRD pada semua Bagian dari tahun 2021 sampai dengan 31 Desember 2024, total jumlah pegawai di tahun 2024 adalah 57 orang. Data jumlah SDM ini mencakup :

- Jumlah ASN dan non ASN menurut status kepegawaian Persebaran pegawai Sekretariat DPRD Tahun 2021 – 2024 menurut status kepegawaian dapat dilihat dalam Diagram Batang berikut :



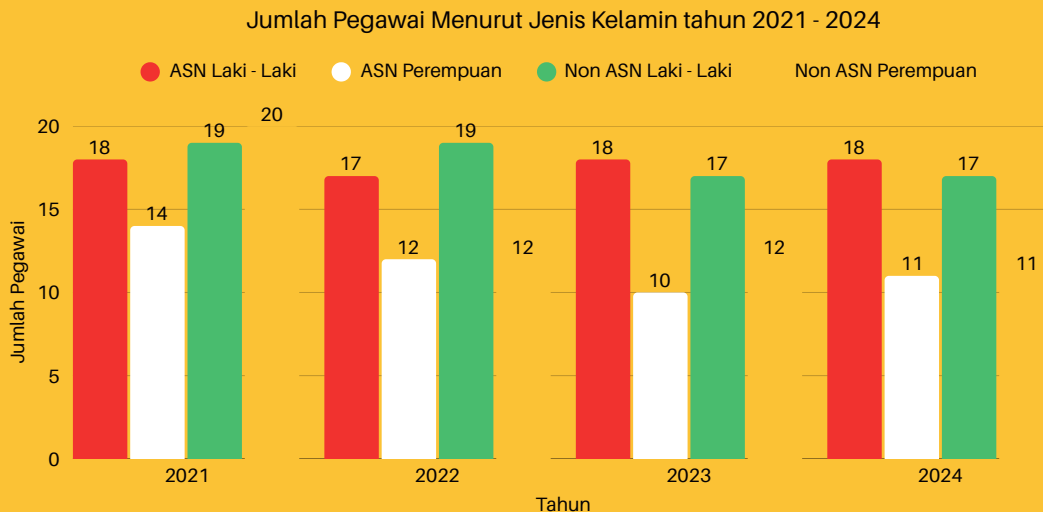
Penjelasan

Diagram menunjukkan tren jumlah pegawai dengan status kepegawaian PNS, CPNS, PPPK dan NON PNS bervariasi dari tahun ke tahun.

Pegawai dengan status PNS mengalami penurunan dari tahun ke tahun sama halnya dengan pegawai, sedangkan tren kenaikan P3K mengalami kenaikan signifikan, Non PNS dalam hal ini status outsourcing juga mengalami penurunan. Outsourcing terdiri dari: Pengemudi, Pramuka Bakti, Pramusaji serta Pengamanan Dalam.

Gambar 2.2 **Jumlah Pegawai sekretariat DPRD Menurut Status Kepegawaian 2021-2024**

G. Jumlah Pegawai menurut Jenis Kelamin



Sumber: Subbagian Organisasi dan Kepegawaian Sekretariat DPRD Kota Surakarta, 2024

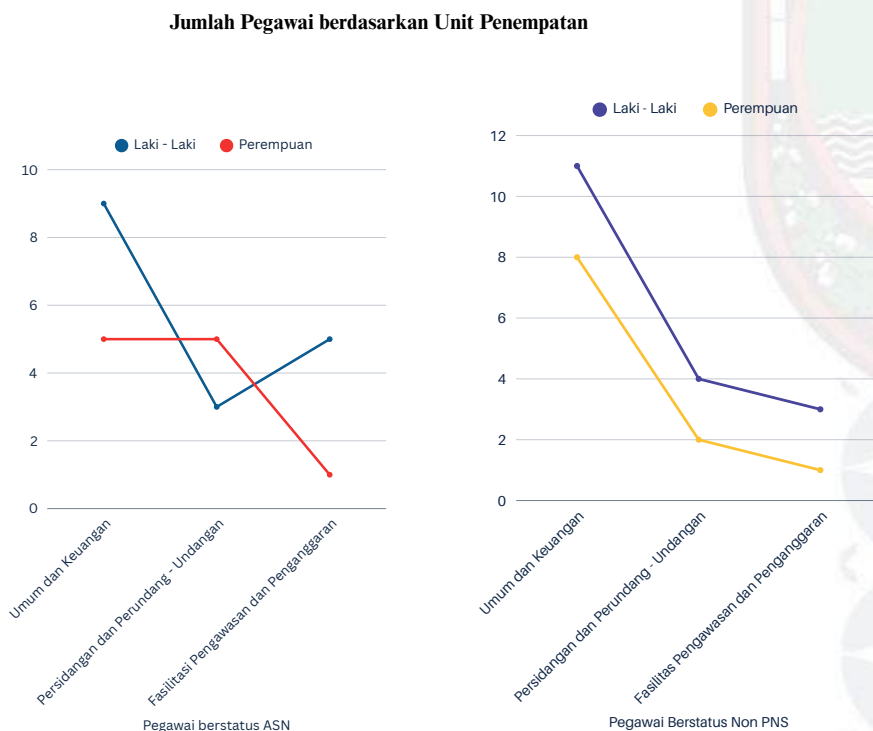
Gambar 2.3 **Jumlah Pegawai sekretariat DPRD Menurut Status Kepegawaian 2021-2024**



Berdasarkan diagram batang di atas jumlah pegawai yang berstatus ASN Laki - laki cenderung stabil dengan jumlah 17 - 18 orang pada rentang tahun 2021 - 2024. Pada ASN yang berjenis kelamin perempuan cenderung mengalami penurunan dari tahun 2021 berjumlah 14, tahun 2022 berjumlah 12 orang dan tahun 2023 berjumlah 10 orang, tetapi di tahun 2024 sedikit mengalami kenaikan dengan jumlah 11 orang.

Pegawai yang berstatus Non ASN Laki - Laki jumlahnya cenderung stabil sebanyak 19 orang dari tahun 2021 - 2022, kemudian mengalami penurunan pada tahun 2023 - 2024 menjadi 17 orang. Sedangkan pegawai berstatus Non ASN dengan jenis kelamin perempuan cenderung stabil jumlahnya sebanyak 12 orang pada tahun 2021 - 2023, walaupun pada tahun 2024 mengalami sedikit penurunan.

H. Jumlah Pegawai Sekretariat DPRD Kota Surakarta Berdasarkan Unit Penempatan



Sumber: : Subbagian Organisasi dan Kepegawaian Sekretariat DPRD Kota Surakarta, 2024

Gambar 2.4 Jumlah Pegawai Sekretariat DPRD Kota Surakarta Berdasarkan Unit Penempatan

Berdasarkan diagram garis di atas jumlah pegawai yang berstatus ASN Laki - laki cenderung stabil dengan jumlah 17 - 18 orang pada rentang tahun 2021 - 2024. ASN yang berjenis kelamin perempuan cenderung mengalami penurunan dari tahun 2021 berjumlah 14, tahun 2022 berjumlah 12 orang dan tahun 2023 berjumlah 10 orang, tetapi di tahun 2024 sedikit mengalami kenaikan dengan jumlah 11 orang.

Pegawai yang berstatus Non ASN Laki - Laki jumlahnya cenderung stabil sebanyak 19 orang dari tahun 2021 - 2022, kemudian mengalami penurunan pada tahun 2023 - 2024 menjadi 17 orang. Sedangkan pegawai berstatus Non ASN dengan jenis kelamin perempuan cenderung stabil jumlahnya sebanyak 12 orang pada tahun 2021 - 2023, walaupun pada tahun 2024 mengalami sedikit penurunan.

I. Jumlah Pegawai Sekretariat DPRD Kota Surakarta Berdasarkan Pendidikan Terakhir Ditamatkan dan Jenis Kelamin

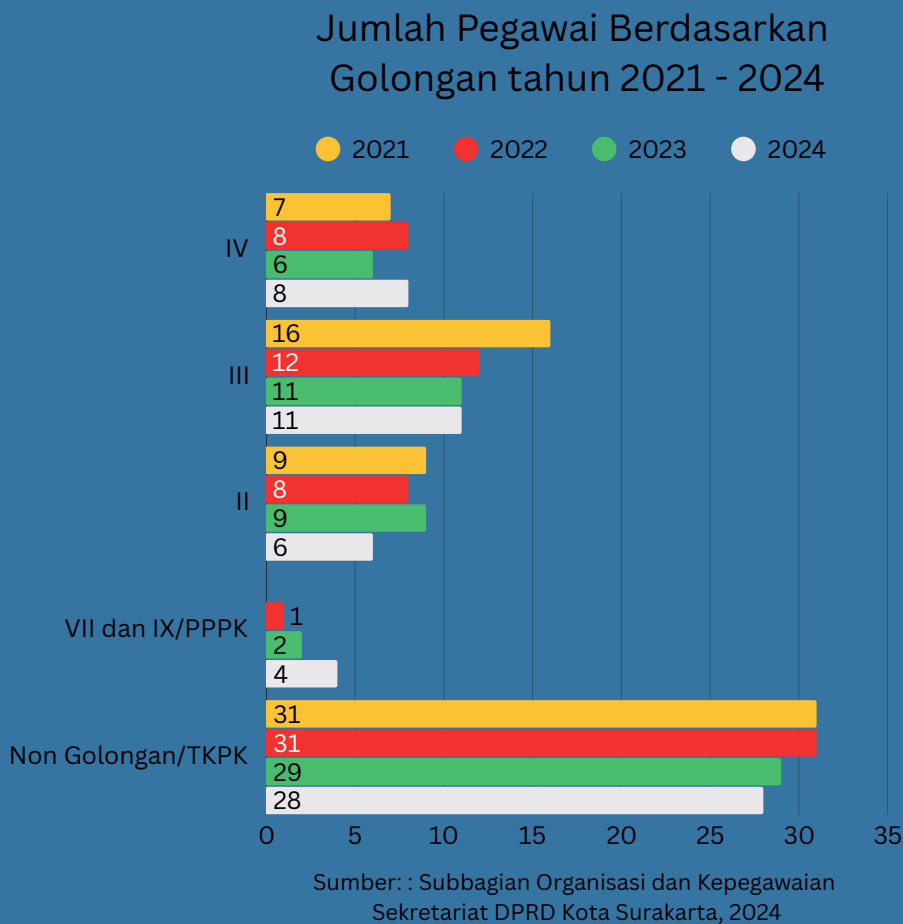
Tabel.2.1 **Pegawai Sekretariat DPRD Kota Surakarta Berdasarkan Pendidikan Terakhir Ditamatkan Tahun 2024**

Pendidikan	ASN		Non ASN		Jumlah	Presentase
						
S2	3	4	0	0	7	12,28%
S1	9	5	6	9	29	50,87%
D3	1	2	2	1	6	10,52%
SMA	5	0	9	1	15	26,31%
Jumlah	18	11	17	11	57	

Sumber: Subbagian Organisasi dan Kepegawaian Sekretariat DPRD Kota Surakarta, 2024

Berdasarkan Tabel 2.1, jumlah pegawai Sekretariat DPRD mayoritas bergelar S-1/D-IV dengan jumlah pegawai 29 orang. Bergelar D-III sejumlah 6 pegawai, SMA sejumlah 15 pegawai, bergelar S-2 sejumlah 7 pegawai. Selanjutnya, rincian tabel menunjukkan pegawai ASN dengan gelar S-1/D-IV terdiri dari laki – laki ASN sejumlah 9 orang dan perempuan ASN sejumlah 5 orang. selanjutnya terdiri atas pegawai non ASN laki – laki sejumlah 6 orang dan perempuan non ASN sejumlah 9 orang. Pegawai dengan gelar D-III, terdiri dari laki – laki ASN sejumlah 1 orang, laki – laki non ASN sejumlah 2 orang dan perempuan ASN sejumlah 2 orang, perempuan Non ASN sejumlah 1. Pegawai dengan gelar SMA, terdiri dari laki-laki ASN sejumlah 5 orang, laki – laki non ASN sejumlah 9 orang dan perempuan non ASN sejumlah 0 orang, perempuan Non ASN sejumlah 1 orang. Selanjutnya pegawai dengan gelar S-2, terdiri dari laki – laki ASN sejumlah 3 orang dan perempuan ASN sejumlah 4 orang.

J. Jumlah Pegawai Sekretariat DPRD Kota Surakarta Berdasarkan Golongan tahun 2021 – 2024



Gambar 2.5 **Jumlah Pegawai Sekretariat DPRD Kota Surakarta Berdasarkan Golongan tahun 2021 – 2024**

Berdasarkan diagram batang di atas dapat di jelaskan kategori pegawai berdasarkan Non Golongan pada tahun 2021 sebanyak 31 orang, tahun 2022 sebanyak 31 orang, tahun 2023 berjumlah sebanyak 29 orang dan tahun 2024 berjumlah 28 orang. Kategori pegawai berdasarkan Non Golongan terjadi penurunan bertahap setiap tahun setelah 2022.

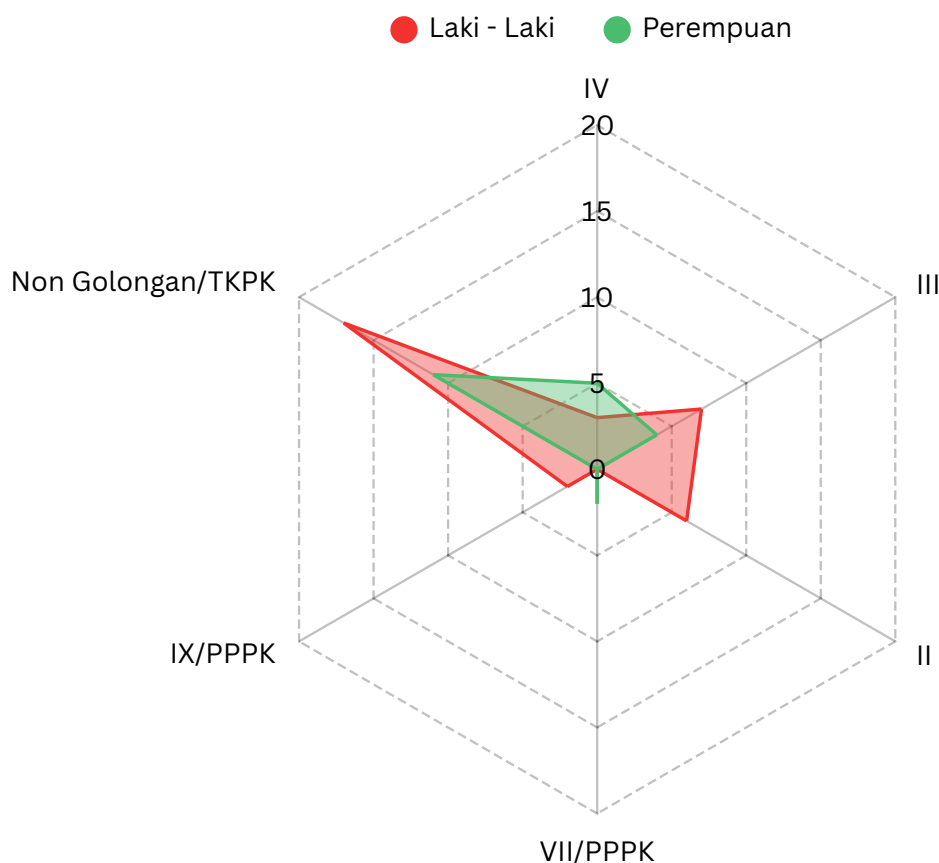
Pegawai dengan golongan PPPK di tahun 2021 berjumlah 1 orang, tahun 2022 berjumlah 2 orang, tahun 2023 berjumlah 4 orang dan tahun 2024 berjumlah 2 orang. Pegawai dengan kriteria golongan PPPK terjadi peningkatan yang signifikan dari tahun 2021 – 2023 tetapi turun di tahun 2024.

Pegawai yang bergolongan II pada tahun 2021 berjumlah 9, tahun 2022 berjumlah 8 orang, tahun 2023 berjumlah 6 orang dan tahun 2024 sebanyak 6 orang. Terjadi penurunan dari 2021 ke 2023, lalu stagnan di tahun 2024, ini bisa diidentifikasi adanya promosi ke golongan yang lebih tinggi atau pensiun.

Pegawai dengan golongan III cenderung stabil dari tahun 2021 – 2023, kemudian meningkat cukup signifikan di tahun 2024. Hal ini di sebabkan adanya promosi dari golongan II atau rekrutmen baru dengan kualifikasi tinggi. Sedangkan pada pegawai dengan golongan IV terjadi fluktuatif . Ada sedikit terjadi peningkatan di tahun 2023 namun kembali turun di tahun 2024

K. Sumber Daya Manusia Sekretariat DPRD Kota Surakarta Berdasarkan Golongan dan Jenis Kelamin Tahun 2024

Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan dan Jenis Kelamin Tahun 2024



Sumber : Subbagian Organisasi dan Kepegawaian
Sekretariat DPRD Kota Surakarta, 2024

Gambar 2.6 **Sumber Daya Manusia Sekretariat DPRD Kota Surakarta Berdasarkan Golongan dan Jenis Kelamin Tahun 2024**

Berdasarkan Diagram di atas jumlah Pegawai Sekretariat DPRD Kota Surakarta pada tahun terakhir 2024 menurut Golongan berjumlah 57 orang. Jumlah pegawai golongan IV sebanyak 8 orang (laki – laki 3 orang dan perempuan 5 orang), pegawai golongan III sebanyak 11 orang (laki – laki 7 orang dan perempuan 4 orang), pegawai golongan II sebanyak 6 orang (laki – laki 6 orang dan perempuan 0 orang), pegawai golongan VII/PPPK sebanyak 2 orang (laki – laki 0 orang dan perempuan 0 orang), pegawai golongan IX/PPPK sebanyak 2 orang (laki – laki 2 orang dan perempuan 0 orang), pegawai non golongan/TKPK sebanyak 28 orang (laki – laki 17 orang dan perempuan 11 orang).

L. Distribusi Pegawai Berdasarkan Jabatan (2021–2024)

Tabel 2.2 *Jumlah Pegawai Menurut Jabatannya Tahun 2021 – 2024*

No	Jabatan	Tahun			
		2021	2022	2023	2024
1	Struktural	11	5	3	5
2	Fungsional	1	6	7	8
3	Pelaksana	51	49	47	44
Jumlah		63	60	57	57

Sumber. Subbagian Organisasi dan Kepegawaian Sekretariat DPRD Kota Surakarta, 2024

Jabatan Struktural di Sekretariat DPRD Kota Surakarta dari tahun ke tahun mengalami penurunan, dari tahun 2011 berjumlah 11 orang, kemudian tahun 2022 sebanyak 5 orang, tahun 2023 sebanyak 3 orang dan pada tahun terakhir 2024 mengalami peningkatan sebanyak 5 orang. Hal ini disebabkan adanya restrukturisasi jabatan. Sedangkan pada jabatan fungsional mengalami kenaikan yang signifikan, dari yang berjumlah 1 orang pada tahun 2021, kemudian tahun 2022 sebanyak 6 orang, tahun 2023 sebanyak 7 orang dan tahun 2024 naik menjadi 8 orang. Hal ini menunjukkan adanya pergeseran kebijakan ke arah jabatan fungsional.

Jabatan pelaksana pada sekretariat DPRD Kota Surakarta dari tahun ke tahun juga mengalami penurunan, pada tahun 2021 berjumlah 51 orang, tahun 2022 berjumlah 49 orang, tahun 2023 berjumlah 47 orang dan tahun 2024 berjumlah 44 orang, hal ini kemungkinan terjadi karena adanya pensiun atau peralihan ke jabatan fungsional.



Pegawai Sekretariat DPRD Kota Surakarta menurut Jabatan dan jenis kelamin tahun 2024



Struktural

Laki - Laki : 3
Perempuan : 2



Fungsional

Laki - Laki : 3
Perempuan : 5



Pelaksana

Laki - Laki : 29
Perempuan : 15

Gambar 2.7 ***Pegawai Sekretariat DPRD Kota Surakarta menurut Jabatan dan jenis kelamin tahun 2024***

Pada perhitungan tahun terakhir 2024 banyaknya pegawai Sekretariat DPRD Kota Surakarta adalah 57 pegawai, dengan rincian jumlah Pegawai dengan Jabatan Struktural sebanyak 5 orang, pegawai dengan Jabatan Fungsional sebanyak 8 orang, pegawai dengan Jabatan Pelaksana sebanyak 44 orang.



BAB III

CAPAIAN KINERJA

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**#bangga
melayani
bangsa**



Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah adalah bentuk pertanggung-jawaban atas kinerja dari perangkat daerah kepada publik. IKU merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis operasional.

A. Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Tahun 2021 – 2026

Indikator Kinerja Utama Sekretariat DPRD Kota Surakarta berpedoman pada Peraturan Walikota Surakarta Nomor 29 Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1 **Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Tahun 2021-2026**

Nama Perangkat Daerah	:	Sekretariat DPRD
Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan	:	Fungsi lainnya kewenangan dukungan fungsi DPRD
Tugas	:	Menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan
Fungsi	:	a.penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD; b.penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD; c.fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD; d.penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD; dan e.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

SASARAN STRATEGIS	IKU	PENJELASAN
Terwujudnya birokrasi yang responsif, adaptif, gesit dan kolaboratif	Persentase aspirasi dalam Pokok Pikiran DPRD yang sesuai dengan prioritas tema prioritas RKPD	<p>Alasan Pemilihan Indikator:</p> <p>Untuk mengukur jumlah aspirasi masyarakat yang selaras dengan sasaran jangka menengah daerah dan tersampaikan melalui forum reses DPRD.</p>
		<p>Formulasi Pengukuran:</p> <p>aspirasi dalam pokok pikiran DPRD sesuai dengan proritas tema prioriras RKPD th (n)/Seluruh aspirasi dalam pokok pikiran DPRD th (n) $\times 100\%$</p>
		<p>Definisi Operasional:</p> <p>Aspirasi masyarakat adalah usulan masyarakat perihal kebutuhan, permasalahan, dan gagasan yang disampaikan kepada anggota DPRD pada saat reses maupun non reses.</p> <p>Pokok-pokok pikiran Dewan adalah dokumen yang memuat sajian telaah Dewan atas rekapitulasi usulan mayarakat yang disampaikan kepada DPRD, untuk selanjutnya diusulkan kepada OPD pada forum gabungan OPD, sebagai tahapan proses penyusunan RKPD.</p>

B. Indikator Kinerja Sasaran Perangkat Daerah

Berdasarkan Nomenklatur Peraturan Walikota Nomor 42 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta dengan beberapa program yang memiliki indikator sasaran Perangkat Daerah seperti pada tabel berikut:

Tabel 3.2 **Indikator dan Target Kinerja Sasaran Perangkat Daerah Tahun 2024 Sesuai Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021–2026**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024
Terwujudnya birokrasi yang responsif, adaptif, gesit, dan kolaboratif	Persentase aspirasi dalam Pokok Pikiran DPRD yang sesuai dengan prioritas tema RKPD	%	57
Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan Sekretariat DPRD	Persentase layanan Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi DPRD sesuai SOP	%	58
PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Jumlah aspirasi masyarakat dalam pokok pikiran DPRD yang sesuai sasaran RPJMD dibagi sesuai seluruh aspirasi masyarakat dikalikan 100	%	48,78
	Jumlah layanan Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi DPRD bidang legislasi sesuai SOP dibagi jumlah rencana layanan dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi DPRD bidang legislasi dikalikan 100	%	82

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024
Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Jumlah perda yang disahkan dibagi jumlah raperda yang dibahas dikalikan 100	%	82,42
Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Peraturan Daerah	Dokumen	1
Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Perda	Dokumen	12
Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	Dokumen	3
Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/ Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang difasilitasi	Dokumen	4

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024
Penyusunan Tata Tertib DPRD	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	Dokumen	1
Pembahasan Kebijakan Anggaran	Jumlah kebijakan anggaran yang telah dibahas dibagi jumlah kebijakan anggaran yang direncanakan dibahas dikalikan 100	%	80,45
Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	Dokumen	1
Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Dokumen	1
Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	Dokumen	1
Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan APBD	Dokumen	1
Pembahasan Laporan Semester	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	Dokumen	2

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024
Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Dokumen	1
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah realisasi pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan dibagi jumlah rencana pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan dikalikan 100%	kegiatan	96
Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Laporan	24
Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Bidang Infrastruktur	Laporan	24
Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Laporan	24

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024
Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Bidang Perekonomian	Laporan	24
Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Dokumen	1
Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	Dokumen	1
Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggung jawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggung jawaban Kepala Daerah	Dokumen	1
Peningkatan Kapasitas DPRD	Jumlah anggota DPRD yang mengikuti bintek peningkatan kapasitas dibagi seluruh jumlah anggota DPRD dikalikan 100%	%	75,12

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024
Orientasi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD	Dokumen	1
Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	Dokumen	6
Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Dokumen	4
Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	Orang	4
Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Dokumen	1
Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	Dokumen	1
Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Jumlah aspirasi masyarakat yang terserap dibagi target penyerapan aspirasi masyarakat dikalikan 100%	%	53,41

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024
Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	Laporan	12
Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	Dokumen	3
Pelaksanaan Reses	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	Dokumen	3
Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Kode Etik DPRD yang tersusun.	%	100
Penyusunan Kode Etik DPRD	Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	Dokumen	1
Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	Laporan	12
Pembahasan Kerja Sama Daerah	Jumlah kerjasama daerah yang dibahas dan disahkan	Dokumen	2

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024
Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerjasama Daerah	Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	Dokumen	1
Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun	Dokumen	1
Fasilitasi Tugas DPRD	Jumlah realisasi pelaksanaan Fasilitasi Tugas DPRD dibagi jumlah rencana pelaksanaan Fasilitasi Tugas DPRD dikalikan 100	%	85,85
Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Dokumen	51
Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	Laporan	1
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Dokumen	12

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024
Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Dokumen	12
Meningkatnya kualitas dan efektivitas perencanaan dan pencapaian kinerja OPD agar efektif dan efisien	Nilai Maturitas Kelembagaan	Skor	48
	Nilai SAKIP	Skor	67
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Nilai SAKIP berdasarkan perhitungan SAKIP sesuai peraturan perundangan	Skor	77,90
	Nilai SKM berdasarkan perhitungan SKM sesuai peraturan perundangan	Skor	86
	Nilai SPIP berdasarkan perhitungan SPIP sesuai peraturan perundangan	Skor	3,8

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah kebutuhan untuk administrasi umum yang terpenuhi dibagi jumlah kebutuhan untuk administrasi umum yang direncanakan dipenuhi dikalikan 100	%	100
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Dokumen	1
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	12
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	1
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	1

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pengadaan kendaraan dinas jabatan dan Operasional.	%	92,89
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	80
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	5
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Saranadan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	15
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi dibagi jumlah asa penunjang urusan pemerintahan yang direncanakan dipenuhi dikalikan 100	%	100

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah BMD Penunjang Sekretariat DPRD yang terpelihara dikali 100	%	100
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	13

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024
Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	25
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	57
Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Bulan	12
Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Bulan	12
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran yang terealisasi dibagi dengan dokumen perencanaan penganggaran dikali 100	%	100

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	2
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	2
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	2
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	2

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	2
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	1
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	4
Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Jumlah realisasi pelaksanaan layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD dibagi jumlah rencana pelaksanaan layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD dikalikan 100	%	100

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024
Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	Orang/ Bulan	45
Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	Paket	2
Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	Orang	45
Kegiatan Layanan Administrasi DPRD	Jumlah realisasi pelaksanaan layanan Administrasi DPRD dibagi jumlah rencana pelaksanaan layanan Administrasi DPRD dikalikan 100	%	100
Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Dokumen	1
Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	Laporan	12

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024
Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Laporan	12
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	Paket	12
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen-dokumen yang terealisasi dibagi dengan jumlah dokumen keuangan yang tersusun dikali 100	%	100
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Org/ bln	406
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	2

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	1
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	1
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah kebutuhan administrasi kepegawaian Sekretariat DPRD yang terpenuhi dibagi jumlah rencana kebutuhan administrasi kepegawaian Sekretariat DPRD dikalikan 100	%	100
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	1

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	360
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	62
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	4

Sumber Data: Dokumen Renja Sekretariat DPRD Kota Surakarta Tahun 2024

Gambar 3.1 **Daftar Penghargaan Sekretariat DPRD Kota Surakarta Tahun 2023-2024**



**Penghargaan terbaik II
Pengelolaan JDIH se Jawa
Tengah tahun 2023**

**Penghargaan terbaik III
Laporan Keuangan Kategori
Perangkat Daerah Instansi
Besar tahun 2023**



**Penghargaan terbaik II
Pengelolaan Arsip Kota
Surakarta tahun 2023**



Juara I Pengawasan Kearsipan Internal Kota Surakarta 2024



Penghargaan Terbaik III Terbaik Tingkat Nasional JDIH Award Tahun 2024

Penghargaan terbaik V Pengelola JDIH Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024





BAB IV **UMUM DAN** **KEUANGAN**



A. Tugas dan Fungsi

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta. Bagian Umum dan Keuangan, terdiri atas:

1. Subbagian Administrasi, Perencanaan, dan Keuangan; dan
2. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri atas:
 - a. Sub Koordinator Kepegawaian Dan Organisasi, dan
 - b. Sub Koordinator Perlengkapan dan Rumah Tangga.

Uraian tugas dan fungsi masing-masing jabatan sesuai Peraturan Walikota Nomor 42 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai berikut:

Bagian Umum dan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dewan. Kepala Bagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan tata usaha dan kepegawaian, program dan keuangan serta rumahtangga. Kepala Bagian Umum dan Keuangan mempunyai fungsi:

1. Penyelenggaraan ketatausahaan Sekretariat DPRD;
2. Pengelolaan kepegawaian dan organisasi Sekretariat DPRD;
3. Pengelolaan administrasi keanggotaan DPRD;
4. Pengelolaan tenaga ahli sesuai dengan kebutuhan DPRD;
5. Penyediaan fasilitas fraksi DPRD;
6. Penyelenggaraan pengadaan dan pemeliharaan kebutuhan rumah tangga DPRD;
7. Penyelenggaraan pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana DPRD;
8. Penyelenggaraan pengelolaan aset yang menjadi tanggung jawab DPRD;
9. Penyusunan perencanaan anggaran Sekretariat DPRD
10. Pelaksanaan evaluasi bahan perencanaan anggaran Sekretariat DPRD;
11. Pelaksanaan verifikasi perencanaan kebutuhan rumah tangga Sekretariat DPRD;
12. Pelaksanaan verifikasi kebutuhan perlengkapan Sekretariat DPRD;
13. Penyelenggaraan penatausahaan keuangan Sekretariat DPRD

14. Pelaksanaan pengelolaan keuangan Pimpinan, Anggota dan Sekretariat DPRD
15. Pengoordinasian pengelolaan anggaran Sekretariat DPRD;
16. Penyelenggaraan pengembangan kelembagaan dan tata laksana pelayanan publik; dan
17. Pembagian tugas, pemberian petunjuk, dan pemberian bimbingan kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas;
18. Pengendalian, penelitian, dan pemeriksaan pelaksanaan tugas bawahan;
19. Pelaksanaan konsultasi dan koordinasi baik vertikal maupun horizontal guna sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan tugas; dan
20. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya

B. Realisasi Anggaran Sekretariat DPRD Kota Surakarta TA 2024

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kota Surakarta, pada tahun anggaran 2024, didukung dengan Anggaran sebesar Rp. 74.222.418.165,-. Anggaran tersebut bersumber dari APBD-P dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 4.1 **Rincian Belanja dan Realisasi Anggaran Sekretariat DPRD Kota Surakarta Tahun Anggaran 2024**

Uraian	Anggaran (Rupiah)
BELANJA OPERASI	73.435.689.681
Belanja Pegawai	29.670.410.926
Belanja Barang dan Jasa	43.765.278.755
BELANJA MODAL	786.728.484
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	786.728.484
JUMLAH BELANJA	74.222.418.165

Penggunaan anggaran tersebut apabila diperinci dalam mendukung pencapaian sasaran adalah sebagai berikut :

Tabel 4.2 **Realisasi Anggaran Sekretariat DPRD Kota Surakarta Tahun 2024**

Sasaran Strategis	Anggaran		Realisasi
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp107.458.279,00	Rp79.729.046,00	Rp68.655.750,00
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Rp9.717.378,00	Rp9.717.378,00	Rp7.762.625,00
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKS SKPD	Rp13.215.378,00	Rp13.215.378,00	Rp10.419.400,00
Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	Rp22.067.000,00	Rp14.937.000,00	Rp11.823.000,00

Sasaran Strategis	Anggaran		Realisasi
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	Rp3.467.130,00	Rp12.716.614,00	Rp10.592.000,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp11.541.376,00	Rp22.273.424,00	Rp22.188.000,00
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp10.940.747,00	Rp19.008.087,00	Rp17.982.600,00
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp4.263.002.104,00	Rp4.470.785.752,00	Rp4.111.127.123,00
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp4.238.607.274,00	Rp4.436.032.326,00	Rp4.078.496.123,00

Sasaran Strategis	Anggaran		Realisasi
	Sebelum	Sesudah	
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	Rp3.467.130,00	Rp12.716.614,00	Rp10.592.000,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp11.541.376,00	Rp22.273.424,00	Rp22.188.000,00
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp10.940.747,00	Rp19.008.087,00	Rp17.982.600,00
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp4.263.002.104,00	Rp4.470.785.752,00	Rp4.111.127.123,00
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp4.238.607.274,00	Rp4.436.032.326,00	Rp4.078.496.123,00

Sasaran Strategis	Anggaran		Realisasi
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp3.182.092,00	Rp11.273.888,00	Rp10.000.000,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD	Rp21.212.738,00	Rp23.479.538,00	Rp22.631.000,00
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp976.209.902,00	Rp1.036.025.000,00	Rp378.653.257,00
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Rp174.060.000,00	Rp302.340.000,00	Rp278.679.900,00

Sasaran Strategis	Anggaran		Realisasi
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Rp126.127.902,00	Rp57.663.000,00	Rp49.946.725,00
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Rp676.022.000,00	Rp676.022.000,00	Rp50.026.632,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp3.057.415.964,00	Rp3.506.113.790,00	Rp2.921.384.238,00
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp46.101.480,00	Rp46.101.480,00	Rp39.083.000,00
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp391.689.115,00	Rp416.574.565,00	Rp409.001.636,00

Sasaran Strategis	Anggaran		Realisasi
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp452.048.000,00	Rp390.675.931,00	Rp271.243.142,00
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp740.008.800,00	Rp840.074.800,00	Rp738.518.120,00
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Rp534.905.271,00	Rp605.301.423,00	Rp488.466.625,00
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp62.794.198,00	Rp56.434.338,00	Rp25.302.400,00
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Rp383.696.900,00	Rp474.341.900,00	Rp267.925.000,00

Sasaran Strategis	Anggaran		Realisasi
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp425.450.000,00	Rp495.287.153,00	Rp494.903.637,00
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Rp20.722.200,00	Rp181.322.200,00	Rp186.940.678,00
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp2.880.000,00	Rp53.000.000,00	Rp811.854.700,00
Pengadaan Mebel	Rp680.000,00	Rp25.000.000,00	Rp509.184.700,00
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp680.000,00	Rp28.000.000,00	Rp161.120.000,00

Sasaran Strategis	Anggaran		Realisasi
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp1.520.000,00	Rp0,00	Rp141.550.000,00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp4.944.485.257,00	Rp5.050.985.257,00	Rp4.711.923.978,00
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp63.674.000,00	Rp63.674.000,00	Rp41.650.000,00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp1.029.006.400,00	Rp1.029.006.400,00	Rp828.346.344,00
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp3.851.804.857,00	Rp3.958.304.857,00	Rp3.841.927.634,00

Sasaran Strategis	Anggaran		Realisasi
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp1.723.855.800,00	Rp1.898.007.600,00	Rp1.667.345.614,00
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp866.535.000,00	Rp775.082.000,00	Rp704.351.969,00
Pemeliharaan Mebel	Rp22.500.000,00	Rp22.500.000,00	Rp9.900.000,00
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp99.240.000,00	Rp459.240.000,00	Rp347.584.500,00

Sasaran Strategis	Anggaran		Realisasi
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp625.970.400,00	Rp521.575.200,00	Rp513.819.145,00
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp109.610.400,00	Rp119.610.400,00	Rp91.690.000,00
Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Rp26.002.945.100,00	Rp26.320.324.100,00	Rp25.649.308.253,00
Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Rp25.234.378.600,00	Rp25.234.378.600,00	Rp24.728.996.053,00
Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Rp611.318.500,00	Rp939.425.500,00	Rp818.293.000,00

Sasaran Strategis	Anggaran		Realisasi
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	
Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Rp33.764.000,00	Rp29.204.000,00	Rp22.932.000,00
Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Rp3.832.568.000,00	Rp3.917.255.320,00	Rp2.786.089.281,00
Penyelenggaraan Kajian Perundang Undangan	Rp846.224.000,00	Rp0,00	-
Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/ Keterangan Naskah Akademik	Rp305.725.000,00	Rp303.445.000,00	Rp149.025.270,00
Penyusunan Tata Tertib DPRD	Rp273.370.000,00	Rp18.775.000,00	Rp13.951.000,00

Sasaran Strategis	Anggaran		Realisasi
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	
Pembahasan Kebijakan Anggaran	Rp1.427.365.000,00	Rp1.922.962.000,00	Rp1.113.125.580,00
Pembahasan KUA dan PPAS	Rp189.750.000,00	Rp309.750.000,00	-
Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Rp189.750.000,00	Rp189.750.000,00	Rp178.013.000,00
Pembahasan APBD	Rp362.580.000,00	Rp615.535.500,00	Rp207.405.012,00
Pembahasan APBD Perubahan	Rp360.255.000,00	Rp335.535.500,00	Rp258.437.629,00
Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Rp325.030.000,00	Rp472.391.000,00	Rp469.269.939,00

Sasaran Strategis	Anggaran		Realisasi
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Rp5.681.209.760,00	Rp8.333.678.000,00	Rp4.975.495.942,00
Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Rp1.191.783.190,00	Rp1.717.739.000,00	Rp1.091.611.440,00
Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Rp1.191.783.190,00	Rp1.722.757.000,00	Rp993.206.445,00
Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Rp1.191.783.190,00	Rp1.704.718.000,00	Rp1.065.800.506,00
Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Rp1.191.783.190,00	Rp1.501.786.000,00	Rp988.508.551,00

Sasaran Strategis	Anggaran		Realisasi
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	
Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Rp2.650.000,00	Rp2.650.000,00	-
Pengawasan Penggunaan Anggaran	Rp600.000.000,00	Rp1.224.726.000,00	Rp388.547.000,00
Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Rp311.427.000,00	Rp459.302.000,00	Rp447.822.000,00
Peningkatan Kapasitas DPRD	Rp5.396.914.350,00	Rp5.039.610.800,00	Rp3.814.360.642,00
Orientasi DPRD	Rp484.989.000,00	Rp502.500.000,00	Rp384.541.500,00

Sasaran Strategis	Anggaran		Realisasi
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	
Orientasi DPRD	Rp484.989.000,00	Rp502.500.000,00	Rp384.541.500,00
Pendalaman Tugas DPRD	Rp3.108.154.000,00	Rp2.591.957.000,00	Rp1.753.387.052,00
Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Rp186.000.000,00	Rp200.000.000,00	Rp198.000.000,00
Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Rp161.184.800,00	Rp159.488.000,00	Rp152.976.000,00
Penyusunan Program Kerja DPRD	Rp339.344.000,00	Rp342.084.000,00	Rp153.473.620,00
Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Rp1.117.242.550,00	Rp1.243.581.800,00	Rp1.171.982.470,00

Sasaran Strategis	Anggaran		Realisasi
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	
Orientasi DPRD	Rp484.989.000,00	Rp502.500.000,00	Rp384.541.500,00
Pendalaman Tugas DPRD	Rp3.108.154.000,00	Rp2.591.957.000,00	Rp1.753.387.052,00
Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Rp186.000.000,00	Rp200.000.000,00	Rp198.000.000,00
Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Rp161.184.800,00	Rp159.488.000,00	Rp152.976.000,00
Penyusunan Program Kerja DPRD	Rp339.344.000,00	Rp342.084.000,00	Rp153.473.620,00
Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Rp1.117.242.550,00	Rp1.243.581.800,00	Rp1.171.982.470,00

Sasaran Strategis	Anggaran		Realisasi
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	
Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Rp2.838.813.000,00	Rp2.805.581.800,00	Rp2.422.968.000,00
Kunjungan Kerja dalam Daerah	Rp7.553.000,00	Rp7.553.000,00	-
Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Rp64.925.000,00	Rp11.925.000,00	Rp4.558.000,00
Pelaksanaan Reses	Rp2.766.335.000,00	Rp2.786.103.800,00	Rp2.418.410.000,00
Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Rp4.134.000,00	Rp4.134.000,00	Rp530.000,00
Pengawasan Kode Etik DPRD	Rp4.134.000,00	Rp4.134.000,00	Rp530.000,00

Sasaran Strategis	Anggaran		Realisasi
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	
Pembahasan Kerja Sama Daerah	Rp5.035.000,00	Rp5.035.000,00	-
Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	Rp5.035.000,00	Rp5.035.000,00	-
Fasilitasi Tugas DPRD	Rp7.920.742.963,00	Rp7.292.306.835,00	Rp5.681.308.608,00
Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Rp7.172.352.223,00	Rp6.193.060.762,00	Rp4.652.704.657,00
Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Rp32.395.000,00	Rp50.205.000,00	Rp12.404.000,00

Sasaran Strategis	Anggaran		Realisasi
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Rp51.039.000,00	Rp51.039.000,00	Rp28.196.000,00
Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Rp664.956.740,00	Rp998.002.073,00	Rp988.003.951,00
TOTAL	Rp70.795.779.388,00	Rp73.435.689.681,00	Rp62.494.218.796,00

Berdasarkan realisasi anggaran tahun 2024, Sekretariat DPRD Kota Surakarta sebesar 84,41%, jika dibandingkan dengan TA 2023 sebesar 95,54% maka serapan anggaran mengalami kenaikan.

Realisasi anggaran dari tahun ke tahun dapat dilihat pada diagram berikut :



Gambar 4.1 **Realisasi Anggaran Sekretariat DPRD Kota Surakarta Tahun 2020–2023**

Tabel 4.3 *Laporan Pengawasan Anggaran Definitif Per Sub Kegiatan 2024*

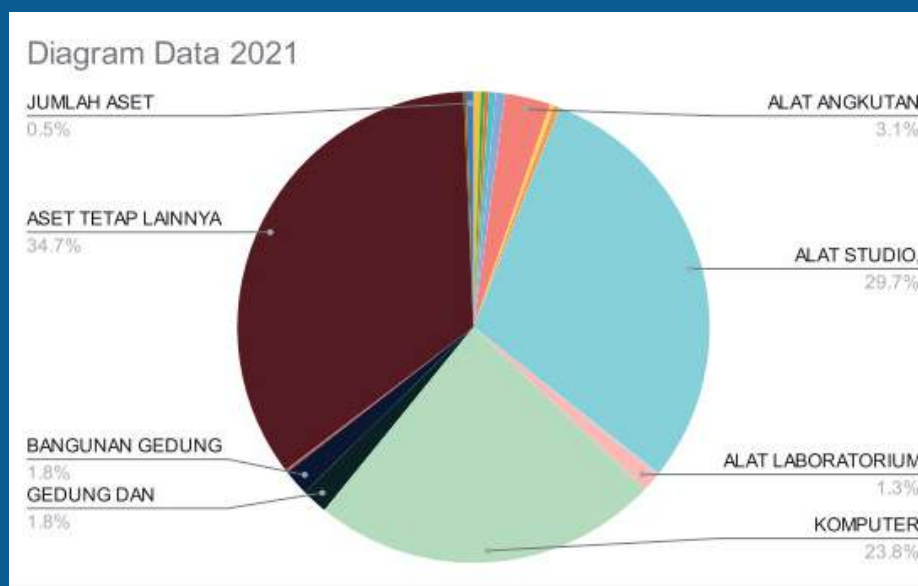
LAPORAN PENGAWASAN ANGGARAN DEFINITIF PER SUB KEGIATAN			
URAIAN	ANGGARAN	TOTAL REALISASI	%
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	79.729.046,00	68.655.750,00	86,11
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	9.717.378,00	7.762.625,00	79,88
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	13.215.378,00	10.419.400,00	78,84
Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	14.937.000,00	11.823.000,00	79,15
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	12.716.614,00	10.592.000,00	83,29
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	22.273.424,00	22.188.000,00	99,62
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	19.008.087,00	17.982.600,00	94,6
TOTAL KEGIATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	171.596.927,00	149.423.375,00	87,08
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.436.032.326,00	4.078.496.123,00	91,94
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	11.273.888,00	10.000.000,00	88,7
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	23.479.538,00	22.631.000,00	96,39
TOTAL KEGIATAN ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	4.470.785.752,00	4.111.127.123,00	91,96
Administrasi Kependidikan Perangkat Daerah			
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	302.340.000,00	278.679.900,00	92,17
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	57.663.000,00	49.946.725,00	86,62
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	676.022.000,00	500.216.632,00	73,99
TOTAL KEGIATAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	1.036.025.000,00	828.843.257,00	80,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	46.101.480,00	39.083.000,00	84,78
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	416.574.565,00	409.001.636,00	98,18
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	390.675.931,00	271.243.142,00	69,43
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	840.074.800,00	738.518.120,00	87,91
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	605.301.423,00	488.466.625,00	80,7
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	56.434.338,00	25.302.400,00	44,84
Fasilitasi Kunjungan Tamu	474.341.900,00	267.925.000,00	56,48
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	495.287.153,00	494.903.637,00	99,92
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	191.322.200,00	186.940.678,00	97,71
TOTAL KEGIATAN ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	3.516.113.790,00	2.921.384.238,00	83,09
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Pengadaan Mebel	510.049.984,00	509.184.700,00	99,83
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	170.570.600,00	161.120.000,00	94,46
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	149.107.900,00	41.550.000,00	94,93
TOTAL KEGIATAN PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	829.728.484,00	711.854.700,00	97,85
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	63.674.000,00	41.650.000,00	65,41
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.029.006.400,00	828.346.344,00	80,5
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.958.304.857,00	3.841.927.634,00	97,06
TOTAL KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	6.710.442.225,00	6.135.633.378,00	93,29
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	775.082.000,00	704.351.969,00	90,87
Pemeliharaan Mebel	22.500.000,00	9.900.000,00	44
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	459.240.000,00	347.584.500,00	75,69
Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	521.575.200,00	513.819.145,00	98,51

Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	119.610.400,00	91.690.000,00	76,66
TOTAL KEGIATAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.898.007.600,00	1.667.345.614,00	87,85
Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD			
Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	25.234.378.600,00	24.728.996.053,00	98,00
Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	939.425.500,00	818.293.000,00	87,11
Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	146.520.000,00	102.019.200,00	69,63
TOTAL KEGIATAN LAYANAN KEUANGAN DAN KESEJAHTERAAN DPRD	26.320.324.100,00	25.649.308.253,00	97,45
Layanan Administrasi DPRD			
Fasilitasi Fraksi DPRD	61.480.000,00	31.041.000,00	50,49
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	1.195.383.500,00	1.082.370.935,00	90,55
TOTAL PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	44.550.430.410,00	41.964.622.473,00	94,2
PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD			
TOTAL KEGIATAN LAYANAN ADMINISTRASI DPRD	1.256.863.500,00	1.113.411.935,00	88,59
Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD			
Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	29.204.000,00	22.932.000,00	78,52
Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	3.917.255.320,00	2.786.089.281,00	71,12
Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	0	0	0
Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	303.445.000,00	149.025.270,00	49,11
Penyusunan Tata Tertib DPRD	18.775.000,00	13.951.000,00	74,31
TOTAL KEGIATAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN DPRD	4.268.679.320,00	2.971.997.551,00	69,62
Pembahasan Kebijakan Anggaran			
Pembahasan KUA dan PPAS	309.750.000,00	0,00	0,00
Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	189.750.000,00	178.013.000,00	93,81
Pembahasan APBD	615.535.500,00	207.405.012,00	33,7
Pembahasan APBD Perubahan	335.535.500,00	258.437.629,00	77,02
Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	472.391.000,00	469.269.939,00	99,34
TOTAL KEGIATAN PEMBAHASAN KEBIJAKAN ANGGARAN	1.922.962.000,00	1.113.125.580,00	57,89
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan			
Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	1.717.739.000,00	1.091.611.440,00	63,55
Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	1.722.757.000,00	993.206.445,00	57,65
Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	1.704.718.000,00	1.065.800.506,00	62,52
Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	1.501.786.000,00	988.508.551,00	65,82
Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	2.650.000,00	0,00	0,00
Pengawasan Penggunaan Anggaran	1.224.726.000,00	388.547.000,00	31,73
Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	459.302.000,00	447.822.609,00	97,5
TOTAL KEGIATAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN	8.333.678.000,00	4.975.496.551,00	59,7
Peningkatan Kapasitas DPRD			
Orientasi DPRD	502.500.000,00	384.541.500,00	76,53
Pendalaman Tugas DPRD	2.591.957.000,00	1.753.387.052,00	67,65
Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	200.000.000,00	198.000.000,00	99
Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	159.488.000,00	152.976.000,00	95,92
Penyusunan Program Kerja DPRD	342.084.000,00	153.473.620,00	44,86
Publikasi dan Dokumentasi DPRD	1.243.581.800,00	1.171.982.470,00	94,24
TOTAL KEGIATAN PENINGKATAN KAPASITAS DPRD	5.039.610.800,00	3.814.360.642,00	75,69
Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat			
Kunjungan Kerja dalam Daerah	7.553.000,00	0	0
Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	11.925.000,00	4.558.000,00	38,22
Pelaksanaan Reses	2.786.103.800,00	2.418.410.000,00	86,8
TOTAL KEGIATAN PENYERAPAN DAN PENGHIMPUNAN ASPIRASI MASYARAKAT	2.805.581.800,00	2.422.968.000,00	86,36
Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD			
Pengawasan Kode Etik DPRD	4.134.000,00	530.000,00	12,82

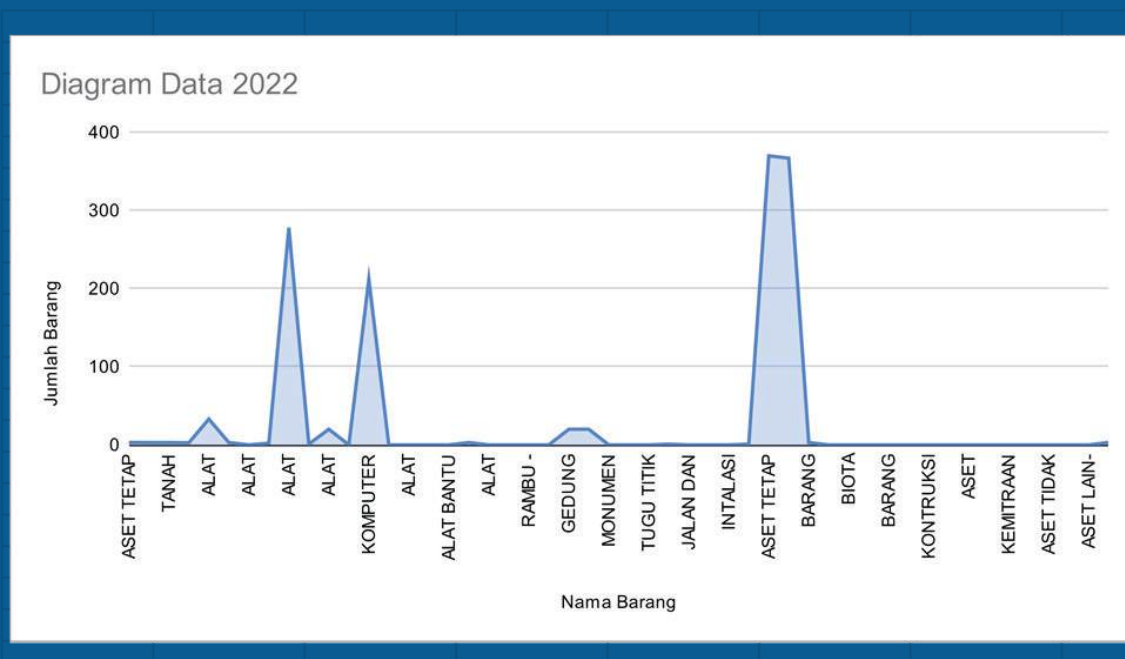
TOTAL KEGIATAN PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN KODE ETIK DPRD	4.134.000,00	530.000,00	12,82
Pembahasan Kerja Sama Daerah			
Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	5.035.000,00	0	0
TOTAL KEGIATAN PEMBAHASAN KERJA SAMA DAERAH	5.035.000,00	0	0
Fasilitasi Tugas DPRD			
Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	6.193.060.762,00	4.911.219.532,00	79,3
Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	50.205.000,00	12.404.000,00	24,71
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	51.039.000,00	28.196.000,00	55,24
Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	998.002.073,00	988.003.951,00	99
JUMLAH	74.222.418.165,00	63.202.924.280,00	85,15

Data dalam tabel tersebut menunjukkan laporan pengawasan anggaran definitif per sub kegiatan dengan total realisasi sebesar 85,15% ditahun 2024.

Diagram Neraca Barang Milik Daerah Sekretariat Dprd Surakarta 2021 – 2022

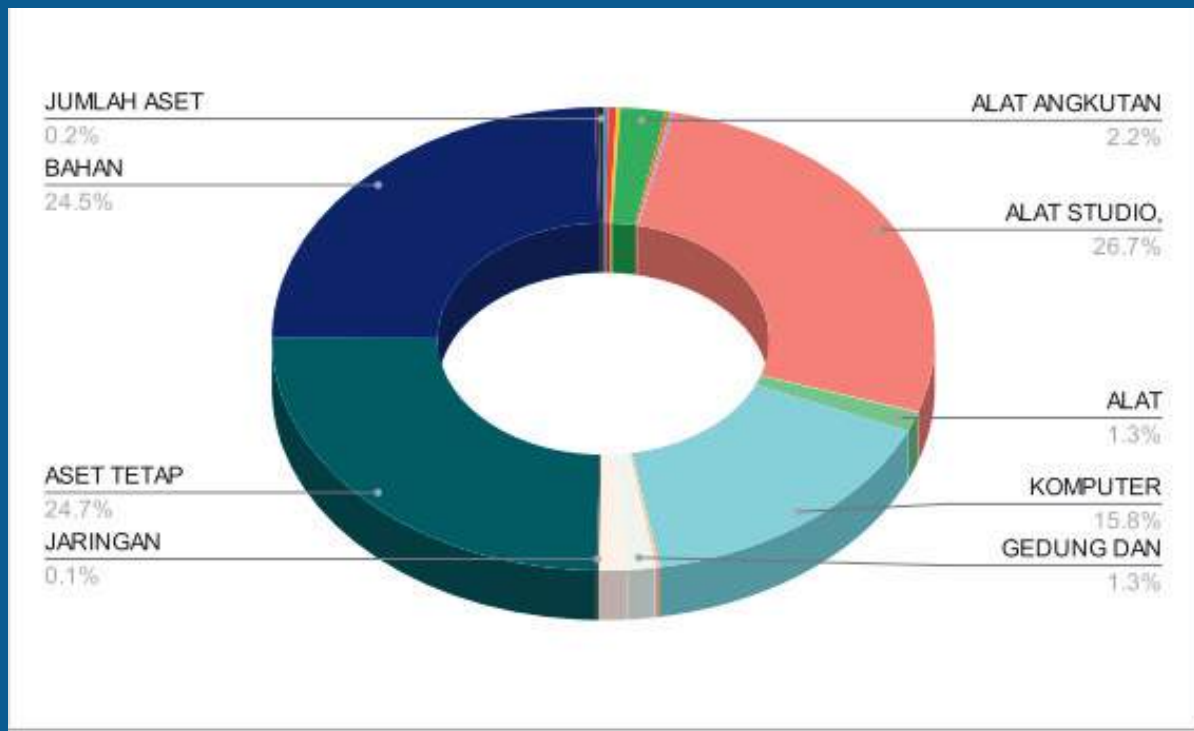


Gambar 4.2 **Diagram data neraca BMD pada tahun 2021**

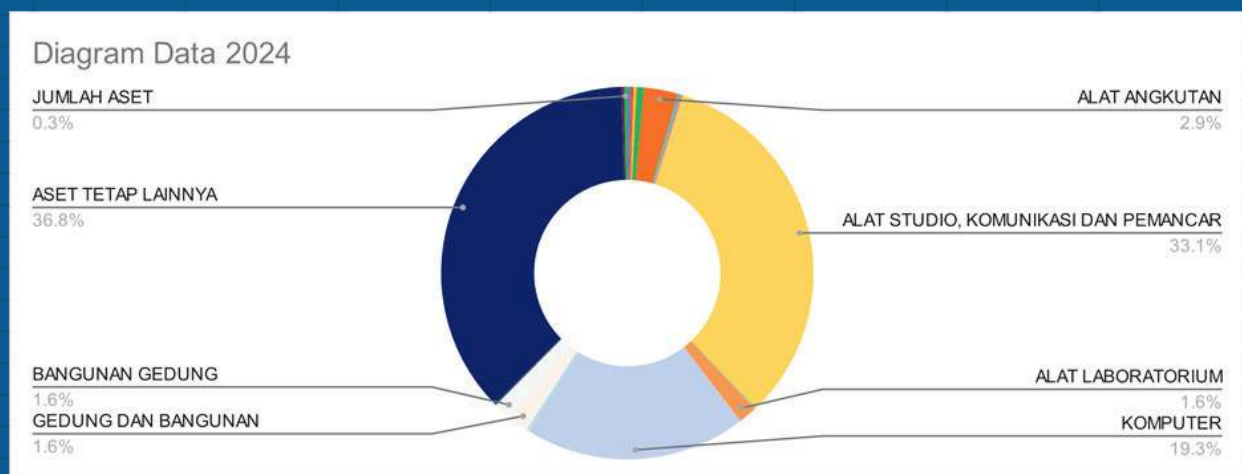


Gambar 4.3 **Diagram Data Neraca Barang Milik Daerah tahun 2022**

Diagram Neraca Barang Milik Daerah Sekretariat Dprd Surakarta 2023 – 2024



Gambar 4.4 **Diagram data neraca Barang Milik Daerah tahun 2023**



Gambar 4.5 **Diagram data neraca Barang Milik Daerah tahun 2024**

C. Penatausahaan Barang Milik Daerah

Uraian pengantar mengenai kondisi sarana dan prasarana yang dimiliki perangkat daerah Sekretariat DPRD Kota Surakarta:

Tabel 4.4 **Jumlah Sarana dan Prasarana Berdasarkan Kondisi di Perangkat Daerah Tahun 2024**

No	Jenis/Nama Aset	Alamat
1.	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Jl. Adi Sucipto No.143 A Surakarta
2.	Gedung Pos Jaga Permanen Surakarta Jln. Blewah, Permanen	Rumah Dinas Pimpinan DPRD Kota
3.	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	Jl. Adi Sucipto No.143 A Surakarta
4.	Rumah Negara Golongan I Type A Permanen.	Jl. Blewah Raya No. 9 karangasem
5.	Rumah Negara Gol I Lain-lain, permanen, Solo.	Jl. Blewah Raya No. 9 karangasem

D. Organisasi dan Kepegawaian

1. Maturitas Kelembagaan

Organisasi dapat dipahami sebagai suatu sistem interaksi yang bergerak begitu dinamis yang dihimpun dari beberapa aspek pokok yang terdapat didalamnya. Definisi dinamis sendiri dapat dipahami bahwa suatu organisasi dalam perjalanan banyak melakukan adaptasi terhadap dinamika perubahan internal dan eksternal.

Pedoman evaluasi kelembagaan instansi pemerintah memiliki maksud dan tujuan bagi instansi daerah untuk memperbaiki, menyesuaikan dan menyempurnakan struktur dan proses organisasi yang sesuai dengan lingkungan strategisnya.

Sekretariat DPRD Kota Surakarta dari tahun 2022-2024 mengalami trend kenaikan nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah dengan capaian sebagai berikut:

Tabel 4.5 **Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah Sekretariat DPRD Kota Surakarta**

No	Tahun	Nilai KOPD	Kategori	Penjelasan
1.	2022	41	Kematangan Tinggi	Pelayanannya Baik
2.	2023	48	Kematangan Sangat Tinggi	Pelayanan Sangat Prima
3.	2024	50	Kematangan Sangat Tinggi	Pelayanan Sangat Prima

Sumber: Hasil Validasi Kematangan Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kota Surakarta

Nilai Kematangan Organisasi Sekretariat DPRD Kota Surakarta dari tahun ke tahun dapat dilihat pada diagram berikut :



Gambar 4.6 **Nilai Kematangan Organisasi Sekretariat DPRD Kota Surakarta Tahun 2023-2024**

2. Penyelenggaraan Pelayanan Publik

Pemantauan dan Evaluasi kinerja penyelenggara pelayanan publik (PEKPPP) menjadi salah satu komponen yang digunakan dalam rangka mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan publik pada masing-masing perangkat daerah. Tujuan diadakannya pemantauan dan evaluasi kinerja adalah adanya perbaikan dan langkah-langkah perbaikannya sehingga perangkat daerah dapat memberikan pelayanan prima kepada pengguna layanan.

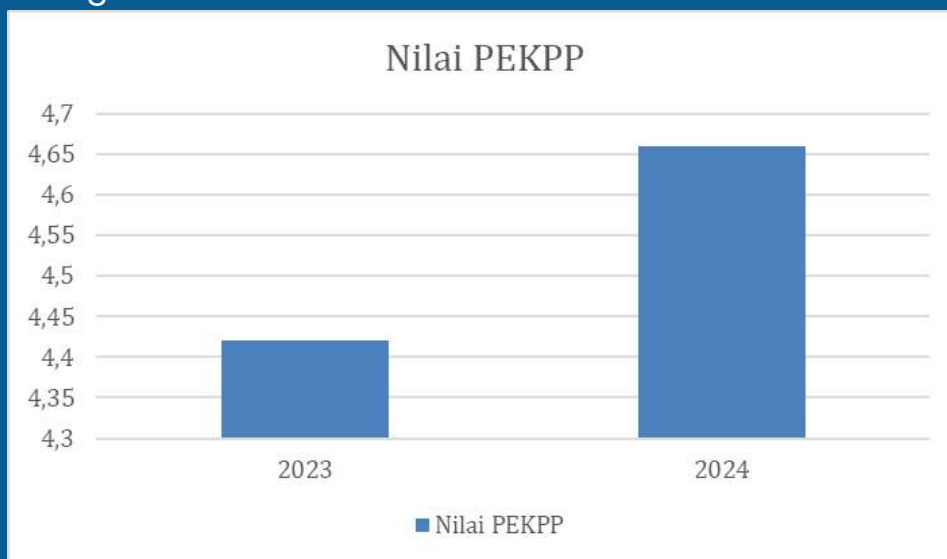
Sekretariat DPRD Kota Surakarta dari tahun 2023-2024 mengalami peningkatan hasil PEKPPP, dengan capaian sebagai berikut:

Tabel 4.6 **Rekap Nilai Kematangan Organisasi Sekretariat DPRD Kota Surakarta**

No	Tahun	Nilai PEKPPP	Kategori	Penjelasan
1.	2023	4.42	A-	Pelayanannya Sangat Baik
2.	2024	4.66	A	Pelayanan Prima

Sumber: Hasil Verifikasi PEKPPP Perangkat Daerah Pemerintah Kota Surakarta

Nilai PEKPP Sekretariat DPRD Kota Surakarta dari tahun ke tahun dapat dilihat pada diagram berikut :



Gambar 4.7 **Nilai PEKPP Sekretariat DPRD Kota Surakarta Tahun 2023–2024**

3. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)

Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) terhadap kinerja Sekretariat DPRD Kota Surakarta menjadi salah satu instrumen yang digunakan dalam upaya peningkatan pelayanan publik. Responden diambil dari berbagai macam pelayanan yang diberikan Sekretariat DPRD Kota Surakarta diantaranya Pelayanan Penerimaan Tamu Kunjungan Kerja, Pelayanan Audiensi, Fasilitas Magang/PKL dan Fasilitas Penelitian.

Sekretariat DPRD Kota Surakarta dari Tahun 2023–2024 memperoleh hasil SKM, dengan capaian sebagai berikut:

Tabel 4.7 **Rekap Nilai SKM Sekretariat DPRD Kota Surakarta**

No	Tahun	Waktu	Nilai SKM	Responden	Penjelasan
1.	2023	TW I	90.55	106 Orang	Sangat Baik
		TW II	93.61	100 Orang	Sangat Baik
		TW III	91.14	100 Orang	Sangat Baik
		TW IV	92.29	102 Orang	Sangat Baik

Sumber: Hasil SKM Sekretariat DPRD Kota Surakarta Lewat Website Sijalakkoar

Nilai SKM Sekretariat DPRD Kota Surakarta dari tahun ke tahun dapat dilihat pada diagram berikut :



Gambar 4.8 **Nilai SKM Sekretariat DPRD Kota Surakarta Tahun 2023–2024**

4. Standar Pelayanan (SP)

Mencermati Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan (SP) yang telah berjalan selama tahun anggaran 2023 dan 2024, Sekretariat DPRD Kota Surakarta berpandangan bahwa dari 4 (empat) SP yaitu

- Penerimaan Tamu Kunjungan Kerja,
- Pelayanan Audiensi,
- Fasilitasi Magang/PKL dan
- Fasilitasi Penelitian

Pelaksanaan SP Fasilitasi Magang Tahun 2023, dengan total peserta sebanyak 159 (seratus lima puluh sembilan) orang, dari prodi dan perguruan tinggi sebagai berikut:

Tabel 4.8 **Rekap Prodi Kampus Peserta Magang Tahun 2023 di Sekretariat DPRD Surakarta**

No	Prodi Kampus
1.	Fakultas Hukum UNS Surakarta
2.	Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Mas Said Surakarta
3.	Sekolah Vokasi UNS
4.	Fakultas Ekonomi Universitas Slamet Riyadi Surakarta

No	Prodi Kampus
5.	Fakultas Hukum Universitas Nahdatul Ulama Surakarta
6.	Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora UIN Sunan Kalijaga
7.	Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Surakarta
8.	Teknik Komputer dan Jaringan SMK Batik Surakarta
9.	Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Surakarta
10.	Fakultas Komunikasi dan Informatika Universitas Muhammadiyah Surakarta
11.	Fakultas Ulshuludin dan Dakwah UIN Raden Mas Said Surakarta
12.	Fakultas Komunikasi dan Informatika UMS
13.	Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang
14.	Departemen Ekonomika dan Bisnis Sekolah Vokasi UGM Yogyakarta
15.	Fakultas Komunikasi dan Informatika UMS
16.	SMK Negeri 07 Surakarta

Sumber: Hasil SKM Sekretariat DPRD Kota Surakarta Lewat Website Sijalakkoar

Pelaksanaan SP Fasilitasi Magang Tahun 2023, dengan total peserta sebanyak 47 (empat puluh tujuh) orang, dari prodi dan perguruan tinggi sebagai berikut:

Tabel 4.9 **Rekap Prodi Kampus Peserta Magang Tahun 2024 di Sekretariat DPRD Surakarta**

No	Program Studi
1.	Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta
2.	Akuntansi Universitas Muhammadiyah Surakarta
3.	Universitas Negeri Sebelas Maret Surakarta
4.	Hukum Universitas Negeri Sebelas Maret Surakarta
5.	Manajemen Universitas Dharma AUB Surakarta
6.	Hukum Ekonomi Syariah UIN Raden Mas Said
7.	Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta
8.	Akuntansi Universitas Muhammadiyah Surakarta
9.	Demografi dan Pencatatan Sipil Universitas Sebelas Maret
10.	Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana
11.	Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sebelas Maret Surakarta
12.	Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau
13.	Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Muhammadiyah Surakarta
14.	Sistem Informasi Universitas Duta Bangsa Surakarta

No	Prodi Kampus
15.	SMK Negeri 1 Surakarta
16.	SMK Negeri 5 Surakarta

5. Perencanaan dan Evaluasi

Perencanaan Kinerja Sekretariat DPRD Kota Surakarta disusun berdasarkan dokumen Rencana Strategis (Renstra) 2021-2026 yang dibuat secara sistematis dan berkelanjutan, serta merupakan penjabaran dari visi dan misi Kepala Daerah terpilih. Renstra ini bertujuan untuk mewujudkan visi dan misi daerah yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surakarta Tahun 2021-2026. Selanjutnya, Renstra tersebut dijabarkan ke dalam Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Kota Surakarta, yang merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode satu tahun, membuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan.

Perjanjian Kinerja adalah dokumen yang berisi penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program atau kegiatan, lengkap dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian ini, terbangun komitmen antara penerima amanah dan pemberi amanah atas kinerja terukur berdasarkan tugas, fungsi, wewenang, serta sumber daya yang tersedia.

Dengan mempertimbangkan capaian kinerja pada indikator kinerja dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2022-2026 Sekretariat DPRD, dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2024, Sekretariat DPRD telah berhasil melampaui target yang ditetapkan. Capaian kinerja Sekretariat DPRD Kota Surakarta tergolong sangat berhasil, dengan rata-rata capaian kinerjanya mencapai 107,0%.

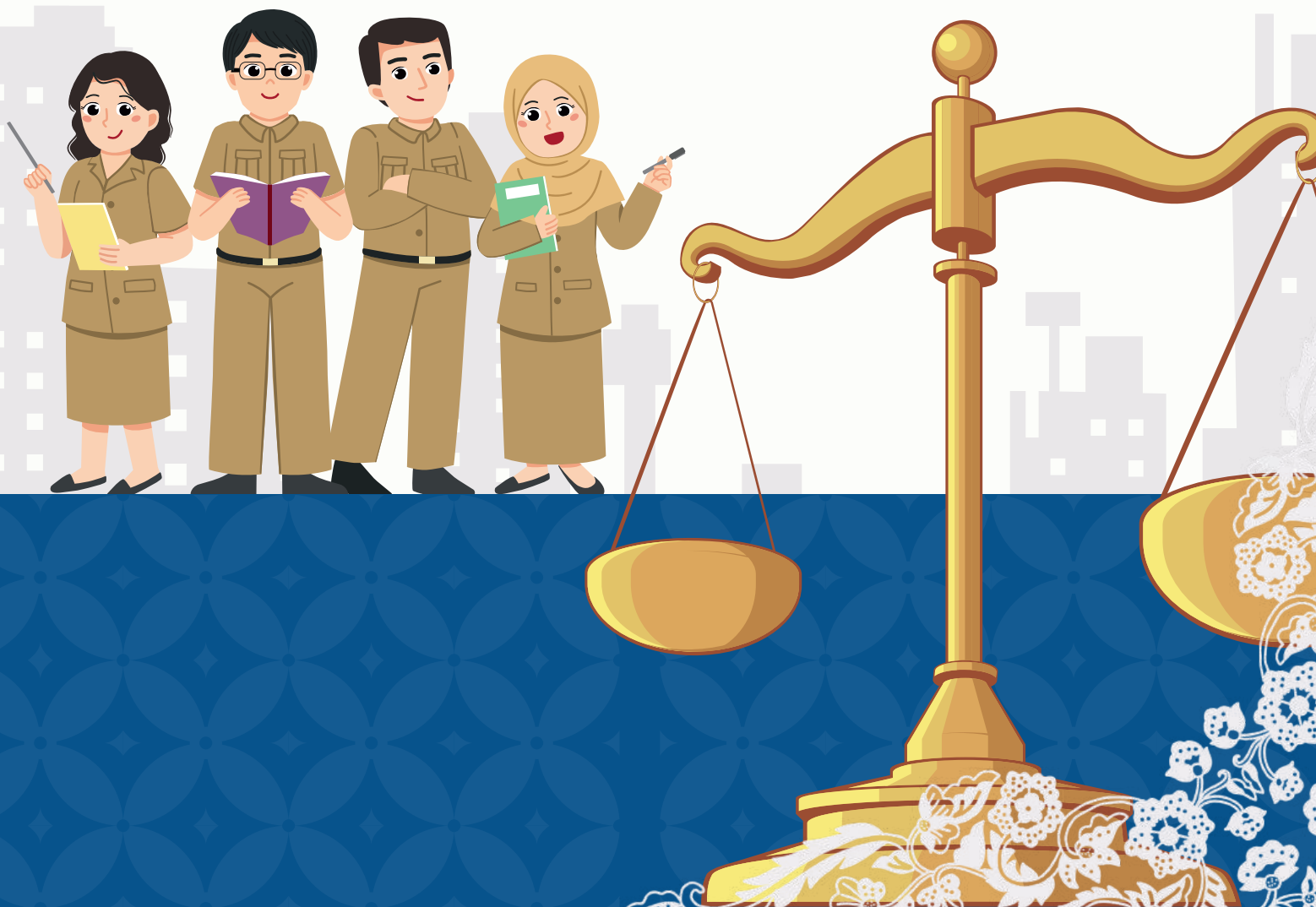


BAB V

PERSIDANGAN DAN

PERUNDANG-

UNDANGAN



A. Tugas dan Fungsi

Bagian Persidangan dan Perundang-undangan dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris DPRD. Bagian Persidangan dan Perundang-undangan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyelenggaraan persidangan, penyusunan risalah dan kajian peraturan perundang-undangan, serta pelaksana kegiatan hubungan masyarakat, publikasi dan protokoler sidang/rapat DPRD. Sesuai dengan Peraturan Walikota Nomor 14 Tahun 2023, Bagian Persidangan dan Perundang-undangan mempunyai fungsi, antara lain :

1. Pembentukan peraturan daerah dan peraturan DPRD;
2. Pelaksanaan fasilitasi tugas DPRD;
3. Melaksanakan konsultasi dan koordinasi baik vertikal maupun horizontal guna sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan tugas;
4. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Persidangan dan Perundang-undangan terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional yang melaksanakan tugas sesuai ketrampilan atau keahlian sebagai penunjang tugas dan fungsi di Bagian Persidangan dan Perundang-undangan.

B. Propemperda dan Realisasinya 2019–2024

Fungsi Pembentukan Peraturan DPRD

Rancangan Peraturan DPRD diajukan oleh Anggota, Komisi, Gabungan Komisi atau Bapemperda. Disusun dan dipersiapkan oleh Bapemperda dan dibahas oleh Panitia Khusus.

Peraturan DPRD terdiri atas:

1. Peraturan DPRD tentang Tata Tertib;
2. Peraturan DPRD tentang Kode Etik; dan/atau
3. Peraturan DPRD tentang Tata Acara Beracara Badan Kehormatan.

Fungsi Pembentukan Peraturan Daerah dilaksanakan dengan cara menyusun Propemperda bersama Walikota. Propemperda memuat daftar urutan yang ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan Perda. Selain itu terdapat kumulatif terbuka adalah rancangan peraturan daerah yang diajukan diluar progam pembentukan peraturan daerah yang telah ditetapkan, tetapi dalam kondisi tertentu yang mendesak atau diluar rencana. Rancangan Peraturan Daerah ini bersifat “terbuka” karena bisa diajukan kapan saja di luar jadwal yang telah ditetapkan.

Berikut Propemperda dan Realisasinya dari Tahun 2019 – 2024.

Tabel 5.1. **Rekap Propemperda Tahun 2019–2024**

URAIAN	TAHUN					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Rancangan Peraturan Perundangan	10	12	8	11	13	9
Rancangan Peraturan Perundangan selesai dibahas	7	6	7	8	11	6
Raperda dibahas melampaui tahun anggaran	1	-	1	3	2	3
Raperda ditunda	2	6	-	-	-	-

Raperda yang dibahas melampaui tahun anggaran merupakan raperda yang proses pembahasannya belum selesai di tahun tersebut dikarenakan hal seperti melewati masa jabatan DPRD. Raperda yang ditunda merupakan raperda yang pembahasan ditunda dikarenakan hal seperti perlu adanya koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait terkait materi muatan raperda atau adanya penangguhan kegiatan akibat pandemi Covid-19.

Tabel 5.2 **Propemperda Tahun 2019**

No	Propemperda	Nama Perda (Nomor Register/Tanggal)	Keterangan	Pengusul
1.	Penyertaan Modal Pemerintah Kota Surakarta Pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta Tahun 2019	Penyertaan Modal Pemerintah Kota Surakarta Pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta Tahun 2019 Nomor 2 Tahun 2019 Tanggal 25 April 2019	Selesai	Pemkot

No	Propemperda	Nama Perda (Nomor Register/Tanggal)	Keterangan	Pengusul
2.	Lansia	Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia <i>Nomor 4 Tahun 2019 Tanggal 10 Juli 2019</i>	Selesai	Inisiatif
3.	Penyelenggaraan Keolahragaan	Penyelenggaraan Keolahragaan <i>Nomor 6 tahun 2019 Tanggal 19 Agustus 2019</i>	Selesai	Inisiatif
4.	Penyelenggaraan Perpustakaan	Penyelenggaraan Perpustakaan <i>Nomor 7 Tahun 2019 Tanggal 19 Agustus 2019</i>	Selesai	Pemkot
5.	Pencegahan Dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran	Pencegahan Dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran. <i>Nomor 8 Tahun 2019 Tanggal 19 Agustus 2019</i>	Selesai	Eksekutif
6.	Kawasan Tanpa Rokok	Kawasan Tanpa Rokok. <i>Nomor 9 Tahun 2019 Tanggal 19 Agustus 2019</i>	Selesai	Pemkot

No	Propemperda	Nama Perda (Nomor Register/Tanggal)	Keterangan	Pengusul
7.	Penyertaan Modal Pemerintah Kota Surakarta Pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah	Penyertaan Modal Pemerintah Kota Surakarta Pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2019 Tanggal 17 Oktober 201	Selesai	Pemkot
8.	Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Layanan PJU	Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Layanan PJU Kota Surakarta <i>Nomor 4 Tahun 2020. Tanggal 31 Agustus 2020</i>	Pembahasa diselesaikan melewati masa jabatan DPRD	Pemkot
9.	Pengarustamaan Gender	-	Ditunda	Pemkot
10.	Perubahan Atas Peraturan Daerah No 1 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surakarta Tahun 2011-2031	-	Ditunda menunggu dari kementrian ATR RI	Pemkot

Tabel 5.3 **Kumulatif Terbuka Tahun 2019**

Kumulatif Terbuka		
1.	Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2018	Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2018 <i>Nomor 3 Tahun 2019. Tanggal 9 Juli 2019</i>
2.	Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019	Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 <i>Nomor 5 Tahun 2019. Tanggal 5 Agustus 2019</i>
3.	APBD Tahun Anggaran 2020	APBD Tahun Anggaran 2020 <i>Nomor 11 Tahun 2020. Tanggal 6 Desember 2019</i>

Tabel 5.4 **Propemperda Tahun 2020**

No	Propemperda	Nama Perda (Nomor Register/Tanggal)	Keterangan	Pengusul
1.	Pendirian Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Solo	Perusahaan Umum Bank Perkreditan Rakyat Bank Solo <i>Nomor 1 Tahun 2020 Tanggal 30 Juni 2020</i>	selesai	Pemkot

No	Propemperda	Nama Perda (Nomor Register/Tanggal)	Keterangan	Pengusul
2.	Penyertaan Modal Pemerintah Kota Surakarta Pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta Tahun 2020	Penyertaan Modal Pemerintah Kota Surakarta Pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta Untuk Pengembangan Air Minum Dalam Kemasan <i>Nomor 3 Tahun 2020 Tanggal 12 Agustus 2020</i>	selesai	Pemkot
3.	Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Layanan PJU	Kerjasama Pemerintah Badan Usaha Dalam Penyediaan Layanan Penerangan Jalan Umum Kota Surakarta. <i>Nomor 4 Tahun 2020. Tanggal 31 Agustus 2020</i>	Melanjutkan pembahasan Tahun 2019	Pemkot
4.	Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah	<i>Pengelolaan Keuangan Daerah.</i> <i>Nomor 7 Tahun 2020. Tanggal 23 Desember 2020</i>	Selesai	Pemkot

No	Propemperda	Nama Perda (Nomor Register/Tanggal)	Keterangan	Pengusul
5.	Pencabutan Peraturan Daerah	Pengurangan Penyertaan Modal Daerah Pada Perusahaan Umum Daerah Taman Satwa Taru Jurug Surakarta <i>Nomor 8 Tahun 2020 Tanggal 23 Desember 2020</i>	selesai	Pemkot
6.	Difabel	Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. <i>Nomor 9 Tahun 2020. Tanggal 23 Desember 2020</i>	selesai	Inisiatif
7.	Pengarusutama Gender	-	ditunda	Pemkot
8.	Penyelenggaraan Reklame	-	ditunda	Pemkot
9.	Retribusi Daerah	-	ditunda	Pemkot
10.	Penyelenggaraan Perhubungan	-	ditunda	Pemkot

No	Propemperda	Nama Perda (Nomor Register/Tanggal)	Keterangan	Pengusul
11.	Drainase	-	ditunda	Pemkot
12.	Keterlibatan Umum	-	ditunda	Pemkot

Tabel 5.5 **Kumulatif Terbuka Tahun 2020**

No	Kumulatif Terbuka	
1.	Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2019	Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2019 <i>Nomor 2 Tahun 2020. Tanggal 6 Juli 2020</i>
2.	Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020	Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 <i>Nomor 5 Tahun 2020. Tanggal 2 September 2020</i>
3.	APBD Tahun Anggaran 2021	APBD Tahun Anggaran 2021 <i>Nomor 6 Tahun 2020. Tanggal 3 Desember 2020</i>

Tabel 5.6 **Propemperda Tahun 2021**

No	Propemperda	Nama Perda (Nomor Register/Tanggal)	Keterangan	Pengusul
1.	Penyertaan Modal Pemerintah Kota Surakarta Pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta Tahun 2021	Penyertaan Modal Pemerintah Kota Surakarta Pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta Dalam Rangka Pengembangan Pelayanan Program Air Limbah <i>Nomor 1 Tahun 2021 Tanggal 6 Mei 2021</i>	selesai	Pemkot
2.	Penyertaan Modal Pemerintah Kota Surakarta Pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah	Penyertaan Modal Pemerintah Kota Surakarta Pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Tahun 2021 <i>Nomor 2 Tahun 2021 Tanggal 10 Juni 2021</i>	selesai	Pemkot

No	Propemperda	Nama Perda (Nomor Register/Tanggal)	Keterangan	Pengusul
3.	Pencabutan Peraturan Daerah	<p>Pencabutan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 6 Tahun 1971 Tentang Balai Peristirahatan Maliawan Di Tawangmangu Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta</p> <p><i>Nomor 12 Tahun 1981 Nomor 3 Tahun 2021 Tanggal 05 Juli 2021</i></p>	selesai	Pemkot
4.	Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surakarta Tahun 2011-2031	<p>Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surakarta Tahun 2021-2041</p> <p><i>Nomor 4 Tahun 2021 Tanggal 09 Juli 2021</i></p>	selesai	Pemkot
5.	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026	<p>Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026</p> <p><i>Nomor 6 Tahun 2021. Tanggal 26 Agustus 2021</i></p>	selesai	Pemkot

No	Propemperda	Nama Perda (Nomor Register/Tanggal)	Keterangan	Pengusul
6.	Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surakarta	Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah <i>Nomor 8 Tahun 2021. Tanggal 27 September 2021</i>	selesai	Pemkot
7.	Pengelolaan Air Limbah Domestik	Pengelolaan Air Limbah Domestik <i>Nomor 1 Tahun 2022. Tanggal 24 Februari 2022</i>	selesai	Pemkot
8.	Tata Tertib DPRD	Tata Tertib DPRD Nomor 1 Tahun 2021	selesai	Inisiatif

Tabel 5.7 **Kumulatif Terbuka Tahun 2021**

Kumulatif Terbuka		
1.	Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020	Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020 <i>Nomor 5 Tahun 2021. Tanggal 2 Agustus 2021</i>
2.	Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021	Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 <i>Nomor 7 Tahun 2021. Tanggal 7 September 2021</i>
3.	APBD Tahun Anggaran 2022	APBD Tahun Anggaran 2022 <i>Nomor 9 Tahun 2021. Tanggal 30 November 2021</i>
4.	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	-

Tabel 5.8 **Propemperda Tahun 2022**

No	Propemperda	Nama Perda (Nomor Register/Tanggal)	Keterangan	Pengusul
1.	Pengarusutamaan Gender	Pengarusutamaan Gender <i>Nomor 2 Tahun 2022. Tanggal 9 Mei 2022</i>	selesai	Pemkot
2.	Pengelolaan Sampah	Pengelolaan Sampah <i>Nomor 4 Tahun 2022. Tanggal 22 September 2022</i>	selesai	Pemkot
3.	Penanaman Modal	Penanaman modal <i>Nomor 6 Tahun 2022. Tanggal 12 Oktober 2022</i>	selesai	Pemkot
4.	Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren	Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren <i>Nomor 8 Tahun 2022. Tanggal 30 November 2022</i>	selesai	inisiatif

No	Propemperda	Nama Perda (Nomor Register/Tanggal)	Keterangan	Pengusul
5.	Pengelolaan Sistem Drainase	Pengelolaan Sistem Drainase <i>Nomor 9 Tahun 2022. Tanggal 30 November 2022</i>	Selesai	Inisiatif
6.	Penyelenggaraan Perhubungan	Penyelenggaraan Perhubungan <i>Nomor 10 Tahun 2022. Tanggal 23 Desember 2022</i>	Selesai	Pemkot
7.	Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta	<i>Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta</i> <i>Nomor 11 Tahun 2022. Tanggal 23 Desember 2022</i>	Selesai	Pemkot
8.	Perusahaan Umum Daerah Pergudangan dan Aneka Usaha Pedaringan Kota Surakarta	Perusahaan Umum Daerah Pergudangan Dan Aneka Usaha Pedaringan <i>Nomor 12 Tahun 2022. Tanggal 23 Desember 2022</i>	Selesai	Pemkot



No	Propemperda	Nama Perda (Nomor Register/Tanggal)	Keterangan	Pengusul
9.	Ketenagakerjaan	Ketenagakerjaan <i>Nomor 1 Tahun 2023. Tanggal 7 Februari 2023</i>	Selesai	Inisiatif
10.	Pengelolaan Jasa Tenaga Kerja Daerah dengan Perjanjian Kerja	<i>Pengelolaan Jasa Tenaga Kerja Daerah dengan Perjanjian Kerja</i> <i>Nomor 2 Tahun 2023. Tanggal 7 Februari 2023</i>	Selesai	Inisiatif
11.	Penyelenggaraa n Reklame	Penyelenggaraan Reklame <i>Nomor 3 Tahun 2023 . Tanggal 13 Februari 2023</i>	Selesai	Pemkot

Tabel 5.9 **Kumulatif Terbuka Tahun 2022**

Kumulatif Terbuka		
1.	Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021	Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021 <i>Nomor 3 Tahun 2022. Tanggal 11 Agustus 2022</i>
2.	Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022	Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 <i>Nomor 5 Tahun 2022. Tanggal 26 September 2022</i>
3.	APBD Tahun Anggaran 2023	APBD Tahun Anggaran 2023 <i>Nomor 7 Tahun 2022. Tanggal 30 November 2022</i>

Tabel 5.10 **Propemperda Tahun 2023**

No	Propemperda	Nama Perda (Nomor Register/Tanggal)	Keterangan	Pengusul
1.	Penyertaan Modal Kepada PT. BPD Bank Jateng Tahun 2022	Penyertaan Modal Pemerintah Kota Surakarta Pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah <i>Nomor 4 Tahun 2023 Tanggal 18 April 2023</i>	selesai	Pemkot

No	Propemperda	Nama Perda (Nomor Register/Tanggal)	Keterangan	Pengusul
2.	Internalisasi Nilai-Nilai Pancasila	Internalisasi Nilai Pancasila <i>Nomor 5 Tahun 2023 Tanggal 18 April 2023</i>	selesai	Pemkot
3.	Perubahan Atas Peraturan daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah	Perubahan Atas Peraturan daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah <i>Nomor 6 Tahun 2023. Tanggal 12 Juni 2023</i>	selesai	Pemkot
4.	Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP)	Perumahan dan Kawasan Permukiman <i>Nomor 7 Tahun 2023 Tanggal 12 Juni 2023</i>	selesai	Pemkot

No	Propemperda	Nama Perda (Nomor Register/Tanggal)	Keterangan	Pengusul
5.	Penyelenggaraa n Perizinan	Penyelenggaraan Perizinan Berusaha <i>Nomor 9 Tahun 2023 Tanggal 29 September 2023</i>	selesai	Pemkot
6.	Perlindungan Anak	Perlindungan Anak <i>Nomor 10 Tahun 2023. Tanggal 1 September 2023</i>	selesai	Inisiatif
7.	Penyertaan Modal Pemerintah Kota Surakarta Pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta	Pernyataan Modal Pemerintah Kota Surakarta Pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta <i>Nomor 12 Tahun 2023. Tanggal 1 November 2023</i>	selesai	Pemkot

No	Propemperda	Nama Perda (Nomor Register/Tanggal)	Keterangan	Pengusul
8.	Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	<i>Pajak Daerah dan Restribusi Daerah</i> <i>Nomor 14 Tahun 2023. Tanggal 28 Desember 2023</i>	selesai	Pemkot
9.	Pemberian Fasilitas Insentif Kemudahan dibidang Penanaman Modal	<i>Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal</i> <i>Nomor 15 Tahun 2023 . Tanggal 29 September 2023</i>	selesai	Pemkot
10.	Kota Layak Anak	Penyelenggaraan Kota Layak Anak <i>Nomor 16 Tahun 2023. Tanggal 29 September 2023</i>	selesai	Inisiatif

No	Propemperda	Nama Perda (Nomor Register/Tanggal)	Keterangan	Pengusul
11..	Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika	<i>Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika</i> <i>Nomor 17 Tahun 2023. Tanggal 29 Desember 2023</i>	selesai	Inisiatif
12.	Rencana Pelindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup	<i>Rencana Pengelolaan Dan Perlindungan Lingkungan Hidup Tahun 2024-2054</i> <i>Nomor 1 Tahun 2024. Tanggal 1 April 2024</i>	selesai	Pemkot
13.	Bangunan Gedung	<i>Penyelenggaraan Bangunan Gedung</i> <i>Nomor 4 Tahun 2024. Tanggal 19 Juni 2024</i>	selesai	Pemkot

Tabel 5.11 **Kumulatif Terbuka Tahun 2023**

Kumulatif Terbuka		
1.	Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022	Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 <i>Nomor 8 Tahun 2023. Tanggal 8 Agustus 2023</i>
2.	Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023	Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 <i>Nomor 11 Tahun 2023. Tanggal 29 September 2023</i>
3.	APBD Tahun Anggaran 2024	APBD Tahun Anggaran 2024 <i>Nomor 13 Tahun 2023. Tanggal 5 November 2023</i>

Tabel 5.12 **Propemperda Tahun 2024**

No	Propemperda	Nama Perda (Nomor Register/Tanggal)	Keterangan	Pengusul
1.	Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Rakyat	Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Rakyat <i>Nomor 2 Tahun 2024. Tanggal 9 Juni 2024</i>	selesai	Pemkot

No	Propemperda	Nama Perda (Nomor Register/Tanggal)	Keterangan	Pengusul
2.	Inovasi Daerah	Inovasi Daerah <i>Nomor 3 Tahun 2024. Tanggal 19 Juni 2024</i>	selesai	Inisiatif
3.	Rencana Pembangunan Industri Kota Surakarta Tahun 2023 - 2043	Rencana Pembangunan Industri Kota Surakarta Tahun 2023 - 2044 <i>Nomor 6 Tahun 2024. Tanggal 22 Agustus 2024</i>	selesai	Pemkot
4.	Pelindungan Perempuan	Pelindungan Perempuan <i>Nomor 7 Tahun 2024. Tanggal 22 Agustus 2024</i>	selesai	Inisiatif
5.	Tata Cara Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Tata Cara Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah <i>Nomor 8 Tahun 2024. Tanggal 22 Agustus 2024</i>	selesai	Inisiatif

No	Propemperda	Nama Perda (Nomor Register/Tanggal)	Keterangan	Pengusul
6.	Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Surakarta Tahun 2025- 2045	Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Surakarta Tahun 2025-2045 <i>Nomor 10 Tahun 2024. Tanggal 6 September 2024</i>	selesai	Pemkot
7.	Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Solo Menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Solo	Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Solo Menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Solo <i>Nomor 1 Tahun 2025 Tanggal 20 Januari 2025</i>	selesai	Pemkot
8.	Penyertaan Modal Kepada Perusahaan Umum Daerah Pergudangan dan Aneka Usaha Pedaringan	Proses paripurna	Lanjut 2025	Pemkot

No	Propemperda	Nama Perda (Nomor Register/Tanggal)	Keterangan	Pengusul
9.	Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Masih proses fasilitasi	Lanjut 2025	Pemkot

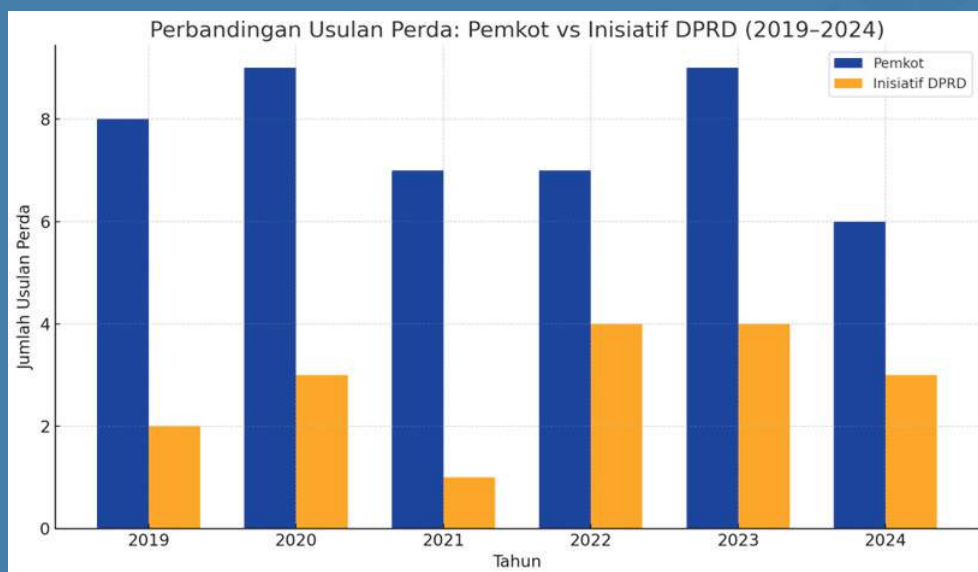
Tabel 5.13 **Kumulatif Terbuka Tahun 2024**

Kumulatif Terbuka		
1.	Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023	Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023 <i>Nomor 5 Tahun 2024. Tanggal 2 Agustus 2024</i>
2.	Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024	Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 <i>Nomor 9 Tahun 2024. Tanggal 6 September 2024</i>
3.	APBD Tahun Anggaran 2025	APBD Tahun Anggaran 2025 <i>Nomor 11 Tahun 2024. Tanggal 27 November 2024</i>



Gambar 5.1 Distribusi Perda Berdasarkan Kategori 2019-2024

Analisis distribusi Perda Kota Surakarta menunjukkan bahwa sektor Keuangan & Pajak memiliki jumlah perda terbanyak, mencerminkan fokus pada pengelolaan anggaran dan pendapatan daerah. Di sisi lain, Perda terkait Lingkungan Hidup masih lebih sedikit, meskipun tetap menjadi bagian dari kebijakan daerah. Secara keseluruhan, regulasi tersebar di berbagai sektor, mencerminkan upaya DPRD dalam menyusun kebijakan yang seimbang dan sesuai kebutuhan masyarakat.



Gambar 5.2 Jumlah Perda Berdasarkan Pengusul 2019-2024

Selama periode 2019 hingga 2024, usulan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) didominasi oleh eksekutif (Pemkot), dengan jumlah usulan yang konsisten setiap tahunnya. Meski demikian, DPRD turut berperan aktif melalui inisiatifnya dalam pengajuan Raperda, dengan kontribusi yang stabil dan terus hadir sepanjang periode tersebut. Hal ini mencerminkan komitmen DPRD dalam menjalankan fungsi legislasi secara berkelanjutan dan responsif terhadap kebutuhan daerah.

Pada periode tahun 2019 hingga 2024, DPRD melewati dua periode keanggotaan DPRD yaitu anggota DPRD periode 2019–2024 dan anggota DPRD periode 2024–2029. Anggota DPRD periode 2019–2024 diangkat berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/55 Tahun 2019 tentang Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta.

Anggota DPRD periode 2024–2029 diangkat berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/106 Tahun 2024 tentang Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta.

1. Susunan Fraksi

Fraksi DPRD dibentuk paling lama 1 (satu) bulan setelah pelantikan Anggota. Setiap Anggota harus menjadi anggota salah satu Fraksi. Adapun Susunan Fraksi DPRD Kota Surakarta sbb:

Tabel 5.14 **Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan**

FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN					
Susunan Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Periode 2019–2024			Susunan Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Periode 2024–2029		
Ketua	:	YF Sukasno, SH.	Ketua	:	YF Sukasno, SH.
Wakil Ketua	:	Roro Indradi Sarwo Indah, SH	Wakil Ketua	:	Roro Indradi Sarwo Indah, SH
Sekretaris	:	Putut Gunawan	Sekretaris	:	Suharsono, SH, MH
Anggota	:	Drs. Teguh Prakoso	Anggota	:	Budi Prasetyo, S.SOS, M.A.P
		Drs. Paulus Hartoyo			Wahyu Haryanto, SE., Ak., Ca
		Silvester Rony Kamtoro			Suwanto
		Ekya Sih Hananto, SH., MH			Misgiman Bambang Cahyono

FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN

Susunan Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Periode 2019-2024			Susunan Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Periode 2024-2029		
		Suyatno			Baruna Wasuta Aji
		Ginda Ferachtriawan, SE., M.Si			Kevin Fabiano, S.Pd,M.Or
		Indriani,SE.			Honda Hendarto
		Janjang Sumaryono Aji, SP			Silvester Rony Kamtoro
		Budi Prassety, S.Sos			Joni Sofyan Erwandi, S.H
		Jago Agung Ruwanto			Giyanto, A.Md
		Siti Muslikah, S.Sos			Ngadiyo
		Wahyu Haryanto, SE., Ak., CA.			Sagita Puspita Wiranata, S.Pd
		Suharsono, SH., MH.			Rheo Yuliana Fernandes, S.E, M.M
		Titik Nurhayati, SH.			Siti Muslikah, S.Sos, M.A.P
		Slamet Widodo, S.H.			Jajang Sumaryono Aji,SP

FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN

Susunan Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Periode 2019-2024			Susunan Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Periode 2024-2029		
		Roy Saputra			Ekya Sih Hananto, S.H, M.H
		Hartanti, SE			Terty Maharani Gunawati, S.Th
		Suwanto			
		Tri Hono Setyo Putro,A.Md			
		Anna Budiarti, S.PAK			
		Wawanto, SH			
		Dinar Rena Indrasari, A.Md.			
		Honda Hendarto			
		Elizabeth Pudjiningati			
		Dyah Retno Pratiwi, S.Sos.MI.Kom.			
		Yulianto Indratmoko			
		Lim Purwanto, SH.			

Tabel 5.15 **Fraksi Partai Keadilan Sejahtera**

FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA					
Susunan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Periode 2019–2024			Susunan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Periode 2024–2029		
Ketua	:	H.Asih Sunjoto Putro, S.Si.	Ketua	:	H.Sugeng Riyanto, S.S
Wakil Ketua	:	Muhadi Syahroni, ST	Wakil Ketua	:	Agus Widodo, S.T., M.M
Sekretaris	:	Didik Hermawan, S.Pd	Sekretaris	:	Muhamad Nafi' Asrosri, S.T
Anggota	:	Abdul Ghofar Ismail, S.Si.	Anggota	:	Dr. Sakidi, S.E., Ak., M.Si
		Sugeng Riyanto, SS.			Daryono, S.T
					Widyastuti, S.Sos Salim

Susunan Fraksi pada Periode 2019-2024 dan Periode 2024-2029 terdapat perbedaan dimana pada Periode 2019-2024 terdapat gabungan dari Partai Golongan Karya (GOLKAR) dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menjadi Fraksi Golkar-PSI, sedangkan pada Periode 2024-2029 Partai PSI Memiliki Fraksi sendiri.

Tabel 5.15 **Fraksi Partai Keadilan Sejahtera**

FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA			
Susunan Fraksi GOLKAR-PSI Periode 2019-2024			
Ketua	:	Drs. Taufiqurrahman	Partai Golongan Karya
Wakil Ketua	:	Antonius Yugo Prabowo	Partai Solidaritas Indonesia
Sekretaris	:	Agus Nuryanto,S.Pd.	Partai Golongan Karya
Anggota	:	Ir.Margono, MM.	Partai Golongan Karya

Tabel 5.16 **Fraksi Partai Solidaritas Indonesia**

FRAKSI PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA		
Susunan Fraksi PSI Periode 2024-2029		
Ketua	:	Tri Mardiyanto
Wakil Ketua	:	Sonny, S.T
Sekretaris	:	Herson Rikumau, S.Kep
Anggota	:	Muhammad Bilal, S.H
		Mukti Junianto

Susunan Fraksi pada Periode 2019-2024 dan Periode 2024-2029 terdapat perbedaan dimana pada Periode 2019-2024 terdapat gabungan dari Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) menjadi Fraksi PAN-GERINDRA, sedangkan pada Periode 2024-2029 Partai GERINDRA Memiliki Fraksi sendiri.

Tabel 5.17 **Fraksi Partai PAN-Gerindra**

FRAKSI PAN-GERINDRA			
Susunan Fraksi PAN-GERINDRA Periode 2019-2024			
Ketua	:	H. Muhammad Al Amin, SE.	Partai Amanat Nasional
Wakil Ketua	:	Agus Setiawan, SH.	Partai Amanat Nasional
Sekretaris	:	Ardianto Kuswinarno, SH.	Partai Gerindra
Anggota	:	Yudha Shindu Riyanto, SH.	Partai Gerindra
		Agung Harsakti Pancasila	Partai Gerindra
		Agus Setiawan, SH.	Partai Gerindra

Tabel 5.18 **Fraksi Partai Gerindra**

FRAKSI GERINDRA		
Susunan Fraksi PSI Periode 2024-2029		
Ketua	:	Yudha Sindu Riyanto, SH., M.H
Wakil Ketua	:	Kevin Candra Sadewa
Sekretaris	:	Agung Harsakti Pancasila
Anggota	:	Yanuar Sindhu Riyanto, S.T., M.T
		Ardianto Kuswinarno, S.H

Susunan Fraksi pada Periode 2019-2024 dan Periode 2024-2029 terdapat perbedaan dimana pada Periode 2024-2029 terdapat gabungan dari Partai Golongan Karya (GOLKAR), Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menjadi Fraksi Karya Amanat Bangsa.

Tabel 5.19 **Fraksi Partai Karya Amanat Bangsa**

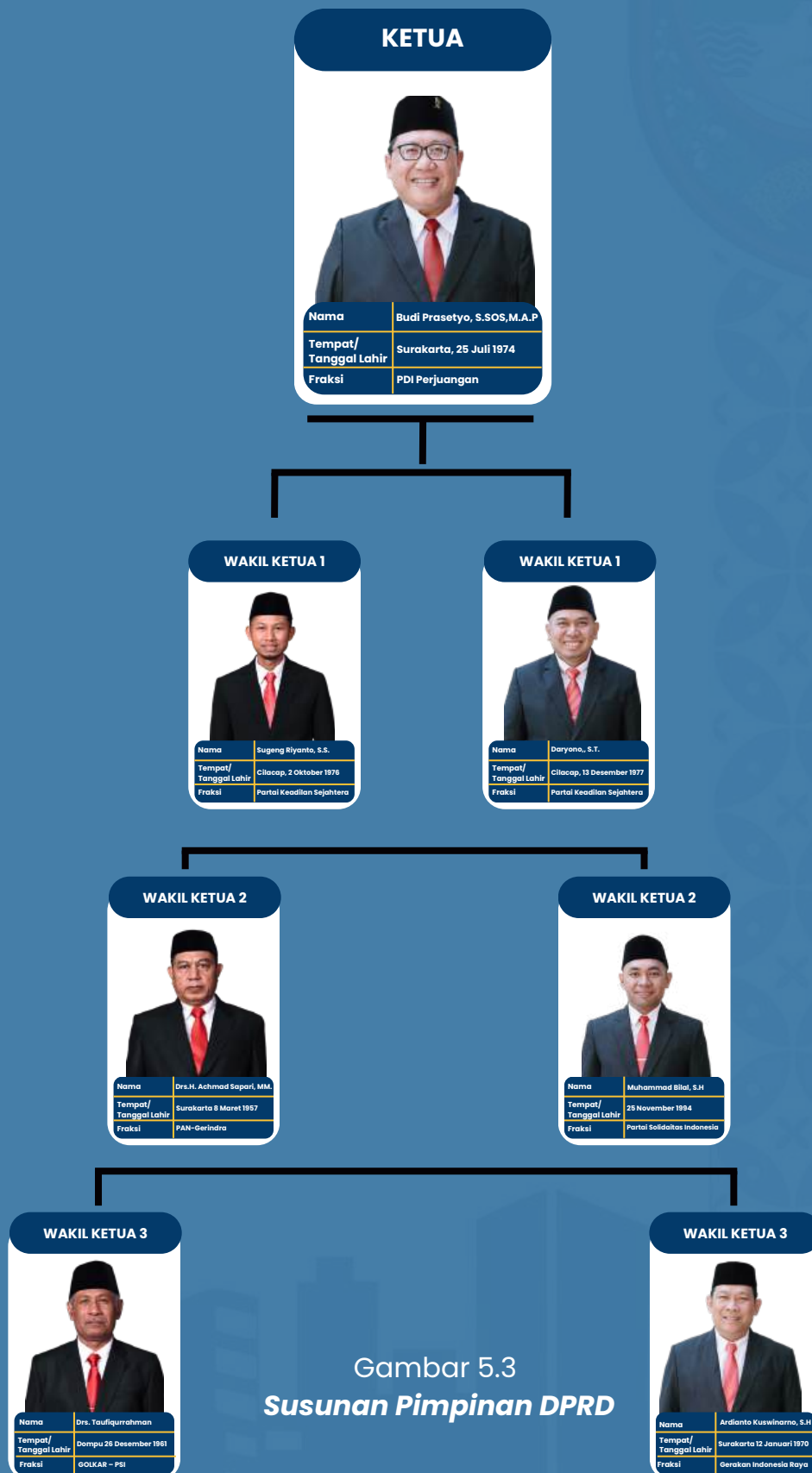
FRAKSI KARYA AMANAT BANGSA			
Susunan Fraksi Karya Amanat Bangsa Periode 2019-2024			
Ketua	:	Sekar Tandjung	Partai Golongan Karya
Wakil Ketua	:	Drs. Taufiqurrahman	Partai Golongan Karya
Sekretaris	:	Drs. Achmad Sapari, M.M	Partai Amanat Nasional
Anggota	:	H. Agus Setiawan, S.H	Partai Amanat Nasional
		Sugiyarsono	Partai Amanat Nasional
		Sri Martuti Handayani, S.E	Partai Kebangkitan Bangsa
		Mukarromah, S.Sos	Partai Kebangkitan Bangsa
		Daniel Rizky Waluyo	Partai Golongan Karya

2. Alat Kelengkapan

Susunan alat kelengkapan DPRD terdiri dari :

a. Pimpinan DPRD

Terdiri dari 1 (satu) Ketua dan 3 (tiga) Wakil Ketua DPRD sebagai berikut:



b. Badan Musyawarah

Anggota Badan Musyawarah paling banyak $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari jumlah anggota berdasarkan perimbangan jumlah anggota tiap-tiap Fraksi.

Tabel 5.20 **Susunan Badan Musyawarah DPRD Kota Surakarta Periode 2019-2024**

No	NAMA	JABATAN	UNSUR
1.	Budi Prasetyo, S.Sos., M.A.P.	Ketua	Fraksi PDI Perjuangan
2.	H.Sugeng Riyanto, S.S.	Wakil Ketua	Fraksi Partai Keadilan Sejahtera
3.	Drs. H.Achmad Sapari, M.M.	Wakil Ketua	Fraksi PAN-GERINDRA
4.	Drs. Taufiqurrahman	Wakil Ketua	Fraksi Partai GOLKAR-PSI
5.	Drs. Paulus Haryoto	Anggota	Fraksi PDI Perjuangan
6.	Wawanto,S.H.	Anggota	Fraksi PDI Perjuangan
7.	Elizabeth Pudjiningati	Anggota	Fraksi PDI Perjuangan
8.	Siti Muslikah, S.Sos,M.A.P.	Anggota	Fraksi PDI Perjuangan
9.	Dinar Retna Indrasari , A.Md.	Anggota	Fraksi PDI Perjuangan
10.	Suyatno	Anggota	Fraksi PDI Perjuangan

No	NAMA	JABATAN	UNSUR
11.	Dyah Retno Pratiwi, S.Sos., M.I.Kom.	Anggota	Fraksi PDI Perjuangan
12.	Indriani, S.E.	Anggota	Fraksi PDI Perjuangan
13.	Titik Nurhayati, S.H.	Anggota	Fraksi PDI Perjuangan
14.	Lim Purwanto , S.H.	Anggota	Fraksi PDI Perjuangan
15.	Ginda Ferachtriawan S.E., M.Si.	Anggota	Fraksi PDI Perjuangan
16.	Suwanto	Anggota	Fraksi PDI Perjuangan
17.	Jugo Agung Ruwanto	Anggota	Fraksi PDI Perjuangan
18.	H. Abdul Ghofar Ismail, S.Si.	Anggota	Fraksi Partai Keadilan Sejahtera
19.	H. Asih Sunjoto Putro, S.Si.	Anggota	Fraksi Partai Keadilan Sejahtera
20.	H. M. Al Amin, S.E.	Anggota	Fraksi Pan-Gerindra
21.	Agung Harsakti Pancasila	Anggota	Fraksi Pan-Gerindra
22.	Ir, H. Margono, M.M.	Anggota	Fraksi Partai Golkar-PSI
23.	Kinkin Sultanul Hakim, S.H., M.M.	Sekretaris bukan Anggota	Sekretaris DPRD

Tabel 5.21 **Susunan Badan Musyawarah DPRD Kota Surakarta Periode Periode 2024-2029**

No	NAMA	JABATAN	UNSUR
1.	Budi Prasetyo, S.Sos., M.A.P.	Ketua	Fraksi PDI Perjuangan
2.	Daryono, S.T	Wakil Ketua	Fraksi Partai Keadailan Sejahtera
3.	Muhammad Bilal, S.H	Wakil Ketua	Fraksi Partai Solidaritas Indonesia
4.	Ardianto Kuswinarno, S.H	Wakil Ketua	Fraksi Partai Gerindra
5.	Ngadiyo	Anggota	Fraksi PDI Perjuangan
6.	Terty Maharani Gunawati, S.Th	Anggota	Fraksi PDI Perjuangan
7.	Suwanto	Anggota	Fraksi PDI Perjuangan
8.	Giyatno, A.Md	Anggota	Fraksi PDI Perjuangan
9.	Misgiman Bambang Cahyono	Anggota	Fraksi PDI Perjuangan
10.	Sagita Puspita Wiranata, S.Pd	Anggota	Fraksi PDI Perjuangan
11.	Siti Muslikah, S.Sos., M.A.P	Anggota	Fraksi PDI Perjuangan

No	NAMA	JABATAN	UNSUR
12.	Baruna Wasita Aji	Anggota	Fraksi PDI Perjuangan
13.	Rony Kamtoro, S.H	Anggota	Fraksi PDI Perjuangan
14.	Agus Widodo, S.T., M.M	Anggota	Fraksi Partai Keadilan Sejahtera
15.	Salim	Anggota	Fraksi Partai Keadilan Sejahtera
16.	Sonny, S.T	Anggota	Fraksi Partai Solidaritas Indonesia
17.	Kevin Candra Sadewa	Anggota	Fraksi Partai Gerindra
18.	Daniel Rizky Waluyo	Anggota	Fraksi Karya Amanat Bangsa
19.	Sugiyarsono	Anggota	Fraksi Karya Amanat Bangsa
20.	Agus Setiawan, S.H	Anggota	Fraksi Karya Amanat Bangsa
21.	Mukarromah, S.Sos	Anggota	Fraksi Karya Amanat Bangsa

c. Komisi

Anggota Badan Musyawarah paling banyak $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari jumlah anggota berdasarkan perimbangan jumlah anggota tiap-tiap Fraksi.

KOMISI I (BIDANG PEMERINTAHAN)

Tabel 5.22 *Susunan Komisi I DPRD Kota Surakarta Periode 2019–2024*

No	NAMA	JABATAN	UNSUR
1.	Suharsono, S.H., M.H.	Ketua	Fraksi PDI Perjuangan
2.	Hartanti,S.E.	Wakil Ketua	Fraksi PDI Perjuangan
3.	Agus Nuryanto, S.Pd.	Sekretaris	Fraksi GOLKAR-PSI
4.	Lim Purwanto, S.H.	Anggota	Fraksi PDI Perjuangan
5.	Dinar Retna Indrasari, A.Md.	Anggota	Fraksi PDI Perjuangan
6.	Suwanto	Anggota	Fraksi PDI Perjuangan
7.	Drs.Paulus Hartoyo	Anggota	Fraksi PDI Perjuangan
8.	Wahyu Haryanto, S.E.	Anggota	Fraksi PDI Perjuangan
9.	Slamet Widodo, S.H.	Anggota	Fraksi PDI Perjuangan
10.	Didik Hermawan, S.Pd.	Anggota	Fraksi Partai Keadilan Sejahtera
11.	Yudha Sindhu Riyanto, S.H.	Anggota	Fraksi PAN-GERINDRA

Tabel 5.23 **Susunan Komisi I DPRD Kota Surakarta Periode 2024–2029**

No	NAMA	JABATAN	UNSUR
1.	Tri Mardiyanto	Ketua	Fraksi Partai Solidaritas Indonesia
2.	Suharsono, S.H.,M.H	Wakil Ketua	Fraksi PDI Perjuangan
3.	Yudha Sindu Riyanto, S.H.,M.H	Sekretaris	Fraksi Gerakan Indonesia Raya
4.	Wahyu Haryanto, S.E.,Ak.,CA	Anggota	Fraksi PDI Perjuangan
5.	Rheo Yuliana Fernandez,S.E., M.M	Anggota	Fraksi PDI Perjuangan
6.	Misgiman Bambang Cahyono	Anggota	Fraksi PDI Perjuangan
7.	Suwanto	Anggota	Fraksi PDI Perjuangan
8.	Muhammad Nafi' Asrori, S.T	Anggota	Fraksi Partai Keadilan Sejahtera
9.	Daniel Rizky Waluyo	Anggota	Fraksi Karya Amanat Bangsa
10.	Agus Setiawan, S.H	Anggota	Fraksi Karya Amanat Bangsa

KOMISI II (BIDANG KEUANGAN)

Tabel 5.24 *Susunan Komisi II DPRD Kota Surakarta Periode 2019–2024*

No	NAMA	JABATAN	UNSUR
1.	Honda Hendarto	Ketua	Fraksi PDI Perjuangan
2.	Roro Indradi Sarwo Indah, S.H.	Wakil Ketua	Fraksi PDI Perjuangan
3.	Silvester Rony Kamtoro	Sekretaris	Fraksi PDI Perjuangan
4.	Dyah Retno Pratiwi, S.Sos., M.I.Kom.	Anggota	Fraksi PDI Perjuangan
5.	Wawanto, S.H.	Anggota	Fraksi PDI Perjuangan
6.	Tri Hono Setyo Putro, A.Md.	Anggota	Fraksi PDI Perjuangan
7.	Jugo Agung Ruanto	Anggota	Fraksi PDI Perjuangan
8.	Abdul Ghofar Ismail,S.Si.	Anggota	Fraksi Partai Keadilan Sejahtera
9.	Agung Harsakti Pancasila	Anggota	Fraksi PAN–GERINDRA
10.	Ir.H.Margono, M.M.	Anggota	Fraksi Partai GOLKAR– PSIA

Tabel 5.25 **Susunan Komisi II DPRD Kota Surakarta Periode 2024–2029**

No	NAMA	JABATAN	UNSUR
1.	Agung Harsakti Pancasila	Ketua	Fraksi Gerakan Indonesia Raya
2.	Honda Hendarto	Wakil Ketua	Fraksi PDI Perjuangan
3.	Mukarromah, S.Sos.,M.I.Kom	Sekretaris	Fraksi Karya Amanat Bangsa
4.	Rony Kamtoro	Anggota	Fraksi PDI Perjuangan
5.	Baruna Wasita Aji	Anggota	Fraksi PDI Perjuangan
6.	Giyatno, A.Md	Anggota	Fraksi PDI Perjuangan
7.	Dr. Sakidi, S.E.,Ak.,M.Si	Anggota	Fraksi Partai Keadilan Sejahtera
8.	Agus widodo, S.T.,M.M	Anggota	Fraksi Partai Keadilan Sejahtera
9.	Herson Rikumau, S.Kep	Anggota	Fraksi Partai Solidaritas Indonesia
10.	Drs. Achmad Sapari, M.M	Anggota	Fraksi Karya Amanat Bangsa

KOMISI III (BIDANG PEMBANGUNAN)

Tabel 5.26 *Susunan Komisi III DPRD Kota Surakarta Periode 2019–2024*

No	NAMA	JABATAN	UNSUR
1.	Y.F. Sukasno, S.H.	Ketua	Fraksi PDI Perjuangan
2.	Ety Isoworo,S.H., M.H.	Wakil Ketua	Fraksi PDI Perjuangan
3.	Ardianto Kuswinarno, S.H.	Anggota	Fraksi PAN-GERINDRA
4.	Yulianto Indratmoko	Anggota	Fraksi PDI Perjuangan
5.	Siti Muslikah, S.Sos.,M.A.P.	Anggota	Fraksi PDI Perjuangan
6.	Suyatno	Anggota	Fraksi PDI Perjuangan
7.	Roy Saputra	Anggota	Fraksi PDI Perjuangan
8.	Indriani, S.E.	Anggota	Fraksi PDI Perjuangan
9.	Muhadi Syahroni, S.T.	Anggota	Fraksi Partai Keadilan Sejahtera
10.	H. M. Al Amin, S.E.	Anggota	Fraksi PAN-GERINDRA

Tabel 5.27 **Susunan Komisi III DPRD Kota Sukakarta Periode 2024–2029**

No	NAMA	JABATAN	UNSUR
1.	Drs. Taufiqurrahman	Ketua	Fraksi Partai Karya Amanat Bangsa
2.	Y.F. Sukasno, S.H., M.H	Wakil Ketua	Fraksi PDI Perjuangan
3.	Sonny, S.T	Sekretaris	Fraksi Partai Solidaritas Indonesia
4.	Joni Sofyan Erwandi, S.H	Anggota	Fraksi PDI Perjuangan
5.	Siti Muslikah, S.Sos.,M.A.P.	Anggota	Fraksi PDI Perjuangan
6.	Terty Maharani Gunawati, S.Th	Anggota	Fraksi PDI Perjuangan
7.	Kevin Fabiano, S.Pd., M.Or	Anggota	Fraksi PDI Perjuangan
8.	Salim	Anggota	Fraksi Partai Keadilan Sejahtera
9.	Kevin Candra Sadewa	Anggota	Fraksi Partai Gerindra
10.	Sugiyarsono	Anggota	Fraksi Karya Amanat Bangsa

KOMISI IV (BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT)Tabel 5.28 *Susunan Komisi IV DPRD Kota Surakarta Periode 2019–2024*

No	NAMA	JABATAN	UNSUR
1.	Janjang Sumaryono Aji, S.P.	Ketua	Fraksi PDI Perjuangan
2.	Ana Budiarti, S.PAK.	Wakil Ketua	Fraksi PDI Perjuangan
3.	H. Agus Setiawan, S.H.	Sekretaris	Fraksi PAN–GERINDRA
4.	Ekya Sih Hananto, SH., M.H.	Anggota	Fraksi PDI Perjuangan
5.	Elizabeth Pujiningati	Anggota	Fraksi PDI Perjuangan
6.	Titik Nurhayati, S.H.	Anggota	Fraksi PDI Perjuangan
7.	Ginda Ferachtriawan, S.E., M.Si.	Anggota	Fraksi PDI Perjuangan
8.	H. Asih Sunjoto PWuto, S.Si.	Anggota	Fraksi Partai Keadilan Sejahtera
9.	Antonius Yogo Prabowo	Anggota	Fraksi Partai GOLKAR–PSI

Tabel 5.29 **Susunan Komisi IV DPRD Kota Surakarta Periode 2024–2029**

No	NAMA	JABATAN	UNSUR
1.	Sugeng Riyanto, S.S	Ketua	Fraksi Partai Keadilan Sejahtera
2.	Jajang Sumaryono Aji, S.P	Wakil Ketua	Fraksi PDI Perjuangan
3.	Yanuar Sindhu Riyanto, S.T., M.T	Sekretaris	Fraksi Partai Solidaritas Indonesia
4.	Roro Indradi Sarwo Indah, S.H	Anggota	Fraksi PDI Perjuangan
5.	Sagita Puspita Wiranata, S.Pd	Anggota	Fraksi PDI Perjuangan
6.	Ekya Sih Hananta, S.H., M.H	Anggota	Fraksi PDI Perjuangan
7.	Ngadiyo	Anggota	Fraksi PDI Perjuangan
8.	Widyastuti, S.Sos	Anggota	Fraksi Partai Keadilan Sejahtera
9.	Mukti Junianto	Anggota	Fraksi Partai Solidaritas Indonesia
10.	Sekar Tandjung	Anggota	Fraksi Karya Amanat Bangsa
11.	Sri Martuti Handayani, S.E	Anggota	Fraksi Karya Amanat Bangsa

d. Badan Pembentukan Peraturan Daerah

Pimpinan Bapemperda terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 1 (satu) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Bapemperda.

Tabel 5.30 **Susunan Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kota Surakarta Periode 2019–2024**

No	NAMA	JABATAN	UNSUR
1.	Ekya Sih Hananto, S.H., M.H.	Ketua	Fraksi PDI Perjuangan
2.	Roy Saputra	Wakil Ketua	Fraksi PDI Perjuangan
3.	Roro Indradi Sarwo Indah, S.H.	Anggota	Fraksi PDI Perjuangan
4.	YF. Sukasno., S.H.	Anggota	Fraksi Partai GOLKAR-PSI
5.	Ety Isoworo, S.H., M.H.	Anggota	Fraksi PDI Perjuangan
6.	Suharsono, S.H., M.H.	Anggota	Fraksi PDI Perjuangan
7.	Janjang Sumaryono Aji, S.P.	Anggota	Fraksi PDI Perjuangan
8.	Hartanti, S.E.	Anggota	Fraksi PDI Perjuangan
9.	H. Abdul Ghofar Ismail, S.Si.	Anggota	Fraksi Partai Keadailan Sejahtera

No	NAMA	JABATAN	UNSUR
10.	Yudha Sindu Riyanto, S.H.	Anggota	FRAKSI PAN-GERINDRA
11.	Antonius Yogo Prabowo	Anggota	Fraksi Partai GOLKAR-PSI
12.	Kinkin Sultanul Hakim, S.H., M.M.	Anggota	Sekretaris DPRD

Tabel 5.31 **Susunan Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kota Surakarta Periode 2024-2029**

No	NAMA	JABATAN	UNSUR
1.	Muhammad Nafi' Asrori, S.T	Ketua	Fraksi Partai Keadilan Sejahtera
2.	Ekya Sih Hananto, S.H.,M.H	Wakil Ketua	Fraksi PDI Perjuangan
3.	Y.F Sukasno, S.H.,M.H	Anggota	Fraksi PDI Perjuangan
4.	Suharsono, S.H.,M.H	Anggota	Fraksi PDI Perjuangan
5.	Roro Indradi Sarwo Indah, S.H	Anggota	Fraksi PDI Perjuangan

No	NAMA	JABATAN	UNSUR
6.	Janjang Sumaryono Aji, S.P	Anggota	Fraksi PDI Perjuangan
7.	Widyastuti, S.Sos	Anggota	Fraksi Partai Keadilan Sejahtera
8.	Herson Rikumau, S.Kep	Anggota	Fraksi Partai Solidaritas Indonesia
9.	Yudha Sindu Riyanto, S.H.,M.H	Anggota	Fraksi Gerakan Indonesia Raya
10.	Drs. Taufiqurrahman	Anggota	Fraksi Karya Amanat Bangsa
11.	Agus Setiawan, S.H	Anggota	Fraksi Karya Amanat Bangsa

e. Badan Anggaran

Anggota Badan Anggaran diusulkan oleh masing-masing Fraksi dengan mempertimbangkan keanggotaannya dalam Komisi dan paling banyak $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari jumlah Anggota.

Tabel 5.32 **Susunan Badan Anggaran Periode DPRD Kota Surakarta 2019–2024**

No	NAMA	JABATAN	UNSUR
1.	Budi Prasetyo, S.Sos., M.A.P.	Ketua	Fraksi PDI Perjuangan
2.	H. Sugeng Riyanto, S.S.	Wakil Ketua	Fraksi Partai Keadailan Sejahtera

No	NAMA	JABATAN	UNSUR
3.	Drs. H. Achmad Sapari, M.M.	Wakil Ketua	Fraksi PAN-GERINDRA
4.	Drs.Taufiqurrahman	Wakil Ketua	Fraksi Partai GOLKAR-PSI
5.	Suharsono, S.H., M.H.	Anggota	Fraksi PDI Perjuangan
6.	Hartanti, S.E.	Anggota	Fraksi PDI Perjuangan
7.	YF.Sukasno, S.H.	Anggota	Fraksi PDI Perjuangan
8.	Roy Saputra	Anggota	Fraksi PDI Perjuangan
9.	Janjang Sumaryono Aji, S.P.	Anggota	Fraksi PDI Perjuangan
10.	Silvester Rony Kamtoro	Anggota	Fraksi PDI Perjuangan
11.	Honda Hendarto	Anggota	Fraksi PDI Perjuangan
12.	Ety Isoworo, S.H.,M.H.	Anggota	Fraksi PDI Perjuangan
13.	Anna Budiarti, S.PAK.	Anggota	Fraksi PDI Perjuangan
14.	Ekya Sih Hananto, S.H., M.H.	Anggota	Fraksi PDI Perjuangan

No	NAMA	JABATAN	UNSUR
15.	Roro Indradi Sarwo Indah, S.H.	Anggota	Fraksi PDI Perjuangan
16.	Wahyu Haryanto, S.E	Anggota	Fraksi PDI Perjuangan
17.	Yulianto Indratmoko	Anggota	Fraksi PDI Perjuangan
18.	Tri Hono Setyo Putro, A.Md.	Anggota	Fraksi PDI Perjuangan
19.	Didik Hermawan, S.Pd	Anggota	Fraksi Partai Keadailan Sejahtera
20.	Muhadi Syahroni, S.T.	Anggota	Fraksi Partai Keadailan Sejahtera
21.	Ardianto Kuswinarno, S.H.	Anggota	Fraksi PAN-GERINDRA
22.	H. Agus Setiawan, S.H.	Anggota	Fraksi PAN-GERINDRA
23.	Agus Nuryanto, S.Pd.	Anggota	Fraksi Partai GOLKAR-PSI
24.	Kinkin Sultanul Hakim, S.H., M.M.	Sekretaris bukan Anggota	Sekretaris DPRD

Tabel 5.33 Susunan Badan Anggaran DPRD Kota Surakarta Periode 2024-2029

No	NAMA	JABATAN	UNSUR
1.	Budi Prasetyo, S.Sos., M.A.P.	Ketua	Fraksi PDI Perjuangan
2.	Daryono, S.T	Wakil Ketua	Fraksi Partai Keadailan Sejahtera
3.	Muhammad Bilal, S.H	Wakil Ketua	Fraksi Partai Solidaritas Indonesia
4.	Ardianto Kuswinarno, S.H	Wakil Ketua	Fraksi Partai Gerindra
5.	Y.F. Sukasno, S.H.,M.H	Anggota	Fraksi PDI Perjuangan
6.	Roro Indradi Sarwo Indah, S.H	Anggota	Fraksi PDI Perjuangan
7.	Suharsono, S.H.,M.H	Anggota	Fraksi PDI Perjuangan
8.	Joni Sofyan Erwandi, S.H	Anggota	Fraksi PDI Perjuangan
9.	Janjang Sumaryono Aji, S.P	Anggota	Fraksi PDI Perjuangan
10.	Honda Hendarto	Anggota	Fraksi PDI Perjuangan
11.	Wahyu Haryanto, S.E.,Ak.,CA	Anggota	Fraksi PDI Perjuangan
12.	Ekya Sih Hananto, S.H.,M.H	Anggota	Fraksi PDI Perjuangan

No	NAMA	JABATAN	UNSUR
13.	Rheo Yuliana Fernandez, S.E.,M.M	Anggota	Fraksi PDI Perjuangan
14.	Sugeng Riyanto, S.S	Anggota	Fraksi Partai Keadailan Sejahtera
15.	Muhamad Nafi' Asrori, S.T	Anggota	Fraksi Partai Keadailan Sejahtera
16.	Tri Mardiyanto	Anggota	Fraksi Partai Solidaritas Indonesia
17.	Agung Harsakti Pancasila	Anggota	Fraksi Gerakan Indonesia raya
18.	Sekar Tandjung	Anggota	Fraksi Karya Amanat Bangsa
19.	Drs. Taufiqurrahman	Anggota	Fraksi Karya Amanat Bangsa
20.	Drs. Achmad Sapari, M.M	Anggota	Fraksi Karya Amanat Bangsa
21.	Sri Martuti Handayani, S.E	Anggota	Fraksi Karya Amanat Bangsa

f. Badan Kehormatan

Anggota Badan Kehormatan dipilih dari dan oleh Anggota berjumlah 5 (lima) orang Pimpinan Badan Kehormatan terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 1 (satu) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Badan Kehormatan.

Tabel 5.34 **Susunan Badan Kehormatan DPRD Kota Surakarta Periode 2019–2024**

No	NAMA	JABATAN	UNSUR
1.	Yulianto Indratmoko	Ketua	Fraksi PDI Perjuangan
2.	H.M. Al Amin, S.E	Wakil Ketua	Fraksi PAN–GERINDRA
3.	Slamet Widodo, S.H.	Anggota	Fraksi PDI Perjuangan
4.	H. Asih Sunjoto Putro, S.Si.	Anggota	Fraksi Keadilan Sejahtera
5.	Ir. H.Margono, MM.	Anggota	Fraksi Partai GOLKAR–PSI

Tabel 5.35 **Susunan Badan Kehormatan DPRD Kota Surakarta Periode 2024–2029**

No	NAMA	JABATAN	UNSUR
1.	Drs. Achmad Sapari, M.M	Ketua	Fraksi Karya Amanat Bangsa
2.	Joni Sofyan Erwandi, S.H	Wakil Ketua	Fraksi PDI Perjuangan
3.	Dr. Sakidi, S.E.,Ak.,M.Si	Anggota	Fraksi Partai Keadilan Sejahtera
4.	Mukti Junianto	Anggota	Fraksi Partai Solidaritas Indonesia
5.	Yanuar Sindhu Riyanto Riyanto, S.T.,M.T	Anggota	Fraksi Gerakan Indonesia Raya

3. Keterwakilan Gender DPRD Kota Surakarta

Keterwakilan gender di DPRD Kota Surakarta dari tahun 2022 hingga masa transisi 2024 menunjukkan komposisi yang relatif stabil. Jumlah total anggota dewan tetap sebanyak 45 orang setiap tahunnya, dengan proporsi anggota laki-laki mendominasi.

Keterwakilan perempuan tercatat sebanyak 11 orang pada tahun 2022 hingga 2024, dan sedikit mengalami penyesuaian menjadi 9 orang pada masa transisi 2024. Perubahan angka pada tahun 2024 terjadi karena adanya pelantikan anggota DPRD periode 2024–2029. PDI-P menjadi partai dengan jumlah anggota perempuan terbanyak sepanjang periode tersebut, sementara partai lain mulai menunjukkan kehadiran wakil perempuan di masa transisi, seperti PKS dan PKB.

Keterlibatan seluruh elemen gender dalam lembaga legislatif menjadi bagian penting dalam mewujudkan proses pembangunan daerah yang merata dan responsif terhadap berbagai kebutuhan masyarakat

Tabel 5.36 **Data keterwakilan gender DPRD Kota Surakarta**

NO	PARTAI POLITIK	JENIS KELAMIN	2022 JUMLAH	2023 JUMLAH	2024 JUMLAH	TRANSISI 2024 JUMLAH
1	PDI-P	Pria	19	19	19	15
		Wanita	11	11	11	5
2	PKS	Pria	5	5	5	6
		Wanita	0	0	0	1
3	PAN	Pria	3	3	3	3
		Wanita	0	0	0	0
4	Partai Gerindra	Pria	3	3	3	5
		Wanita	0	0	0	0
5	Partai Golkar	Pria	3	3	3	2
		Wanita	0	0	0	1
6	PSI	Pria	1	1	1	5
		Wanita	0	0	0	0
7	PKB	Pria	0	0	0	0
		Wanita	0	0	0	2
*	Sub Total	Pria	34	34	34	36
		Wanita	11	11	11	9
TOTAL			45	45	45	45

Visualisasi

*Data diambil per akhir tahun anggaran

DPRD

Wanita

24.4%

Pria

75.6%

DPRD

Wanita

24.4%

Pria

75.6%

DPRD

Wanita

24.4%

Pria

75.6%

DPRD

Wanita

20.0%

Pria

80.0%

Sumber: Bank Data Sekretariat DPRD Kota Surakarta, 2024

4. Kunjungan Tamu dan Audiensi

Kunjungan tamu dan audiensi di Sekretariat DPRD (Setwan) serta DPRD Kota Surakarta merupakan bagian dari upaya membangun komunikasi yang transparan dan konstruktif antara lembaga legislatif dengan masyarakat maupun pemangku kepentingan lainnya. Sebagai representasi rakyat, DPRD memiliki peran penting dalam menampung aspirasi, menjembatani kebutuhan masyarakat dengan kebijakan pemerintah daerah, serta memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil berpihak pada kepentingan bersama. Oleh karena itu, kunjungan tamu dan audiensi menjadi sarana strategis dalam memperkuat sinergi antara berbagai pihak.

Kegiatan ini dilandasi oleh prinsip keterbukaan dan partisipasi publik dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Masyarakat, baik secara individu maupun melalui organisasi, berhak menyampaikan pendapat, usulan, atau keluhan yang berkaitan dengan kebijakan daerah. Melalui audiensi, DPRD dapat mendengar langsung permasalahan yang dihadapi oleh warga, sehingga proses legislasi maupun pengawasan terhadap kebijakan pemerintah dapat dilakukan secara lebih tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Selain itu, kunjungan tamu dari berbagai instansi, baik dari dalam maupun luar daerah, menjadi ajang pertukaran informasi dan pengalaman dalam pengelolaan pemerintahan daerah. Dengan adanya kunjungan tersebut, DPRD dan Setwan Kota Surakarta dapat mempelajari praktik terbaik dari daerah lain, sekaligus memperkenalkan kebijakan dan program unggulan yang telah diterapkan di Kota Surakarta. Pertemuan semacam ini juga menjadi wadah untuk menjalin kerja sama yang lebih luas dalam berbagai sektor pembangunan.

Dari sisi internal pemerintahan, audiensi juga menjadi bagian dari mekanisme kontrol dan evaluasi terhadap kebijakan yang telah diberlakukan. Dengan mendapatkan masukan langsung dari masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya, DPRD dapat menilai efektivitas program yang dijalankan serta mengidentifikasi aspek-aspek yang perlu diperbaiki. Hal ini penting dalam menciptakan pemerintahan yang lebih responsif, inovatif, dan akuntabel dalam melayani masyarakat.

Seiring dengan perkembangan zaman dan meningkatnya tuntutan keterbukaan informasi publik, kunjungan tamu dan audiensi semakin memiliki peran sentral dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang partisipatif. Keberadaan forum-forum dialog ini memastikan bahwa masyarakat tidak hanya menjadi objek dari kebijakan yang dibuat, tetapi juga terlibat secara aktif dalam proses perumusannya. Dengan demikian, setiap keputusan yang diambil tidak hanya berbasis pada regulasi formal, tetapi juga mempertimbangkan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya yang berkembang di tengah masyarakat.



Gambar 5.4 **Jumlah Tamu per tahun 2022-2024**

Gambar 5.10 menunjukkan diagram jumlah tamu per bulan selama tiga tahun terakhir, yaitu 2022, 2023, dan 2024. Secara umum, terlihat adanya fluktuasi jumlah tamu setiap bulan dengan pola yang bervariasi disetiap tahun nya.

Pada tahun 2022 (diagram batang warna biru), jumlah tamu cenderung stabil sepanjang tahun, dengan peningkatan signifikan pada bulan Desember yang mencapai puncak tertinggi. Tahun 2023 (diagram batang warna orange) menunjukkan lonjakan jumlah tamu yang sangat mencolok pada bulan Mei, menjadi yang tertinggi dibandingkan bulan lain maupun tahun lainnya. Sementara itu, tahun 2024 (diagram batang warna abu-abu) mencatat jumlah tamu yang lebih rendah di awal tahun, namun mengalami peningkatan mulai bulan Juli dan cukup stabil hingga akhir tahun.

Pola kedatangan tamu di bulan Mei dan Desember tampaknya menjadi momen puncak kunjungan, kunjungan kerja anggota DPRD yang sering dilakukan pada bulan-bulan ini mungkin bisa disebabkan oleh beberapa alasan strategis dan administratif berikut:

1. Awal Triwulan Kedua (Q2)

Mei berada di awal triwulan kedua, yaitu masa yang krusial dalam pelaksanaan dan evaluasi program kerja pemerintah daerah. DPRD biasanya melakukan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan triwulan pertama, sekaligus menyusun masukan untuk program triwulan selanjutnya.

2. Persiapan Pembahasan Laporan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah

Mei adalah waktu umum bagi DPRD membahas dan mengevaluasi LKPJ tahun anggaran sebelumnya. Kunjungan kerja dilakukan untuk mengumpulkan data dan informasi langsung dari lapangan sebagai bahan evaluasi.

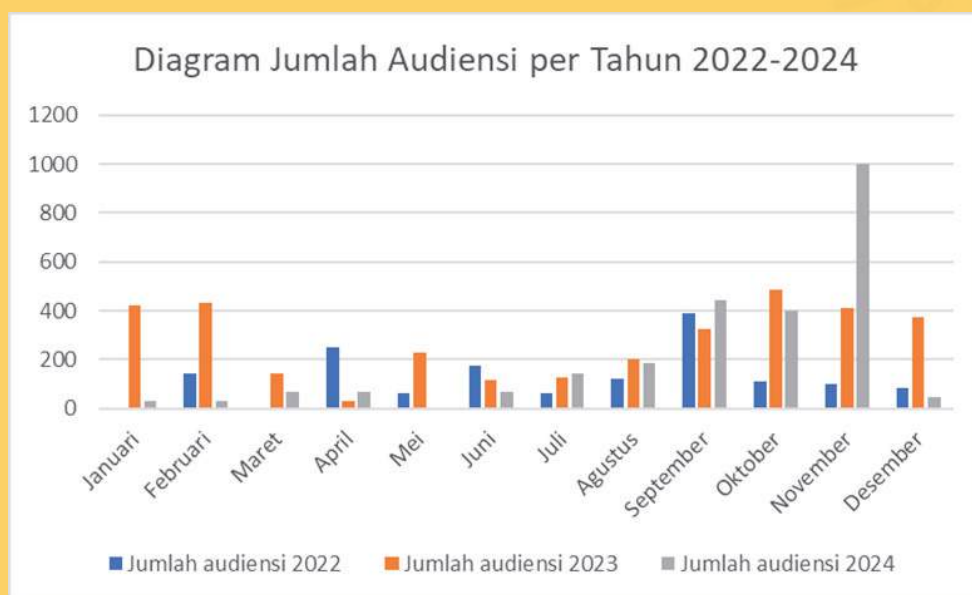
3. Reses dan Penyerapan Aspirasi

Beberapa DPRD menjadwalkan masa reses atau penjangkaran aspirasi masyarakat sekitar bulan Mei. Kunjungan kerja dilakukan untuk menyerap kebutuhan masyarakat yang nantinya dimasukkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

4. Cuaca dan Kondisi Lapangan

Mei umumnya sudah memasuki musim kemarau ringan di banyak wilayah Indonesia, sehingga kondisi cuaca relatif stabil untuk melakukan perjalanan dan kunjungan ke daerah-daerah.

Hal ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk merencanakan strategi pelayanan di masa mendatang berdasarkan tingkat kunjungan tamu tahunan.



Gambar 5.5 **Jumlah Audiensi per tahun 2022-2024**

Gambar 5.11 Jumlah Audiensi di per Tahun 2022–2024: menunjukkan jumlah audiensi di DPRD Kota Surakarta dalam rentang waktu tahun 2022 hingga 2024. Secara umum, terlihat adanya fluktuasi jumlah audiensi dari bulan ke bulan, dengan peningkatan yang berbeda-beda tiap tahunnya.

Pada tahun 2022 (diagram batang warna biru), jumlah audiensi cenderung rendah dan tersebar tidak merata, dengan peningkatan signifikan pada bulan April dan Oktober. Tahun 2023 (diagram batang warna orange) menunjukkan jumlah audiensi yang cukup tinggi di awal tahun, khususnya pada bulan Januari dan Februari, lalu kembali meningkat pada bulan Oktober dan November.

Hal ini menunjukkan adanya kecenderungan peningkatan permintaan audiensi menjelang akhir tahun anggaran maupun menjelang pembahasan kebijakan penting lainnya.

Tahun 2024 (diagram batang warna abu-abu) menunjukkan pola yang unik, dengan jumlah audiensi yang relatif rendah hampir sepanjang tahun, namun terjadi lonjakan yang sangat tinggi pada bulan November, mencapai puncak tertinggi dibandingkan bulan lain di seluruh rentang waktu tiga tahun. Hal ini menunjukkan bahwa audiensi pada tahun 2024 lebih terkonsentrasi pada momen akhir tahun, kemungkinan berkaitan dengan isu-isu strategis atau kebijakan pendidikan dan sosial yang mengemuka, seperti yang tercermin dari audiensi wali murid Yayasan Al Abidin dan kelompok masyarakat lainnya.

Data ini mengindikasikan bahwa Gedung DPRD Kota Surakarta menjadi ruang aspirasi masyarakat yang aktif, terutama pada bulan-bulan krusial seperti awal dan akhir tahun. Puncak-puncak audiensi ini penting untuk menjadi perhatian dalam perencanaan agenda DPRD dan strategi komunikasi publik ke depan.

5. Publikasi dan Dokumentasi DPRD

Kegiatan publikasi dan dokumentasi di DPRD Kota Surakarta memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas kinerja lembaga legislatif. Sebagai lembaga yang mewakili suara rakyat, DPRD bertanggung jawab untuk memberikan informasi yang jelas dan akurat mengenai berbagai kebijakan dan keputusan yang diambil. Publikasi dan dokumentasi ini menjadi sarana untuk menginformasikan kepada publik mengenai hasil kerja, proses legislasi, serta berbagai kegiatan yang dilakukan oleh DPRD, sehingga masyarakat dapat memahami dan mengawasi jalannya pemerintahan di tingkat daerah.

Publikasi dan dokumentasi juga berfungsi untuk meningkatkan keterbukaan informasi kepada masyarakat. Dalam era digitalisasi dan kemajuan teknologi informasi yang pesat, masyarakat semakin mudah mengakses berbagai informasi melalui media massa, sosial media, serta situs web resmi. Oleh karena itu, DPRD Kota Surakarta perlu memanfaatkan berbagai platform tersebut untuk menyampaikan informasi tentang kegiatan-kegiatan penting, seperti rapat paripurna, audiensi, pembahasan rancangan peraturan daerah (perda), serta pencapaian-pencapaian yang telah diraih oleh DPRD. Hal ini penting agar masyarakat tetap terinformasi dan dapat ikut berpartisipasi secara aktif dalam kehidupan politik daerah.

Salah satu aspek utama dari kegiatan publikasi dan dokumentasi adalah penyebaran informasi kepada publik dengan cara yang mudah diakses dan dipahami. Dalam hal ini, DPRD Kota Surakarta terus berupaya untuk memperbaiki kualitas penyampaian informasi, baik melalui media cetak, media elektronik, maupun platform digital. Dokumentasi yang baik juga menjadi alat penting dalam pencatatan sejarah pemerintahan daerah, yang dapat digunakan sebagai referensi untuk evaluasi kebijakan di masa depan.

Kegiatan publikasi dan dokumentasi tidak hanya berfungsi untuk menyampaikan informasi, tetapi juga untuk menciptakan citra positif dari kinerja DPRD. Dengan mendokumentasikan berbagai kegiatan yang dilakukan, mulai dari rapat, kegiatan legislasi, hingga pertemuan dengan masyarakat, DPRD dapat menunjukkan bahwa mereka bekerja secara profesional dan transparan. Hal ini akan membangun kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif serta memperkuat legitimasi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Selain itu, publikasi yang tepat juga dapat memperkuat hubungan antara DPRD dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, organisasi masyarakat, dan media massa. Dengan adanya informasi yang jelas dan terbuka, DPRD dapat memperoleh masukan yang lebih konstruktif dan berdampak positif terhadap kebijakan yang sedang disusun. Dokumentasi juga dapat menjadi sarana untuk mengevaluasi sejauh mana kebijakan yang diambil telah dilaksanakan dengan efektif dan sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

Sebagai upaya untuk terus meningkatkan kualitas layanan publik, DPRD Kota Surakarta juga memandang publikasi dan dokumentasi sebagai alat untuk mendekatkan diri dengan masyarakat. Dengan adanya saluran komunikasi yang terbuka dan mudah diakses, diharapkan masyarakat semakin memahami proses dan keputusan yang diambil oleh DPRD. Kegiatan ini juga menciptakan ruang bagi masyarakat untuk memberikan masukan dan kritik yang membangun, yang pada akhirnya akan berkontribusi pada perbaikan kualitas pemerintahan di Kota Surakarta.

a. Majalah Tahunan (Semar Batikan)

SEMAR BATIKAN, Majalah Tahunan DPRD Kota Surakarta

Menyelami Jejak, Merajut Asa

Tahun demi tahun, DPRD Kota Surakarta terus menapaki perjalanan panjang dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai lembaga legislatif yang dekat dengan masyarakat. Semar Batikan hadir sebagai majalah tahunan yang merekam dinamika kebijakan, kegiatan, dan aspirasi yang mewarnai perjalanan DPRD Kota Surakarta sepanjang tahun.

Dengan filosofi Semar, tokoh pewayangan yang dikenal bijaksana, serta Batik, warisan budaya yang penuh makna, Semar Batikan menjadi simbol keteladanan, kepekaan sosial, dan keberlanjutan nilai-nilai luhur dalam menjalankan amanah rakyat. Majalah ini bukan sekadar dokumentasi, tetapi juga refleksi atas pencapaian dan tantangan yang telah dilewati, serta komitmen untuk terus berbenah demi Kota Surakarta yang lebih baik.

Di setiap halaman **Semar Batikan**, pembaca akan menemukan berbagai informasi seputar kebijakan legislatif, pembahasan program pembangunan, serta dinamika aspirasi masyarakat yang telah diperjuangkan. Berbagai program kerja, rapat paripurna, reses, hingga kunjungan kerja tertuang dalam tulisan yang menggambarkan dedikasi para wakil rakyat dalam menjalankan fungsinya.

Tak hanya itu, **Semar Batikan** juga menjadi ruang untuk mengenal lebih dekat sosok-sosok yang berperan dalam menggerakkan roda pemerintahan dan pembangunan di Kota Surakarta. Wawancara eksklusif, opini, serta kajian-kajian mendalam turut dihadirkan sebagai bahan refleksi dan inspirasi bagi semua pihak.

Sebagai bagian dari transparansi dan keterbukaan informasi, majalah ini diharapkan menjadi jembatan komunikasi antara DPRD dan masyarakat. Harapannya, setiap kebijakan yang diambil dapat lebih dipahami dan mendapat dukungan dari berbagai elemen masyarakat, sehingga demokrasi yang partisipatif dan inklusif semakin terwujud di Kota Surakarta.



Gambar 5.6 **Cover Majalah Semar Batikan Edisi 2025**

b. Baliho

Dalam rangka meningkatkan keterbukaan informasi publik dan memperkuat citra serta fungsi DPRD Kota Surakarta di mata masyarakat, Sekretariat DPRD Kota Surakarta melaksanakan kegiatan publikasi melalui media luar ruang berupa pemasangan baliho berukuran 6x3 meter (single pol horizontal). Baliho ini dipasang di titik strategis, yaitu di sisi samping gerbang masuk Kantor DPRD Kota Surakarta, sehingga dapat terlihat dengan jelas oleh masyarakat yang melintas maupun para tamu dan pegawai yang beraktivitas di lingkungan kantor.

Media publikasi ini berfungsi sebagai sarana penyampaian informasi seputar kegiatan DPRD, agenda kelembagaan, serta pesan-pesan komunikasi publik lainnya yang mendukung transparansi dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Pemasangan baliho dilakukan dengan memperhatikan estetika lingkungan kantor dan ketentuan yang berlaku, agar tercipta keselarasan antara fungsi informasi dan kenyamanan visual.

Tabel 5.37 **Jadwal Penayangan Baliho DPRD Kota Surakarta Tahun 2024**

No	Hari/Tanggal	Tema
1.	Jumat, 9 Februari 2024	Jangan Golput
2.	Kamis, 15 Februari 2024	HUT Kota Solo Ke-279
3.	Jum'at, 8 Maret 2024	Marhaban Yaa Ramadhan
4.	Jum'at, 5 April 2024	Idul Fitri 1445H
5.	Kamis, 18 April 2024	Hari Kartini
6.	Kamis, 16 Mei 2024	Hari Kebangkitan Nasional
7.	Kamis, 30 Mei 2024	Hari Lahir Pancasila

No	Hari/Tanggal	Tema
8.	Rabu, 12 Juni 2024	Hari Jadi Pemkot Surakarta Ke-78
9.	Rabu, 14 Agustus 2024	HUT RI Ke-79
10.	Jum'at, 6 September 2024	Hari Olahraga Nasional
11.	Kamis, 26 September 2024	Pameran Keris dan Wayang Kulit
12.	Kamis, 24 Oktober 2024	Hari Sumpah Pemuda
13.	Kamis, 7 November 2024	Hari Pahlawan
14.	Senin, 25 November 2024	HUT KORPRI Ke-53
15.	Jum'at, 6 Desember 2024	Hari Antikorupsi Sedunia
16.	Senin, 16 Desember 2024	Hari Bela Negara
17.	Jum'at, 20 Desember 2024	Natal dan Tahun Baru 2025



Gambar 5.7 **Foto Penayangan Titik Baliho DPRD Kota Surakarta (Hakordia Tahun 2024)**

c. Gathering Media

Dalam era keterbukaan informasi publik dan perkembangan dinamika demokrasi yang semakin pesat, peran media massa sebagai penyampai informasi dan pengawal jalannya pemerintahan sangatlah strategis. Media tidak hanya menjadi jembatan antara pemerintah dan masyarakat, tetapi juga mitra penting dalam membangun kesadaran publik terhadap berbagai program dan kebijakan yang dijalankan oleh lembaga pemerintahan, termasuk lembaga legislatif daerah.

Menyadari pentingnya sinergi dan komunikasi yang baik antara DPRD sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah dengan media sebagai pilar keempat demokrasi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surakarta secara konsisten menyelenggarakan **Kegiatan Gathering Media** sebagai agenda tahunan. Kegiatan ini dirancang sebagai sarana untuk mempererat jalinan kemitraan antara DPRD dan insan pers yang selama ini telah menjadi mitra strategis dalam menyampaikan informasi kepada publik secara objektif, berimbang, dan konstruktif.

Gathering Media bukan sekadar ajang silaturahmi, tetapi juga merupakan forum dialog dan tukar pikiran antara wakil rakyat dan awak media, guna menyamakan persepsi serta meningkatkan pemahaman mengenai peran, fungsi, dan tugas masing-masing. Melalui kegiatan ini, diharapkan akan terbangun komunikasi dua arah yang lebih intensif, produktif, dan berkesinambungan, dalam rangka mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan daerah yang transparan, akuntabel, dan partisipatif.

DPRD Kota Surakarta memandang bahwa keberhasilan dalam menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan tidak terlepas dari peran aktif media dalam menyampaikan informasi yang mencerahkan masyarakat. Oleh karena itu, kegiatan ini juga menjadi bentuk apresiasi dan penghargaan atas kontribusi para jurnalis yang telah berperan menjaga ruang publik tetap sehat dan dinamis melalui pemberitaan yang mendidik serta membangun.



Gambar 5.8 **Foto Bersama Gathering Media Tahun 2024 di Salatiga**

d. Greeting/Ucapan Selamat di Media Cetak

Dalam rangka membangun komunikasi yang positif dan memperkuat citra kelembagaan, Sekretariat DPRD Kota Surakarta secara konsisten menjalin sinergi dengan berbagai pihak, termasuk media cetak lokal maupun regional. Salah satu wujud sinergi tersebut adalah melalui penyampaian ucapan selamat atau greeting dalam momentum-momentum penting seperti hari besar nasional, peringatan keagamaan, maupun momen bersejarah lainnya.

Ucapan selamat ini disampaikan sebagai bentuk apresiasi, penghormatan, dan partisipasi aktif Sekretariat DPRD Kota Surakarta dalam kehidupan bermasyarakat. Melalui kerja sama dengan media cetak seperti Koran Suara Merdeka, Solopos, Jateng Pos, Tabloid Radar Pos, Koran Jawapos Radar Solo, dan Tribun Jateng, pesan-pesan positif dari lembaga dapat tersampaikan luas kepada masyarakat.

Lebih jauh, kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen Sekretariat DPRD Kota Surakarta dalam menjunjung nilai-nilai keterbukaan informasi publik. Dengan menjadikan media cetak sebagai mitra strategis, lembaga tidak hanya menyampaikan pesan, tetapi juga menunjukkan kepedulian dan kedekatan terhadap berbagai peristiwa yang menjadi perhatian masyarakat. Hal ini diharapkan dapat menumbuhkan rasa kepercayaan dan kebanggaan publik terhadap keberadaan dan peran DPRD dalam kehidupan demokrasi lokal.

Selain itu, greeting atau ucapan selamat yang disampaikan juga menjadi refleksi semangat kebersamaan dan semangat membangun Kota Surakarta yang lebih baik. Di tengah dinamika sosial dan politik, Sekretariat DPRD hadir dengan wajah yang ramah, terbuka, dan komunikatif melalui berbagai kanal, termasuk media massa. Dengan demikian, hubungan harmonis antara lembaga dan masyarakat dapat terus terjalin dan diperkuat dari waktu ke waktu.

Tabel 5.38 *Jadwal Iklan Greeting Media Cetak DPRD Kota Surakarta Tahun 2024*

No	Media Cetak	Tema
1.	Suara Merdeka	HUT Suara Merdeka Ke-74
2.	Suara Merdeka	HUT SOLO Ke-279
3.	Suara Merdeka	Idul Fitri 1445H

No	Media Cetak	Tema
4.	Suara Merdeka	HUT RI Ke-79
5.	Suara Merdeka	Hari Sumpah Pemuda Ke-96
6.	Suara Merdeka	HUT Korpri Ke-53
7.	Suara Merdeka	Natal dan Tahun Baru 2025
8.	SOLOPOS	HUT SOLO Ke-279
9.	SOLOPOS	Idul Fitri 1445H
10.	SOLOPOS	HUT Pemkot Surakarta Ke-78
11.	SOLOPOS	Selamat dan Sukses Teguh Prakosa dan Terimakasih Gibran
12.	SOLOPOS	HUT RI Ke-79
13.	SOLOPOS	Hari Sumpah Pemuda Ke-96
14.	SOLOPOS	HUT Korpri Ke-53
15.	SOLOPOS	Hari Anti Korupsi Sedunia
16.	SOLOPOS	Natal dan Tahun Baru 2025
17.	Jateng Pos	Hari Pers Nasional 2024
18.	Jateng Pos	Idul Fitri 1445H

No	Media Cetak	Tema
19.	Jateng Pos	HUT Jateng Pos
20.	Jateng Pos	HUT RI Ke-79
21.	Jateng Pos	Selamat dan Sukses Teguh Prakosa dan Terimakasih Gibran
22.	Jateng Pos	HUT Korpri Ke-53
23.	Jateng Pos	Hari Anti Korupsi Sedunia
24.	Jateng Pos	Natal dan Tahun Baru 2025
25.	Tabloid Radar Pos	HUT SOLO Ke-279
26.	Tabloid Radar Pos	Idul Fitri 1445H
27.	JawaPos Radar Solo	Idul Fitri 1445H
28.	JawaPos Radar Solo	HUT Pemkot Surakarta Ke-78
29.	JawaPos Radar Solo	Selamat dan Sukses Teguh Prakosa dan Terimakasih Gibran
30.	JawaPos Radar Solo	HUT RI Ke-79
31.	JawaPos Radar Solo	Pelantikan Pimpinan DPRD
32.	JawaPos Radar Solo	HUT Korpri Ke-53
33.	JawaPos Radar Solo	Hari Anti Korupsi Sedunia

No	Media Cetak	Tema
34.	JawaPos Radar Solo	Natal dan Tahun Baru 2025
35.	Tribun Jateng	HUT Tribun Jateng
36.	Tribun Jateng	HUT RI Ke-79
37.	Tribun Jateng	HUT Korpri Ke-53
38.	Tribun Jateng	Natal dan Tahun Baru 2025



Gambar 5.9 **Tampilan Iklan HPN 2024 di Media Koran Jateng Pos**

e. Greeting/Ucapan Selamat di Media Elektronik

Sebagai bentuk komitmen dalam menjalin komunikasi yang efektif dan menjangkau masyarakat secara lebih luas, Sekretariat DPRD Kota Surakarta terus memperkuat sinergi dengan berbagai media elektronik lokal. Melalui kerja sama dengan **Radio Solopos FM, TA TV**, dan **Website Lensa Nusantara**, Sekretariat DPRD menghadirkan ucapan selamat atau greeting dalam berbagai momentum penting sebagai wujud partisipasi aktif dan kepedulian terhadap dinamika sosial di tengah masyarakat.

Ucapan selamat yang disampaikan melalui media elektronik ini merupakan bagian dari upaya membangun kedekatan dengan warga Kota Surakarta dan sekitarnya. Disampaikan dalam format audio, visual, maupun digital, greeting ini menjadi media penyampaian pesan positif, harapan, serta semangat kebersamaan dari Sekretariat DPRD kepada seluruh elemen masyarakat.

Pemanfaatan media elektronik memungkinkan penyampaian pesan yang lebih dinamis dan menjangkau beragam lapisan masyarakat, baik melalui siaran langsung, rekaman audio-visual, maupun publikasi daring. Dengan pendekatan ini, Sekretariat DPRD dapat hadir secara aktif dalam ruang-ruang publik modern yang kini menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat.

Melalui kegiatan greeting ini, Sekretariat DPRD tidak hanya menyampaikan ucapan selamat, tetapi juga menegaskan eksistensinya sebagai lembaga yang terbuka, adaptif, dan responsif terhadap perkembangan zaman. Semangat kebersamaan dan kolaborasi yang terbangun melalui media elektronik ini diharapkan dapat mempererat hubungan antara lembaga legislatif dengan masyarakat dalam mewujudkan pemerintahan yang partisipatif dan inklusif.

Tabel 5.39 **Jadwal Iklan Greeting Media Elektronik DPRD Kota Surakarta Tahun 2024**

No	Media Cetak	Tema
1.	Solopos FM	Idul Fitri 1445H / Tahun 2024
2.	TA TV	Idul Fitri 1445H / Tahun 2024
3.	Website Lensa Nusantara	Hari Sumpah Pemuda Ke-96

No	Media Cetak	Tema
4.	Website Lensa Nusantara	Natal dan Tahun Baru 2025



Gambar 5.10 **Tampilan Screenshot Greeting Idul Fitri 1445H di Media Sosial Radio Solopos FM**

f. Talksow TV Jaringan Nasional (Metro TV)

Dalam upaya memperluas jangkauan komunikasi publik dan memperkuat citra kelembagaan di tingkat nasional, Sekretariat DPRD Kota Surakarta berinisiatif untuk hadir dalam program talkshow televisi jaringan nasional. Melalui kerja sama strategis dengan CV. Mawar Magenta selaku rekanan pelaksana, Sekretariat DPRD Kota Surakarta mengambil bagian dalam tayangan khusus di Metro TV, salah satu media televisi terpercaya dan memiliki jangkauan pemirsa luas di seluruh Indonesia.

Kegiatan talkshow ini menjadi salah satu sarana penting untuk menyampaikan informasi kelembagaan, kinerja, serta berbagai program strategis Sekretariat DPRD kepada publik nasional. Dengan menghadirkan narasumber yang kredibel, kompeten, dan representatif, talkshow ini diharapkan mampu membangun persepsi positif masyarakat terhadap kiprah Sekretariat DPRD Kota Surakarta sebagai bagian integral dari penyelenggaraan pemerintahan daerah yang transparan dan akuntabel.

Selain menjadi ruang dialog terbuka, talkshow ini juga menjadi momentum untuk menunjukkan bagaimana nilai-nilai pelayanan publik, tata kelola kelembagaan, dan semangat kolaborasi diwujudkan dalam praktik nyata. Melalui visualisasi profesional dan narasi yang kuat, Sekretariat DPRD hadir tidak hanya sebagai institusi administratif, tetapi juga sebagai representasi aspirasi dan harapan masyarakat Kota Surakarta.

Dengan dukungan teknis dan manajerial dari CV. Mawar Magenta, kegiatan ini dapat terlaksana secara optimal, mulai dari perencanaan konten, proses produksi, hingga penyiaran ke khalayak luas. Diharapkan, melalui platform nasional seperti Metro TV, Sekretariat DPRD Kota Surakarta dapat semakin dikenal, dipercaya, dan menjadi inspirasi bagi penguatan kelembagaan di tingkat daerah maupun nasional.

Tabel 5.40 **Jadwal Tayang Talkshow Metro TV Jateng, Dialog bersama DPRD Kota Surakarta Tahun 2024**

No	Hari/Tanggal	Narasumber	Tema
1.	Senin, 15 Juli 2024	Suharsono dan Dinar Retna Indrasari	Peran DPRD Kota Surakarta dalam Penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024
2.	Selasa, 16 Juli 2024	Jugo Agung Ruwanto dan Margono	Revitalisasi Pasar Rakyat di Surakarta
3.	Rabu, 17 Juli 2024	Sugeng Riyanto dan Taufiqurrahman	DPRD dalam Masa Transisi Dinamika antara Kewajiban dan Keterbatasan Waktu
4.	Kamis, 18 Juli 2024	Yulianto Indratmoko dan Roy Saputra	Pengelolaan Sampah di Surakarta
5.	Senin, 22 Juli 2024	Janjang Sumaryono Aji dan Anna Budiarti	Surakarta Sehat dan Berbudaya

No	Hari/Tanggal	Narasumber	Tema
6.	Selasa, 23 Juli 2024	Budi Prasetyo	KUPA PPAS Tahun 2024 dan KUA PPAS Tahun 2025
7.	Rabu, 24 Juli 2024	Budi Prasetyo dan Kinkin Sultanul Hakim	Persiapan Pelantikan Anggota DPRD Kota Surakarta



Gambar 5.11 **Foto-foto Kegiatan Dialog Metro TV Jateng dengan DPRD Kota Surakarta (Rabu, 24 Juli 2024)**

g. Talkshow Rembug Kutho Solo TA TV

Dalam rangka mendorong keterbukaan informasi publik dan memperkuat komunikasi antara wakil rakyat dan masyarakat, **Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surakarta** bekerja sama dengan media televisi lokal **Terang Abadi Televisi (TA TV)** menyelenggarakan kegiatan talkshow bertajuk **“Rembug Kutho Solo”**.

Disiarkan secara **langsung dari Graha Paripurna DPRD Kota Surakarta Pukul 19.30 WIB**, talkshow ini menghadirkan **3 hingga 4 Anggota DPRD Kota Surakarta** sebagai narasumber utama, yang akan berdialog dan berdiskusi mengenai berbagai isu aktual, potensi, serta tantangan pembangunan di Kota Surakarta.

Kegiatan ini menjadi bentuk komitmen DPRD Kota Surakarta dalam membuka ruang dialog publik yang lebih luas, melalui media penyiaran lokal yang dekat dengan masyarakat. Dengan pendekatan yang komunikatif dan partisipatif, “Rembug Kutho Solo” diharapkan dapat menjadi wadah untuk menyampaikan informasi, menjelaskan kebijakan, serta mendengar tanggapan dan harapan masyarakat terhadap kinerja pemerintah daerah.

Topik-topik yang dibahas dalam talkshow ini mencakup berbagai aspek pembangunan Kota Surakarta, mulai dari infrastruktur, pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, hingga penguatan peran masyarakat dalam pembangunan kota. Para narasumber dari DPRD akan memberikan perspektif legislatif atas isu-isu tersebut, serta menyampaikan peran pengawasan dan kebijakan yang telah atau sedang dijalankan.

Melalui kegiatan ini, DPRD Kota Surakarta ingin membangun sinergi yang kuat dengan media lokal sebagai mitra strategis dalam mendiseminasikan informasi yang edukatif dan mencerahkan. Di saat yang sama, DPRD juga ingin memastikan bahwa aspirasi masyarakat dapat tersampaikan dan ditindaklanjuti melalui mekanisme kerja kelembagaan yang transparan dan akuntabel.

“Rembug Kutho Solo” bukan hanya sebuah program siaran, tetapi juga merupakan bentuk nyata dari demokrasi yang partisipatif, di mana masyarakat dapat ikut terlibat, memahami, dan mengawal jalannya pemerintahan secara aktif.

Tabel 5.41 **Jadwal Tayang Talkshow “Rembug Kutho Sala” DPRD Kota Surakarta Tahun 2024**

No	Hari/Tanggal	Narasumber	Tema
1.	Kamis, 14 Maret 2024	Rony Kamtoro, Wawanto, Jugo Agung Ruwanto	Rencana Pembangunan Industri Kota Surakarta Tahun 2024-2044
2.	Senin, 25 Maret 2024	Suharsono, Haryoto Paulus, Didik Hermawan	Penataan Pegawai Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta
3.	Kamis, 18 April 2024	YF Sukasno, Ardianto Kuswinarno, Siti Muslikah	Pembangunan Infrastruktur Tahun 2024
4.	Senin, 29 April 2024	Budi Prasetyo, Sugeng Riyanto, Achmad Sapari, Taufiqurrahman (Pimpinan DPRD)	Menyongsong Pilkada Tahun 2024
5.	Senin, 20 Mei 2024	Janjang Sumaryono Aji, Anna Budiarti, Agus Setiawan	Kesehatan dan Kebudayaan
6.	Senin, 27 Mei 2024	Budi Prasetyo, Kinkin Sultanul Hakim (Bincang JDIH)	4 Tahun Kiprah JDIH DPRD Kota Surakarta
7.	Kamis, 6 Juni 2024	Tri Hono Setyo Putro, Dyah Retno Pratiwi, Abdul Ghofar Ismail	Peran dan Potensi PAD bagi Pembangunan Kota Surakarta

No	Hari/Tanggal	Narasumber	Tema
8.	Kamis, 13 Juni 2024	Yulianto Indratmoko, Ety Isworo, Muhadi Syahroni	Mewujudkan Hunian Layak Bagi Rakyat
9.	Senin, 24 Juni 2024	Ekya Sih Hananto, Titik Nurhayati, Terty Maharani Gunawati	Prosedur PPDB 2024 (TK, SD, dan SMP)
10.	Kamis, 27 Juni 2024	Dinar Retna Indrasari, Slamet Widodo, Yudha Sindu Riyanto	Partisipasi Pemilih Pemula dalam Pilkada Serentak 2024
11.	Kamis, 18 Juli 2024	Lim Purwanto, Indriani, Ginda Ferachtriawan	Solo Menatap Masa Depan
12.	Kamis, 1 Agustus 2024	Roro Indradi Sarwo Indah, Margono, Agung Harsakti Pancasila	Optimalisasi Ekonomi Kerakyatan
13.	Senin, 5 Agustus 2024	Wahyu Haryanto, Haryoto Paulus, Agus Nuryanto	Mengawal Pemilukada 2024 Terselenggara dengan Sukses
14.	Kamis, 8 Agustus 2024	Roy Saputra, H.M. Al Amin, Suyatno	Solo Kekinian dan Solo Masa Depan
15.	Kamis, 12 Agustus 2024	Antonius Yogo Prabowo, Asih Sunjoto Putro	DPRD 2019-2024 Melaju, Solo Semakin Maju
16.	Senin, 16 September 2024	Budi Prasetyo, Sugeng Riyanto, Kinkin Sultanul Hakim	DPRD dalam rangka Merawat Kebudayaan

No	Hari/Tanggal	Narasumber	Tema
17.	Kamis, 14 November 2024	Daryono, Muhammad Bilal, Ardianto Kuswinarno, Suharsono	Jelang Pilkada 27 November



Gambar 5.12 **Foto-foto Kegiatan LIVE Talkshow Rembug Kutho Solo bersama TA TV (Kamis, 14 November 2024)**

h. Talkshow Siaran Radio

Sebagai bagian dari upaya memperkuat keterbukaan informasi publik dan meningkatkan partisipasi masyarakat, Sekretariat DPRD Kota Surakarta secara rutin menyelenggarakan kegiatan **Talkshow Siaran Radio** yang disiarkan melalui berbagai stasiun radio lokal. Dalam satu tahun berjalan, kegiatan ini dilaksanakan secara bergiliran bekerja sama dengan beberapa radio terkemuka di Kota Surakarta, seperti **Solopos FM, TA Radio, Immanuel FM, dan METTA FM**.

Talkshow ini dirancang sebagai ruang dialog interaktif yang menghubungkan DPRD dengan masyarakat secara langsung. Melalui siaran radio, masyarakat tidak hanya mendapatkan informasi seputar tugas dan fungsi DPRD, tetapi juga bisa menyampaikan aspirasi, masukan, dan pertanyaan yang relevan terhadap isu-isu pemerintahan dan pembangunan di Kota Surakarta. Dengan bahasa yang ringan dan format yang komunikatif, talkshow ini mampu menjangkau berbagai kalangan, termasuk masyarakat yang tidak aktif di media sosial atau platform digital.

Kehadiran narasumber dari unsur pimpinan dan anggota DPRD, memberikan bobot dan keberagaman perspektif dalam setiap sesi talkshow. Berbagai tema diangkat secara variatif, mulai dari pembahasan Perda, pengawasan anggaran, pelayanan publik, hingga topik-topik aktual yang sedang menjadi perhatian masyarakat.

Melalui sinergi yang baik antara Sekretariat DPRD dan lembaga penyiaran lokal, kegiatan ini diharapkan mampu memperkuat kedekatan antara legislatif dengan masyarakat, sekaligus menjadi contoh nyata bagaimana media radio tetap relevan sebagai jembatan informasi yang efektif dan membumi. Kegiatan ini juga merupakan bentuk nyata dari semangat transparansi, akuntabilitas, serta komitmen DPRD dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang partisipatif dan responsif.

Tabel 5.42 **Jadwal Siaran Radio Bincang Spesial bersama DPRD Kota Surakarta Tahun 2024**

No	Hari/Tanggal	Narasumber	Tema	Media
1.	Senin, 12 Februari 2024	Budi Prasetyo dan Achmad Sapari	Pemilu Damai 2024	SOLOPOS FM
2.	Selasa, 13 Februari 2024	Taufiqurrahman dan Sugeng Riyanto	Keterlibatan Masyarakat dalam Pembuatan Perda	SOLOPOS FM
3.	Selasa, 30 April 2024	RELAY PARIPURNA LKPJ TA. 2023	Penyampaian Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Wali Kota TA. 2023	SOLOPOS FM
4.	Kamis, 13 Juni 2024	Ekya Sih Hananto dan Roy Saputra	Tahapan Propemperda	SOLOPOS FM

No	Hari/Tanggal	Narasumber	Tema	Media
5.	Kamis, 27 Juni 2024	Ginda Ferachtriawan dan Titik Nurhayati	Seputar Solo di Mata Komisi IV	SOLOPOS FM
6.	Senin, 5 Agustus 2024	Agus Nuryanto dan Paulus Haryoto	Mengawal Pemilukada 2024 Terselenggara dengan Sukses	SOLOPOS FM
7.	Jumat, 9 Agustus 2024	Dyah Retno Pratiwi dan Abdul Ghofar Ismail	Optimalisasi Pemanfaatan Aset Daerah untuk Peningkatan PAD	SOLOPOS FM
8.	Selasa, 24 September 2024	Kinkin Sultanul Hakim dan Sugeng Riyanto	DPRD Peduli Budaya	SOLOPOS FM
9.	Jumat, 11 Oktober 2024	Sugeng Widodo dan Sugeng Riyanto	Sugeng Sedunia Ngumpul di Solo (HUT Paguyuban Sugeng Sedunia)	SOLOPOS FM
10.	Rabu, 16 Oktober 2024	RELAY PARIPURNA	Paripurna Sumpah/Janji Pimpinan DPRD Kota Surakarta	SOLOPOS FM

No	Hari/Tanggal	Narasumber	Tema	Media
11.	Senin, 4 November 2024	Muhammad Bilal dan Daryono	Nasionalisme Pemuda di Hari Pahlawan	SOLOPOS FM
12.	Senin, 11 November 2024	Wahyu Haryanto dan Joni Sofyan Erwandi	Peran DPRD dalam Menyukkseskan PILKADA Surakarta 2024	SOLOPOS FM
13.	Kamis, 14 November 2024	Herson Rikumau dan Muhammad Nafi'	Solo Gerak Bersama, Sehat Bersama	SOLOPOS FM
14.	Rabu, 20 November 2024	Mukarromah dan Achmad Sapari	Pilkada Damai	SOLOPOS FM
15.	Kamis, 21 November 2024	Mukti Junianto dan Tri Mardiyanto	Peredaran Bebas Miras dan Obat Golongan G	SOLOPOS FM
16.	Rabu, 20 Maret 2024	Taufiqurrahman dan Achmad Sapari	Tugas dan Fungsi DPRD	TA Radio
17.	Kamis, 28 Maret 2024	Budi Prasetyo dan Sugeng Riyanto	Stabilitas Ekonomi Menjelang Lebaran	TA Radio

No	Hari/Tanggal	Narasumber	Tema	Media
18.	Rabu, 19 Juni 2024	Rony Kamtoro dan Wawanto	Pasar Tradisional	TA Radio
19.	Rabu, 7 Agustus 2024	Anna Budiarti dan Elizabeth Pudjiningati	Perpustakaan Keliling	TA Radio
20.	Jumat, 14 Juni 2024	Suharsono dan Dinar Retna Indrasari	Partisipasi Pemilih Pemula	Immanuel FM
21.	Rabu, 19 Juni 2024	Anna Budiarti dan Terty Maharani Gunawati	Kesehatan, Pendidikan, Pariwisata	Immanuel FM
22.	Jumat, 28 Juni 2024	H.M. Al Amin dan Asih Sunjoto Putro	Penerimaan Peserta Didik Baru Untuk SD dan SMP	Immanuel FM
23.	Kamis, 8 Agustus 2024	Siti Muslikah dan Indriani	Terima Kasih Periode Lama, Selamat Datang Periode Baru	Immanuel FM
24.	Selasa, 12 November 2024	YF Sukasno dan Janjang Sumaryono Aji	Melanjutkan Penanganan Kumuh 100-0-100	Immanuel FM

No	Hari/Tanggal	Narasumber	Tema	Media
25.	Jumat, 15 November 2024	Jumat, 15 November 2024	Menggali Peran Strategis DPRD dalam Mewujudkan Kebijakan Pro-Rakyat	Immanuel FM
26.	Jumat, 22 November 2024	Baruna Wasita Aji dan Sonny	UMKM sebagai Motor Penggerak Perekonomian dan Dampaknya bagi Kehidupan Masyarakat	Immanuel FM
27.	Kamis, 14 November 2024	Sagita Puspita Wiranata dan Roro Indradi Sarwo Indah	Optimalisasi PAD untuk Kesejahteraan Rakyat	METTA FM
28.	Jumat, 15 November 2024	Terty Maharani Gunawati dan Siti Muslikah	Belajar Berdemokrasi	METTA FM
29.	Rabu, 20 November 2024	Rony Kamtoro dan Giyatno	Tugas dan Fungsi DPRD	METTA FM

No	Hari/Tanggal	Narasumber	Tema	Media
30.	Jumat, 22 November 2024	Rheo Yuliana Fernandez dan Wahyu Haryanto	DPRD Mendorong Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Budaya dari Tingkat Kelurahan	METTA FM



Gambar 5.13 **Foto-foto Kegiatan Bincang Special Bersama DPRD Kota Surakarta di Radio Solopos FM (Rabu, 20 November 2024)**

i. Siaran Ulang Event Special

Sebagai bentuk komitmen terhadap transparansi informasi dan akuntabilitas publik, Sekretariat DPRD Kota Surakarta terus berinovasi dalam menyampaikan berbagai kegiatan kelembagaan kepada masyarakat. Salah satunya adalah melalui penayangan **siaran ulang event-event spesial dan kegiatan liputan DPRD** yang ditayangkan secara tunda melalui **stasiun televisi lokal TA TV** dan kanal digital **YouTube TA TV**.

Siaran ulang ini meliputi berbagai agenda penting seperti rapat paripurna, inspeksi mendadak, hingga event-event seremonial yang melibatkan unsur pimpinan dan anggota DPRD bersama masyarakat maupun mitra kerja. Dengan dokumentasi yang dikemas secara informatif dan menarik, masyarakat tetap dapat mengikuti jalannya kegiatan meski tidak hadir secara langsung, kapan pun dan di mana pun mereka berada.

Penayangan ulang ini sekaligus menjadi upaya strategis dalam menyosialisasikan peran dan fungsi DPRD kepada khalayak luas, serta memperkuat partisipasi publik dalam proses pemerintahan daerah. Melalui tampilan visual yang jernih, narasi yang komunikatif, dan penyampaian yang aktual, masyarakat diajak untuk lebih mengenal dan memahami dinamika kinerja lembaga legislatif secara transparan.

Kerja sama dengan **TA TV** sebagai media lokal terpercaya memberikan nilai tambah tersendiri, karena mampu menjangkau pemirsa lintas generasi—baik melalui saluran televisi konvensional maupun platform digital seperti YouTube. Diharapkan, siaran ulang ini tidak hanya menjadi dokumentasi kegiatan, tetapi juga menjadi media edukasi, referensi publik, serta penguat hubungan antara DPRD dan masyarakat Kota Surakarta.

Tabel 5.43 **Jadwal Penayangan Siaran Special Event TA TV Tahun 2024**

No	Hari/Tanggal	Tema
1.	Jumat, 3 Mei 2024 Pukul 19.00 WIB	Paripurna Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota Surakarta TA. 2023
2.	Rabu 3 Juli 2024 Pukul 18.30 WIB	Rapat Paripurna P2APBD Kota Solo TA. 2023
3.	Senin, 19 Agustus 2024 Pukul 18.30 WIB	Pengambilan Sumpah dan Pelantikan Anggota DPRD Kota Surakarta 2024- 2029
4.	Jumat, 23 Agustus 2024 Pukul 18.30 WIB	Rapat Paripurna DPRD Kota Surakarta Mendengarkan Pidato Presiden RI dalam rangka HUT Ke-79 RI.
5.	Sabtu, 24 Agustus 2024 Pukul 18.30 WIB	Malam Pisah Sambut Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Surakarta
6.	Kamis, 3 Oktober 2024 Pukul 18.30 WIB	Bahana Pusaka 2 : Seni Wayang Kulit di DPRD Kota Surakarta
7.	Sabtu, 19 Oktober 2024 Pukul 19.30 WIB	Rapat Paripurna Pengucapan Sumpah/Janji Pimpinan DPRD Kota Surakarta Masa Jabatan 2024-2029
8.	Selasa, 17 Desember 2024 Pukul 18.30 WIB	Sosialisasi JDIH Sekretariat DPRD Kota Surakarta
9.	Rabu, 18 Desember 2024 Pukul 18.30 WIB	Rapat Paripurna DPRD Kota Surakarta Raperda tentang APBD Kota Surakarta TA. 2025



Gambar 5.14 *Foto-foto Kegiatan Special Event Rapat Paripurna RAPBD TA. 2025 (Rabu, 18 Desember 2024)*

j. Iklan Advetorial

Dalam rangka meningkatkan keterbukaan informasi publik dan memperkuat komunikasi kelembagaan, Sekretariat DPRD Kota Surakarta secara aktif melaksanakan kegiatan publikasi melalui **iklan advertorial atau artikel berita di media cetak dan online**. Kegiatan ini dilakukan sebagai salah satu strategi penyebaran informasi terkait tugas, fungsi, serta berbagai aktivitas kelembagaan DPRD kepada masyarakat secara luas.

Melalui kerja sama dengan sejumlah media terpercaya seperti **Koran Solopos, Jateng Pos, Tribun Jateng, Jawapos Radar Solo**, serta **Website Sigi Jateng**, Sekretariat DPRD menghadirkan konten advertorial yang dikemas dalam bentuk artikel informatif, inspiratif, dan mudah dipahami oleh berbagai kalangan. Publikasi ini biasanya ditayangkan dalam ukuran **1/4 halaman untuk media cetak**, serta versi digital untuk menjangkau pembaca daring.

Konten yang dimuat mencakup berbagai hal seperti agenda sidang, sidang, audiensi, demo, rapat kerja, peninjauan lapangan, hingga peran DPRD dalam penyusunan regulasi daerah. Informasi ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang utuh kepada masyarakat tentang bagaimana DPRD menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan secara nyata.

Selain sebagai sarana informasi, kegiatan publikasi advertorial ini juga merupakan bentuk pertanggungjawaban moral kepada publik atas setiap langkah dan kebijakan yang diambil oleh DPRD. Dengan memanfaatkan media massa sebagai mitra strategis, Sekretariat DPRD berupaya menjalin kedekatan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi dan pemerintahan daerah yang berlangsung di Kota Surakarta.

Tabel 5.44 **Jadwal Penayangan Iklan Advertorial/Artikel Kegiatan DPRD Kota Surakarta Tahun 2024**

No	Terbit	Media	Judul
1.	20 Maret 2024	SOLOPOS	Iklan Advertorial Kegiatan Legislasi DPRD Kota Surakarta
2.	2 Mei 2024	SOLOPOS	DPRD Solo Berikan Banyak Sekali Catatan dan Rekomendasi LKPj Terakhir Gibran
3.	2 Juli 2024	SOLOPOS	Disetujui Bersama, Ini Catatan & Rekomendasi DPRD Solo Atas P2APBD 2023
4.	22 Juli 2024	SOLOPOS	Pansus DPRD Matangkan Desain Pembangunan Solo 20 Tahun ke Depan

No	Terbit	Media	Judul
5.	15 Agustus 2024	SOLOPOS	Wajah Baru & Harapan Baru Anggota DPRD Solo Periode 2024-2029
6.	9 Oktober 2024	SOLOPOS	Budi Prasetyo Calon Tunggal Ketua DPRD Solo Periode 2024-2029
7.	7 November 2024	SOLOPOS	Optimisme Menyeruak di Tengah Mandeknya Pembentukan Alkap DPRD Solo
8.	15 November 2024	SOLOPOS	3 Bulan Tanpa Alkap, Begini Cara DPRD Solo Jalankan Tugas & Fungsinya.
9.	22 November 2024	SOLOPOS	DPRD Kota Solo Siapkan Skema Penyelamatan APBD 2025
10.	28 November 2024	SOLOPOS	DPRD dan Pemkot Surakarta Kebut Pembahasan RAPBD 2025.
11.	9 Desember 2024	SOLOPOS	Difasilitasi Teguh Prakosa, DPRD Solo Akhiri Polemik Internal.

No	Terbit	Media	Judul
12.	23 Maret 2024	JATENG POS	Iklan Advetorial Kegiatan Legislasi DPRD Kota Surakarta
13.	2 Juli 2024	JATENG POS	Ada Masukan dari Banggar, Raperda P2APBD 2023 Tetap Disetujui
14.	15 Agustus 2024	JATENG POS	45 Anggota DPRD Kota Surakarta Periode 2024-2029 Resmi Dilantik
15.	27 September 2024	JATENG POS	DPRD Surakarta dan Disbudpar Gelar Wayang Kulit dan Pameran Bursa Keris
16.	6 November 2024	JATENG POS	DPRD Kota Surakarta Terima Audiensi Forum Silaturahmi Ulama dan Ormas Islam
17.	26 November 2024	JATENG POS	Anggota Dewan Ajak Masyarakat Gunakan Hak Pilih dengan Bijak.
18.	21 Maret 2024	TRIBUN JATENG	Pimpinan DPRD Terima Aspirasi Pendemo yang Suarakan Hak Angket

No	Terbit	Media	Judul
19.	2 Mei 2024	TRIBUN JATENG	DPRD Kota Surakarta Beri 9 Rekomendasi atas LKPj Wali Kota Surakarta TA. 2023
20.	1 Juli 2024	TRIBUN JATENG	Raperda P2APBD Disetujui, Banggar Beri Rekomendasi
21.	13 September 2024	TRIBUN JATENG	Lima Fraksi DPRD Solo Sudah Terbentuk, Selanjutnya Proses Pimpinan Definitif
22.	22 November 2024	TRIBUN JATENG	Alkap DPRD Belum Terbentuk, Dewan Dorong Pemkot Solo Usulkan Paripurna Pembahasan APBD 2025
23.	6 Desember 2024	TRIBUN JATENG	DPRD Bakal Kawal Kepala Daerah Terpilih Wujudkan Visi Misinya untuk Kota Bengawan
24.	27 Maret 2024	JawaPos Radar Solo	LKPj Gibran, Pelototi PAD dan Angka Kemiskinan Tinggi
25.	19 April 2024	JawaPos Radar Solo	Kritisi Infrastruktur hingga Bansos Tak Tepat Sasaran

No	Terbit	Media	Judul
26.	2 Mei 2024	JawaPos Solo Radar	Soroti 17 Program Prioritas Gibran
27.	27 Juni 2024	JawaPos Solo Radar	Kebut Pembahasan Empat Raperda
28.	18 Juli 2024	JawaPos Solo Radar	Gelar Rapat Paripurna Pengunduran Diri Wali Kota
29.	15 Agustus 2024	JawaPos Solo Radar	Kebut Penyelesaian APBD 2025
30.	7 November 2024	JawaPos Solo Radar	Pelototi Miras, Audiensi dengan Ormas
31.	21 November 2024	JawaPos Solo Radar	Desak Pemkot Benahi Mojo
32.	27 November 2024	JawaPos Solo Radar	Komitmen Segera Lengkapi Alkap
33.	25 Maret 2024	Website Sigijateng	Sambut Idul Fitri, Banmus DPRD Gelar Rapat Perubahan Kegiatan Bulan April
34.	15 Juli 2024	Website Sigijateng	Komisi 1 DPRD Kota Surakarta, Sekwan Harus Sigab

No	Terbit	Media	Judul
35.	26 September 2024	Website Sigijateng	Awali Kegiatan Kedewanan, DPRD Kota Solo Gelar Wayang Kulit, Pameran Bursa Keris
36.	27 Juni 2024	Website Sigijateng	DPRD Kota Surakarta Gelar Audiensi Bersama Forum Silaturahmi Ulama & Ormas Islam Terkait Peredaran Miras
37.	18 Juli 2024	Website Sigijateng	Anggota DPRD Kota Surakarta Ajak Masyarakat Gunakan Hak Pilih dengan Hati Nurani dan Damai



Gambar 5.15 *Tampilan Iklan Advetorial/Artikel di Koran Tribun Jateng dan Jateng Pos Tahun 2024*

k. Bimbingan Teknis Anggota DPRD

Dalam rangka meningkatkan kapasitas, wawasan, serta pemahaman terhadap tugas dan fungsi kelembagaan, DPRD Kota Surakarta secara berkelanjutan menyelenggarakan kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) bagi para anggota DPRD. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya penguatan kompetensi legislatif, agar pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan dapat dilakukan secara lebih profesional, responsif, dan sesuai dengan dinamika regulasi yang terus berkembang.

Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan ini, DPRD Kota Surakarta menjalin kerja sama dengan pihak ketiga, yakni Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang, sebagai lembaga penyelenggara yang memiliki kompetensi akademik, pengalaman, serta legalitas dalam menyelenggarakan program pelatihan dan pendalaman tugas bagi anggota dewan. Melalui sinergi ini, materi bimtek disusun secara komprehensif dengan pendekatan teoritis maupun praktis yang relevan dengan kebutuhan aktual di daerah.

Bimbingan teknis yang dilaksanakan meliputi berbagai topik penting, seperti dinamika perundang-undangan terbaru, strategi pengawasan keuangan daerah, optimalisasi peran alat kelengkapan dewan, hingga penguatan etika dan tata tertib dalam menjalankan tugas representasi. Materi disampaikan oleh narasumber ahli dari kalangan akademisi, praktisi pemerintahan, maupun pejabat yang berkompeten di bidangnya.

Melalui kegiatan ini, diharapkan anggota DPRD Kota Surakarta semakin siap dalam menjalankan perannya sebagai wakil rakyat, mitra eksekutif, dan pengawal aspirasi masyarakat. Bimtek juga menjadi ruang penyegaran dan refleksi bagi para anggota dewan untuk senantiasa adaptif terhadap perubahan kebijakan nasional dan dinamika lokal yang berkembang cepat.

Sinergi antara DPRD dan UNTAG Semarang ini menjadi wujud nyata kolaborasi antara lembaga legislatif dan dunia pendidikan tinggi dalam mendukung tata kelola pemerintahan daerah yang lebih baik.

Tabel 5.45 **Jadwal Pelaksanaan Bimtek DPRD Kota Surakarta Tahun 2024**

No	Waktu Pelaksanaan	Lokasi	Tema
1.	29 Februari – 3 Maret 2024 (Kamis-Minggu)	Hotel Kimaya Sudirman. Yogyakarta	Peningkatan Kapasitas Tugas, dan Wewenang DPRD dalam RPJPD dan Pertanggungjawaban APBD
2.	29 Mei – 1 Juni 2024 (Rabu-Sabtu)	Hotel Novotel. Semarang	Peran DPRD dalam Pembahasan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Tindaklanjut LHP BPK
3.	21 – 24 Desember 2024 (Sabtu-Selasa)	Hotel Grand Mercure. Yogyakarta	Optimalisasi Fungsi DPRD dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.



Gambar 5.16 **Foto-foto Kegiatan Bimtek DPRD Kota Surakarta Tahun 2024 (Hotel Grand Mercure-Yogyakarta)**

I. Inspeksi Mendadak (Sidak)

Sebagai bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan, DPRD Kota Surakarta secara aktif melakukan kegiatan Inspeksi Mendadak (Sidak) ke berbagai lokasi strategis di wilayah Kota Surakarta. Kegiatan ini merupakan wujud nyata komitmen DPRD dalam memastikan pelaksanaan program dan kegiatan pemerintahan berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta menjawab aspirasi dan keluhan masyarakat secara langsung di lapangan.

Sidak dilakukan secara berkala maupun insidental oleh pimpinan dan anggota DPRD, baik secara kelembagaan maupun melalui alat kelengkapan dewan yang membidangi.

Tujuan utama dari sidak adalah untuk memperoleh informasi faktual, melakukan verifikasi langsung terhadap pelaksanaan kebijakan, serta mengidentifikasi persoalan yang memerlukan perhatian segera dari pemerintah daerah maupun instansi terkait.

Lokasi sidak dapat mencakup berbagai sektor, mulai dari infrastruktur publik, layanan kesehatan, pendidikan, pasar tradisional, distribusi bantuan sosial, hingga pelaksanaan proyek pembangunan fisik. Dalam kegiatan ini, DPRD juga melibatkan mitra teknis seperti OPD terkait agar hasil pengawasan dapat segera ditindaklanjuti secara efektif.

Melalui kegiatan sidak, DPRD Kota Surakarta tidak hanya menjalankan fungsi kontrol, tetapi juga menunjukkan peran aktifnya dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Hasil dari kegiatan ini kemudian menjadi bagian penting dalam pembahasan rapat kerja, rekomendasi kebijakan, hingga pengambilan keputusan yang berpihak pada kepentingan publik.

Tabel 5.46 ***Pelaksanaan Sidak DPRD Kota Surakarta Tahun 2024***

No	Waktu Pelaksanaan	Nama Kegiatan
1.	Kamis, 4 Januari 2024	Sidak Komisi IV ke Puskesmas Banyuanyar dan Sangkrah
2.	Selasa, 9 Januari 2024	Sidak Komisi IV ke Taman Balekambang
3.	Selasa, 5 Maret 2024	Sidak Komisi IV ke Alun-alun Kidul dan SD N Kedunglumbu
4.	Kamis, 18 April 2024	Sidak Komisi III ke Pos 4 Damkar dan UPTD Transportasi
5.	Rabu, 5 Juni 2024	Sidak Komisi III ke Putri Cempo dan Program Rumah Hunian

No	Waktu Pelaksanaan	Nama Kegiatan
6.	Jumat, 7 Juni 2024	Sidak Komisi IV ke Puskesmas Banyuanyar dan RSUD Ngipang
7.	Kamis, 13 Juni 2024	Sidak Komisi II ke Pembangunan Balai Benih dan Sentra IKM Sri Kayu
8.	Selasa, 6 Agustus 2024	Sidak Komisi IV Pembangunan SMP N 6 Surakarta
9.	Rabu, 21 Agustus 2024	Sidak Pimpinan DPRD ke Solo Safari
10.	Jumat, 13 Desember 2024	Sidak Komisi III ke Jembatan dan Jalan "Marhaen"
11.	Selasa, 24 Desember 2024	Sidak Komisi III ke Joglo
12.	Selasa, 31 Desember 2024	Sidak Komisi III ke Tanggul Longsor di Sangkrah



Gambar 5.17 **Foto-foto Sidak Komisi III DPRD Kota Surakarta ke Joglo Tahun 2024**



BAB VI **FASILITASI** **PENGANGGARAN** **DAN** **PENGAWASAN**



I. Tugas dan Fungsi

Bagian Fasilitas Penganggaran dan Pengawasan dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dewan. Bagian Fasilitas Penganggaran dan Pengawasan mempunyai tugas melaksanakan fasilitas penganggaran, serta kerja sama dan aspirasi.

Berdasarkan Peraturan Walikota Surakarta Nomor 14 Tahun 2023, Bagian Fasilitas Penganggaran dan Pengawasan mempunyai fungsi:

- a. Pengkoordinasikan dan memfasilitasi penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat.
- b. Pengkoordinasikan dan memfasilitasi pembahasan kerjasama daerah.
- c. Pengkoordinasikan dan memfasilitasi pengawasan penyelenggaraan pemerintahan.
- d. Pengkoordinasikan dan memfasilitasi, pelaksanaan dan pengawasan kode etik DPRD.
- e. Pengkoordinasikan dan memfasilitasi pembahasan kebijakan anggaran.
- f. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh atasan yang berkaitan dengan tugasnya.

II. SOTK

Bagian Fasilitas Penganggaran dan Pengawasan, terdiri atas:

- a. Sub Koordinator Fasilitas Penganggaran;
- b. Sub Koordinator Kerjasama dan Aspirasi;
- c. Jabatan Fungsional lainnya.

III. Kebijakan Anggaran

Menurut Pasal 1 ayat (2) PP No. 12 Tahun 2019, pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah. Fungsi pengawasan adalah anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai apakah Kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Kegiatan Kebijakan Anggaran pada bagian fasilitasi penganggaran dan pengawasan meliputi enam sub-kegiatan yang terdiri dari:

a. Pembahasan KUA PPAS

Menurut PP Nomor 12 Tahun 2019, Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan Pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. Kemudian, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah. Menurut Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 Rancangan KUA memuat:

1. kondisi ekonomi makro daerah
2. asumsi penyusunan APBD
3. kebijakan Pendapatan Daerah
4. kebijakan Belanja Daerah
5. kebijakan Pembiayaan Daerah

Strategi pencapaian, yang memuat langkah-langkah konkrit dalam mencapai target kondisi ekonomi makro daerah, asumsi penyusunan APBD, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, dan kebijakan pembiayaan daerah.

Dalam Permendagri Nomor 77 Tahun 2020, rancangan PPAS disusun dengan tahapan:

1. Menentukan skala prioritas pembangunan daerah;
2. Menentukan prioritas program, kegiatan, dan sub kegiatan untuk masing-masing urusan yang disinkronkan dengan prioritas dan program nasional yang tercantum dalam rencana kerja pemerintah pusat setiap tahun untuk pemerintah provinsi;
3. Menentukan prioritas program, kegiatan, dan sub kegiatan untuk masing-masing urusan yang disinkronkan dengan prioritas dan program nasional yang tercantum dalam rencana kerja pemerintah pusat dan prioritas serta program provinsi yang tercantum dalam rencana kerja pemerintah provinsi setiap tahun untuk pemerintah kabupaten/kota; dan
4. Menyusun capaian kinerja, sasaran, dan plafon anggaran sementara untuk masing-masing program, kegiatan, dan sub kegiatan

Pembahasan KUA dan PPAS merupakan bagian cukup penting yang memberi bagi penetapan plafon anggaran setiap Perangkat Daerah sehingga ketepatan waktu pelaksanaan pembahasan menjadi sangat penting terhadap penyusunan dokumen anggaran selanjutnya.

b. Pembahasan Perubahan KUA PPAS

Mengacu pada Pasal 162 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri ini membuat ketentuan terkait perubahan KUA dan perubahan PPAS sebagai berikut:

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA dapat berupa terjadinya:
 1. Pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah
 2. Pelampauan atau tidak terealisasinya alokasi belanja daerah dan/atau
 3. Perubahan sumber dan penggunaan pembiayaan daerah.
- b. Kepala daerah memformulasikan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA ke dalam rancangan perubahan KUA serta perubahan PPAS berdasarkan perubahan RKPD.
- c. Dalam rancangan perubahan KUA disertai penjelasan mengenai perbedaan asumsi dengan KUA yang ditetapkan sebelumnya.
- d. Dalam rancangan perubahan PPAS disertai penjelasan:
 1. Program, kegiatan dan sub kegiatan yang dapat diusulkan untuk ditampung dalam perubahan APBD dengan mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan APBD tahun anggaran berjalan;
 2. Capaian sasaran kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan yang harus dikurangi dalam perubahan APBD apabila asumsi KUA tidak tercapai; dan
 3. Capaian sasaran kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan yang harus ditingkatkan dalam perubahan APBD apabila melampaui asumsi KUA.

Pembahasan Perubahan KUA dan PPAS merupakan bagian cukup penting yang memberi bagi penetapan plafon anggaran setiap Perangkat Daerah sehingga ketepatan waktu pelaksanaan pembahasan menjadi sangat penting terhadap penyusunan dokumen anggaran selanjutnya.



Gambar 6.1 **Rapat Pembahasan Perubahan KUA PPAS.**

c. Ketentuan Terkait Kesepakatan KUA dan PPAS

Mengacu pada Pasal 90 sampai dengan Pasal 92 Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, Peraturan Menteri ini membuat ketentuan terkait KUA dan PPAS sebagai berikut:

- a. Kepala Daerah menyampaikan rancangan KUA dan rancangan PPAS kepada DPRD paling lambat minggu kedua bulan Juli untuk dibahas dan disepakati bersama antara Kepala Daerah dan DPRD.
- b. Kepala Daerah dapat mengajukan usulan penambahan kegiatan/sub kegiatan baru dalam rancangan KUA dan rancangan PPAS yang tidak terdapat dalam RKPD untuk disepakati bersama dengan DPRD dalam pembahasan rancangan KUA dan rancangan PPAS.
- c. Penambahan kegiatan/sub kegiatan baru tersebut sepanjang memenuhi kriteria darurat atau mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Kesepakatan terhadap rancangan KUA dan rancangan PPAS ditandatangani oleh Kepala Daerah dan pimpinan DPRD paling lambat minggu kedua bulan Agustus.
- e. KUA dan PPAS yang telah disepakati Kepala Daerah bersama DPRD menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun RKA SKPD.
- f. Tata cara pembahasan rancangan KUA dan rancangan PPAS dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- g. Persetujuan bersama paling sedikit memuat:
 1. Nama Kegiatan
 2. Jangka waktu pelaksanaan Kegiatan
 3. Jumlah anggaran
 4. Lokasi anggaran per tahun
- h. Dalam hal Kepala Daerah berhalangan tetap atau berhalangan sementara, Wakil Kepala Daerah bertugas untuk:
 1. Menyampaikan rancangan KUA dan rancangan PPAS kepada DPRD
 2. Menandatangani nota kesepakatan KUA dan nota kesepakatan PPAS
- i. Dalam hal Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berhalangan tetap atau sementara, pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang selaku penjabat/penjabat sementara/pelaksana tugas kepala daerah bertugas untuk:
 1. Menyampaikan rancangan KUA dan rancangan PPAS kepada DPRD
 2. Menandatangani nota kesepakatan KUA dan nota kesepakatan PPAS
- j. Dalam hal seluruh pimpinan DPRD berhalangan tetap atau sementara dalam waktu yang bersamaan, pelaksana tugas pimpinan DPRD bertugas untuk menandatangani nota kesepakatan KUA dan PPAS.

k. Dalam hal Kepala Daerah dan DPRD tidak menyepakati bersama rancangan KUA dan rancangan PPAS, paling lama 6 (enam) minggu sejak rancangan KUA dan rancangan PPAS disampaikan kepada DPRD, Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD kepada DPRD berdasarkan RKPD, rancangan KUA, dan rancangan PPAS yang disusun Kepala Daerah, untuk dibahas dan disetujui bersama antara Kepala Daerah dengan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

d. Pembahasan APBD

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda. Berdasarkan Pasal 23 sampai dengan Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, ketentuan terkait APBD adalah sebagai berikut:

1. APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Daerah dan kemampuan Pendapatan Daerah.
2. APBD disusun dengan mempedomani KUA PPAS yang didasarkan pada RKPD.
3. APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi.
4. APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD setiap tahun ditetapkan dengan Perda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Semua Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
6. Penerimaan Daerah terdiri atas:
 - a. pendapatan daerah; dan
 - b. penerimaan pembiayaan daerah.
7. Pengeluaran Daerah terdiri atas:
 - a. belanja daerah; dan
 - b. pengeluaran pembiayaan daerah.
8. Penerimaan Daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan rencana Penerimaan Daerah yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber Penerimaan Daerah dan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Pengeluaran Daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan rencana Pengeluaran Daerah sesuai dengan kepastian tersedianya dana atas Penerimaan Daerah dalam jumlah yang cukup.

10. Setiap Pengeluaran Daerah harus memiliki dasar hukum yang melandasinya.
11. Seluruh Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah dianggarkan secara bruto dalam APBD.

APBD dalam satu tahun anggaran meliputi:

- a. Hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih;
- b. Kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
- c. Penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, pada tahun anggaran yang bersangkutan atau pada tahun anggaran berikutnya.

APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri atas:

- a. Pendapatan Daerah;
- b. Belanja Daerah; dan
- c. Pembiayaan daerah.

Penyusunan Perda APBD merupakan bagian cukup penting yang memberi dasar hukum bagi pelaksanaan APBD pada tahun berkenaan. Ketidakpatuhan pada SOP ini akan menyebabkan tidak komprehensifnya basis hukum APBD Perubahan pada tahun berkenaan. Penyusunan Raperda APBD menggunakan data RKA-OPD/RKA PPKD Perubahan yang telah dikompilasi menjadi dokumen rancangan APBD.



Gambar 6.2 **Rapat Pembahasan APBD.**

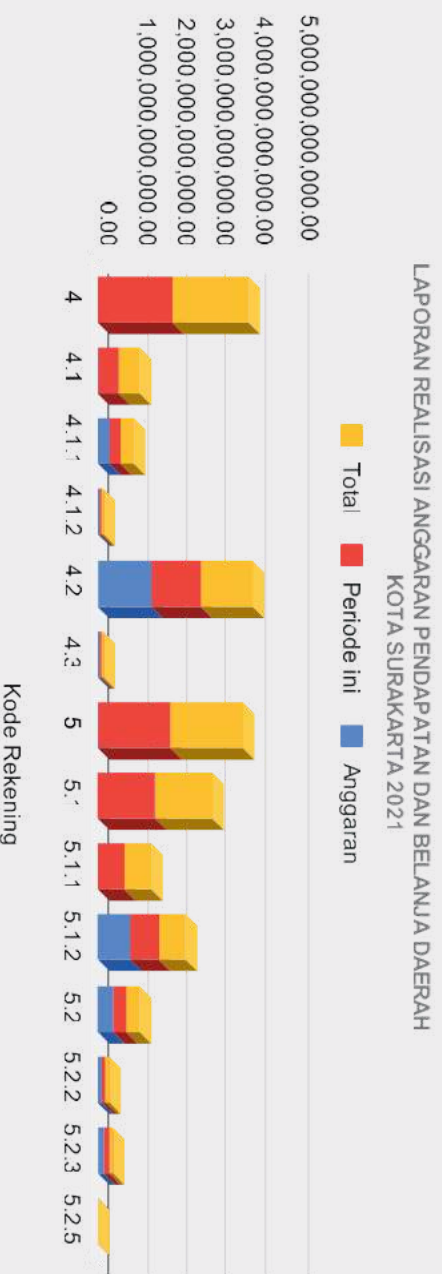
Menurut PP Nomor 12 Tahun 2019, rancangan Perda tentang APBD memuat lampiran paling sedikit terdiri atas:

- a. Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan Pembiayaan;
- b. Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan daerah dan organisasi;
- c. Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan daerah, organisasi, Program, Kegiatan, kelompok, jenis pendapatan, belanja, dan Pembiayaan;
- d. Rekapitulasi belanja dan kesesuaian menurut Urusan Pemerintahan daerah, organisasi, Program, dan Kegiatan;
- e. Rekapitulasi Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan Urusan Pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
- f. Daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;
- g. Daftar Piutang Daerah;
- h. Daftar penyertaan modal daerah dan investasi daerah lainnya;
- i. Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
- j. Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lain-lain;
- k. Daftar Kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran yang direncanakan;
- l. Daftar Dana Cadangan; dan
- m. Daftar Pinjaman Daerah.

Berikut Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta dari Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2024 :

Tabel 6.1
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTA SURAKARTA 2021

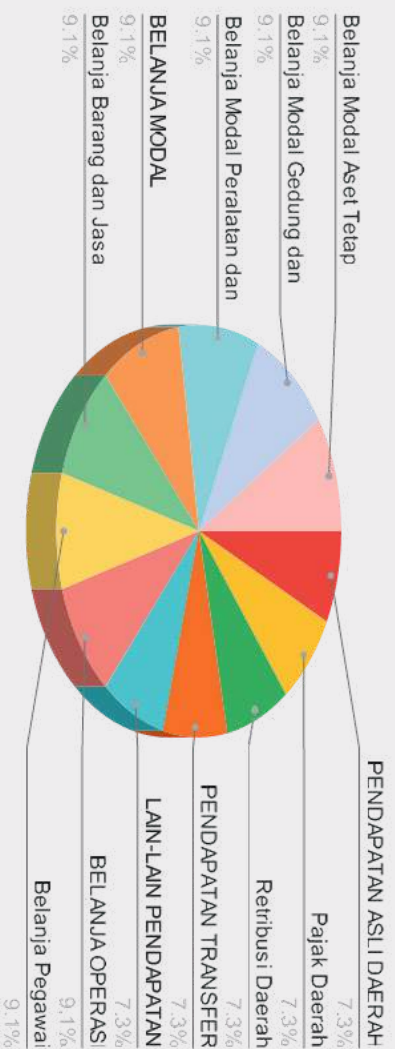
Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi		
			Periode lalu	Periode ini	Total
4	PENDAPATAN DAERAH	1.945.769.363.239,46	0,00	1.939.268.856.769,00	1.939.268.856.769,00
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	514.200.704.362,46	0,00	560.579.997.086,00	560.579.997.086,00
4.1.1	Pajak Daerah	303.000.000.000,00	0,00	315.917.760.826,00	315.917.760.826,00
4.1.2	Retribusi Daerah	60.940.870.800,00	0,00	51.526.850.967,00	51.526.850.967,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.370.600.374.312,00	0,00	1.321.146.389.683,00	1.321.146.389.683,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	60.968.284.565,00	0,00	57.542.470.000,00	57.542.470.000,00
5	BELANJA DAERAH	2.187.312.144.097,72	0,00	1.866.496.348.304,00	1.866.496.348.304,00
5.1	BELANJA OPERASI	1.664.231.490.734,72	0,00	1.489.971.451.913,00	1.489.971.451.913,00
5.1.1	Belanja Pegawai	749.093.614.332,72	0,00	707.400.389.661,00	707.400.389.661,00
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	845.660.155.682,00	0,00	720.683.583.846,00	720.683.583.846,00
5.2	BELANJA MODAL	413.480.653.363,00	0,00	341.100.953.660,00	341.100.953.660,00
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	115.211.261.591,00	0,00	90.200.126.327,00	90.200.126.327,00
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	158.603.953.190,00	0,00	131.388.235.667,00	131.388.235.667,00
5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	8.756.152.783,00	0,00	5.919.671.540,00	5.919.671.540,00



Tabel 6.2
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTA SURAKARTA 2022

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi		Total
			Periode lalu	Periode ini	
4	PENDAPATAN DAERAH	2.152.659.533.038,00	0,00	2.028.438.691.045,88	2.028.438.691.045,88
4.01	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	740.143.061.392,00	0,00	647.440.585.331,88	647.440.585.331,88
4.01.01	Pajak Daerah	485.700.000.000,00	0,00	408.526.805.553,00	408.526.805.553,00
4.01.02	Retribusi Daerah	85.443.461.840,00	0,00	60.959.392.370,00	60.959.392.370,00
4.02	PENDAPATAN TRANSFER	1.412.516.471.646,00	0,00	1.376.198.105.714,00	1.376.198.105.714,00
4.03	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	0,00	0,00	4.800.000.000,00	4.800.000.000,00
5	BELANJA DAERAH	2.459.974.822.361,00	0,00	2.088.323.395.600,00	2.088.323.395.600,00
5.01	BELANJA OPERASI	1.983.429.017.273,06	0,00	1.700.583.774.120,00	1.700.583.774.120,00
5.01.01	Belanja Pegawai	806.366.468.268,37	0,00	719.927.785.645,00	719.927.785.645,00
5.01.02	Belanja Barang dan Jasa	1.041.632.929.004,69	0,00	852.358.150.533,00	852.358.150.533,00
5.02	BELANJA MODAL	453.875.805.087,94	0,00	380.832.881.832,00	380.832.881.832,00
5.02.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	108.012.588.186,75	0,00	84.835.631.797,00	84.835.631.797,00
5.02.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	161.634.987.657,00	0,00	142.322.295.504,00	142.322.295.504,00
5.02.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	12.137.975.690,19	0,00	9.793.322.418,00	9.793.322.418,00

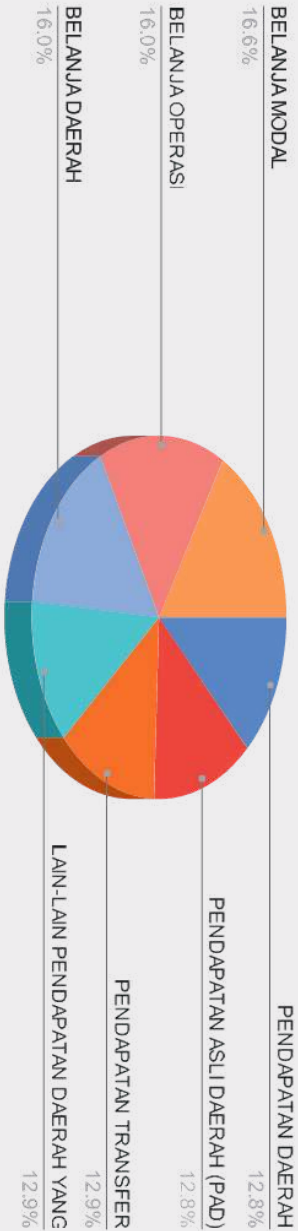
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTA SURAKARTA 2022



Tabel 6.3
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTA SURAKARTTA 2023

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi		
			Periode Lalu	Periode Ini	Total
4	PENDAPATAN DAERAH	2.107.639.828.588,53	0,00	1.989.199.313.338,00	1.989.199.313.338,00
4.01	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	782.497.439.588,83	0,00	687.326.602.700,00	687.326.602.700,00
4.1.01	Pajak Daerah	524.045.000.000,00	0,00	441.128.031.998,00	441.128.031.998,00
4.1.02	Retribusi Daerah	80.673.058.580,00	0,00	61.037.660.310,00	61.037.660.310,00
4.02	PENDAPATAN TRANSFER	1.324.242.388.999,70	0,00	1.300.972.710.638,00	1.300.972.710.638,00
4.03	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	900.000.000,00	0,00	900.000.000,00	900.000.000,00
5	BELANJA DAERAH	2.355.070.413.357,41	0,00	2.107.369.519.032,00	2.107.369.519.032,00
5.01	BELANJA OPERASI	1.920.658.910.684,92	0,00	1.724.205.594.329,00	1.724.205.594.329,00
5.1.01	Belanja Pegawai	774.437.912.289,37	0,00	708.647.497.335,00	708.647.497.335,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.011.112.191.015,55	0,00	883.318.678.634,00	883.318.678.634,00
5.2	BELANJA MODAL	430.411.502.672,49	0,00	380.390.555.685,00	380.390.555.685,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	93.861.743.323,94	0,00	85.498.516.855,00	85.498.516.855,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	251.709.091.909,55	0,00	221.273.945.813,00	221.273.945.813,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	8.989.744.339,00	0,00	8.884.450.531,00	8.884.450.531,00

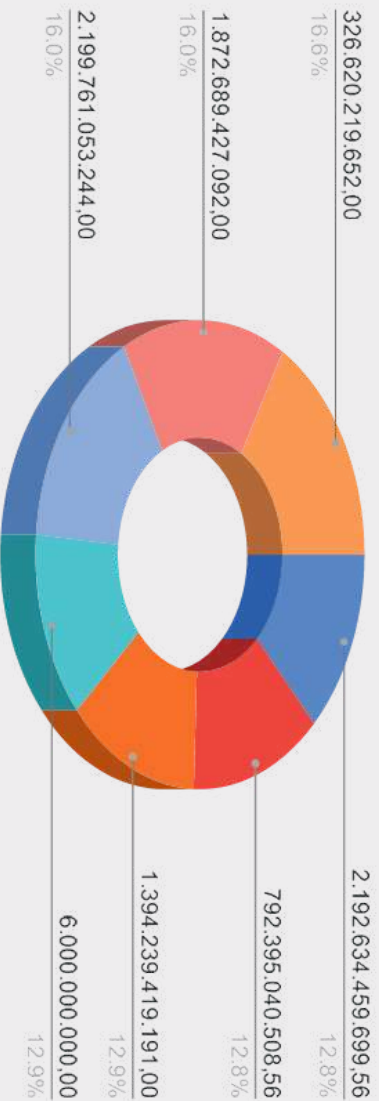
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTA SURAKARTTA 2023



Tabel 6.4
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTA SURAKARTA 2024

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi		
			Periode Lalu	Periode Ini	Total
4	PENDAPATAN DAERAH	2.321.555.054.003,00	0,00	2.192.634.459.699,56	2.192.634.459.699,56
4.01	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	893.186.133.981,00	0,00	792.395.040.508,56	792.395.040.508,56
4.1.01	Pajak Daerah	565.350.000.000,00	0,00	464.775.113.858,00	464.775.113.858,00
4.1.02	Retribusi Daerah	85.602.913.011,00	0,00	78.921.181.385,00	78.921.181.385,00
4.02	PENDAPATAN TRANSFER	1.421.808.920.022,00	0,00	1.394.239.419.191,00	1.394.239.419.191,00
4.03	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	6.560.000.000,00	0,00	6.000.000.000,00	6.000.000.000,00
5	BELANJA DAERAH	2.437.815.433.078,00	0,00	2.199.761.053.244,00	2.199.761.053.244,00
5.01	BELANJA OPERASI	2.069.439.523.415,00	0,00	1.872.689.427.092,00	1.872.689.427.092,00
5.1.01	Belanja Pegawai	812.953.697.768,00	0,00	771.204.231.150,00	771.204.231.150,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.100.135.832.936,00	0,00	946.170.040.019,00	946.170.040.019,00
5.2	BELANJA MODAL	363.375.909.663,00	0,00	326.620.219.652,00	326.620.219.652,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	96.402.162.580,00	0,00	86.434.855.011,00	86.434.855.011,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	218.331.570.050,00	0,00	199.967.594.443,00	199.967.594.443,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	6.587.805.700,00	0,00	6.398.803.303,00	6.398.803.303,00

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTA SURAKARTA 2024



e. Pembahasan Perubahan APBD

Penyusunan Perda APBD Perubahan merupakan bagian cukup penting yang memberi dasar hukum bagi pelaksanaan APBD Perubahan pada tahun berkenaan. Ketidakpatuhan pada SOP ini akan menyebabkan tidak komprehensifnya basis hukum APBD Perubahan pada tahun berkenaan. Penyusunan Raperda APBD Perubahan menggunakan data RKA-OPD/RKA PPKD Perubahan yang telah dikompilasi menjadi dokumen rancangan APBD Perubahan.

Mengacu pada Pasal 161 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri ini membuat ketentuan terkait perubahan APBD sebagai berikut:

1. Laporan realisasi semester pertama APBD menjadi dasar perubahan APBD.
2. Perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi:
 - a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;
 - b. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, antar sub kegiatan dan antar jenis belanja;
 - c. Keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan;
 - d. Keadaan darurat; dan/atau
 - e. Keadaan luar biasa.



Gambar 6.3 **Rapat Pembahasan Perubahan APBD.**

f. Pembahasan Pertanggungjawaban APBD

APBD ditetapkan setiap tahun dengan Peraturan Daerah (Perda), yang dibahas dan disetujui bersama oleh Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Penyusunan APBD dilakukan dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat demi tercapainya tujuan bernegara. Berdasarkan Pasal 104 dan Pasal 105 Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, ketentuan umum terkait penyampaian dan pembahasan Rancangan Perda tentang APBD adalah sebagai berikut:

1. Kepala daerah wajib mengajukan rancangan Perda tentang APBD disertai penjelasan dan dokumen pendukung kepada DPRD paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum 1 (satu) bulan tahun anggaran berakhir untuk memperoleh persetujuan bersama antara kepala daerah dan DPRD.
2. Kepala daerah yang tidak mengajukan rancangan Perda tentang APBD sesuai ketentuan, dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pembahasan rancangan Perda tentang APBD dilaksanakan oleh kepala daerah dan DPRD setelah kepala daerah menyampaikan rancangan Perda tentang APBD beserta penjelasan dan dokumen pendukung kepada DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Pembahasan rancangan Perda tentang APBD berpedoman pada RKPD, KUA, dan PPAS.
5. Pembahasan Pertanggungjawaban APBD dan Raperda Pertanggungjawaban APBD harus dilakukan tepat waktu agar tindak lanjut dapat dilakukan dengan segera



Gambar 6.4 **Rapat Pembahasan Banggar P2APBD.**

g. Pembahasan Laporan Semester

Pembahasan laporan realisasi semester harus dilakukan tepat waktu agar tindak lanjut pencapaian realisasi anggaran dapat dilakukan dengan segera.

Tabel 6.5 *Kegiatan Anggaran Periode 2023–2024*

No	Sub Kegiatan	2023	2024
1.	Pembahasan KUA PPAS	4 kali	2 kali
2.	Pembahasan Perubahan KUA PPAS	4 kali	0
3.	Pembahasan APBD	8 kali	8 kali
4.	Pembahasan Perubahan APBD	6 kali	4 kali
5.	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	5 kali	7 kali
6.	Pembahasan Laporan Semester	0	0

Keterangan: Pada tahun 2024 tidak terdapat Kegiatan Pembahasan Perubahan KUA PPAS dikarenakan susunan alat kelengkapan yang baru belum terbentuk

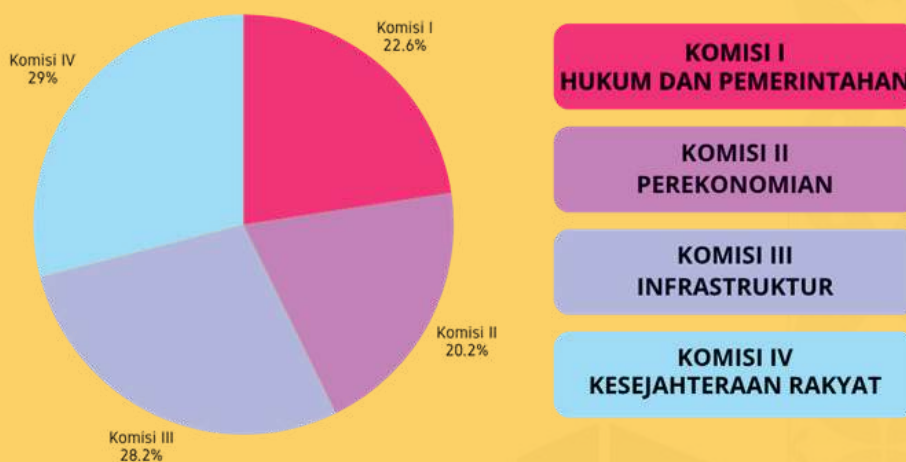
Tabel 6.6 *Rapat Komisi Tahun 2024*

No	BULAN	KOMISI I	KOMISI II	KOMISI III	KOMISI IV
1.	JANUARI	2	1	2	3
2.	FEBRUARI	2	1	2	1
3.	MARET	4	1	1	1
4.	APRIL	1	2	10	1
5.	MEI		2	1	
6.	JUNI	7	6	1	8
7.	JULI	10	8	17	22
8.	AGUSTUS	1	4	1	
9.	SEPTEMBER				
10	OKTOBER				

No	BULAN	KOMISI I	KOMISI II	KOMISI III	KOMISI IV
11.	NOVEMBER				
12.	DESEMBER	1		1	
TOTAL		28	25	35	36

Keterangan: Pada bulan September – November tidak terdapat Kegiatan Rapat Komisi dikarenakan susunan alat kelengkapan yang baru belum terbentuk

Rapat Komisi tahun 2024



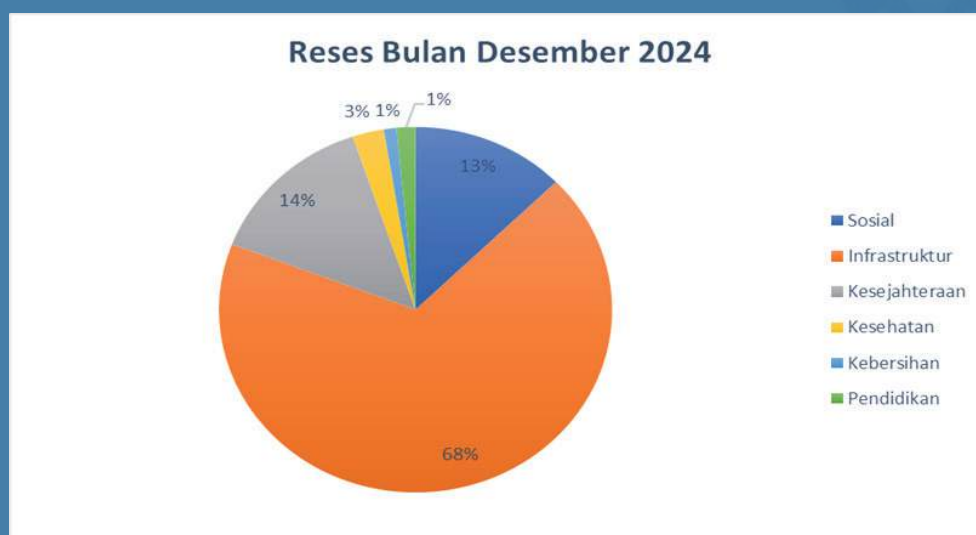
Gambar 6.5 **Persentase Rapat Komisi Tahun 2024**

Tabel 6.7

Kategorisasi Bidang Hasil Reses Bulan Desember 2024 Sesuai Kamus Bappeda (RPJM 2021–2026)

No	Bidang	Jumlah	Program Terkait dalam Kamus Usulan
1.	Sosial	49	Program pemberdayaan sosial, Program rehabilitasi sosial, Program perlindungan dan jaminan sosial.
2.	Infrastruktur	263	Program perumahan dan kawasan permukiman, kumuh, Program pengembangan perumahan, Program peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum, Program kawasan permukiman, Program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase, Program penyelenggaraan jalan, Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum.
3.	Kesejahteraan	54	Program pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan, Program peningkatan kualitas keluarga, Program perlindungan perempuan, anak dan hak anak.
4.	Kesehatan	10	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat, Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan.
5.	Kebersihan	4	Program pengelolaan keanekaragaman hayati (kehati), Program pengelolaan persampahan, Program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

No	Bidang	Jumlah	Program Terkait dalam Kamus Usulan
6.	Pendidikan	6	Program pengelolaan pendidikan.
Total		386	



Gambar 6.6 **Statistik Aspirasi (Reses) Bulan Desember 2024**

Pada Reses Bulan Desember 2024 tersebut, berbagai aspirasi masyarakat dari berbagai bidang telah dihimpun dan dikategorikan ke dalam beberapa sektor utama. Dari total 386 aspirasi yang diterima, bidang infrastruktur menjadi sektor yang paling banyak mendapat perhatian dengan 263 usulan, mencerminkan kebutuhan masyarakat akan pembangunan dan perbaikan fasilitas umum.

Bidang kesejahteraan menempati posisi kedua dengan 54 aspirasi, menunjukkan tingginya harapan warga terhadap peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan sosial. Selanjutnya, bidang sosial mengumpulkan 49 aspirasi, yang mencerminkan kepedulian terhadap isu-isu sosial di masyarakat.

Di sektor kesehatan, terdapat 10 usulan yang menyoroti pentingnya layanan kesehatan yang lebih baik dan akses yang lebih luas bagi masyarakat. Sementara itu, bidang pendidikan mencatat 6 aspirasi, menandakan perlunya peningkatan kualitas pendidikan di daerah. Terakhir, bidang kebersihan memperoleh 4 aspirasi, yang menunjukkan perlunya peningkatan pengelolaan sampah dan kebersihan lingkungan.

Hasil reses ini akan menjadi dasar bagi penyusunan program dan kebijakan yang lebih efektif untuk menjawab kebutuhan masyarakat, serta memastikan pembangunan yang lebih merata di berbagai sektor.

BAB VII PENUTUP



Penyediaan data dan informasi dalam Buku Profil Sekretariat DPRD Kota Surakarta Tahun 2024 diharapkan dapat menjadi salah satu pendukung bagi pengambilan keputusan, kebijakan, dan perencanaan kegiatan selanjutnya.

Sekretariat DPRD Kota Surakarta berkomitmen untuk terus melakukan pemutakhiran, penyempurnaan kualitas Buku Profil dalam mendukung dan mendokumentasikan kegiatan Sekretariat DPRD dalam menunjang pencapaian tri fungsi DPRD Kota Surakarta yang terfasilitasi meliputi namun tidak terbatas pada Bagian Persidangan dan Perundangan, Bagian Fasilitas Pengawasan dan Penganggaran serta Bagian Umum dan Keuangan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Walikota Surakarta Nomor 14 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah .

Kami berharap, buku ini dapat digunakan untuk memotivasi dan meningkatkan kinerja secara optimal. Kepada pihak yang mendukung tersusunnya Buku Profil ini, diucapkan terima kasih dan semoga bermanfaat bagi seluruh pihak yang membutuhkan.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota

Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/106 Tahun 2024 tentang Peresmian Pemberhentian dan peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Periode 2024-2029

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 9 tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024

Peraturan Walikota Nomor 14 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugasdan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Peraturan Walikota Surakarta Nomor 42 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 2 Tahun 2024

Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2021-2024

Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Surakarta Tahun 2021-2024

Laporan Relaisasi Anggaran Sekretariat DPRD Kota Surakarta Tahun 2021-2024



SEKRETARIAT DPRD KOTA SURAKARTA

Jl. Adi Sucipto No. 143A Surakarta 57145
Telp. (0271) 712461, 711879, 735290 Fax. 717620
Website : setwan.surakarta.go.id
Email : setwan@surakarta.go.id